



Citra Kota **Makassar** Dalam Arsip



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2017



CITRA KOTA MAKASSAR DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
2017



CITRA KOTA MAKASSAR DALAM ARSIP

Pengarah

Dr. Mustari Irawan, MPA
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. M. Taufik, M.Si
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab Program

Drs. Agus Santoso, M.Hum
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Tekhnis

Eli Ruliawati, S.Sos, MAP
Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Arsip

Koordinator Penyusunan Arsip Citra Daerah

Abdul Cholik, M.Hum

Penulis

Neneng Ridayanti, S.S, M.Hum

Penelusur Arsip

Abdul Cholik, S.Hum
Bayu Patraisari, A.Md

Penerjemah Arsip

Nugrahita Rizqi, S.Hum

Desain & Layout

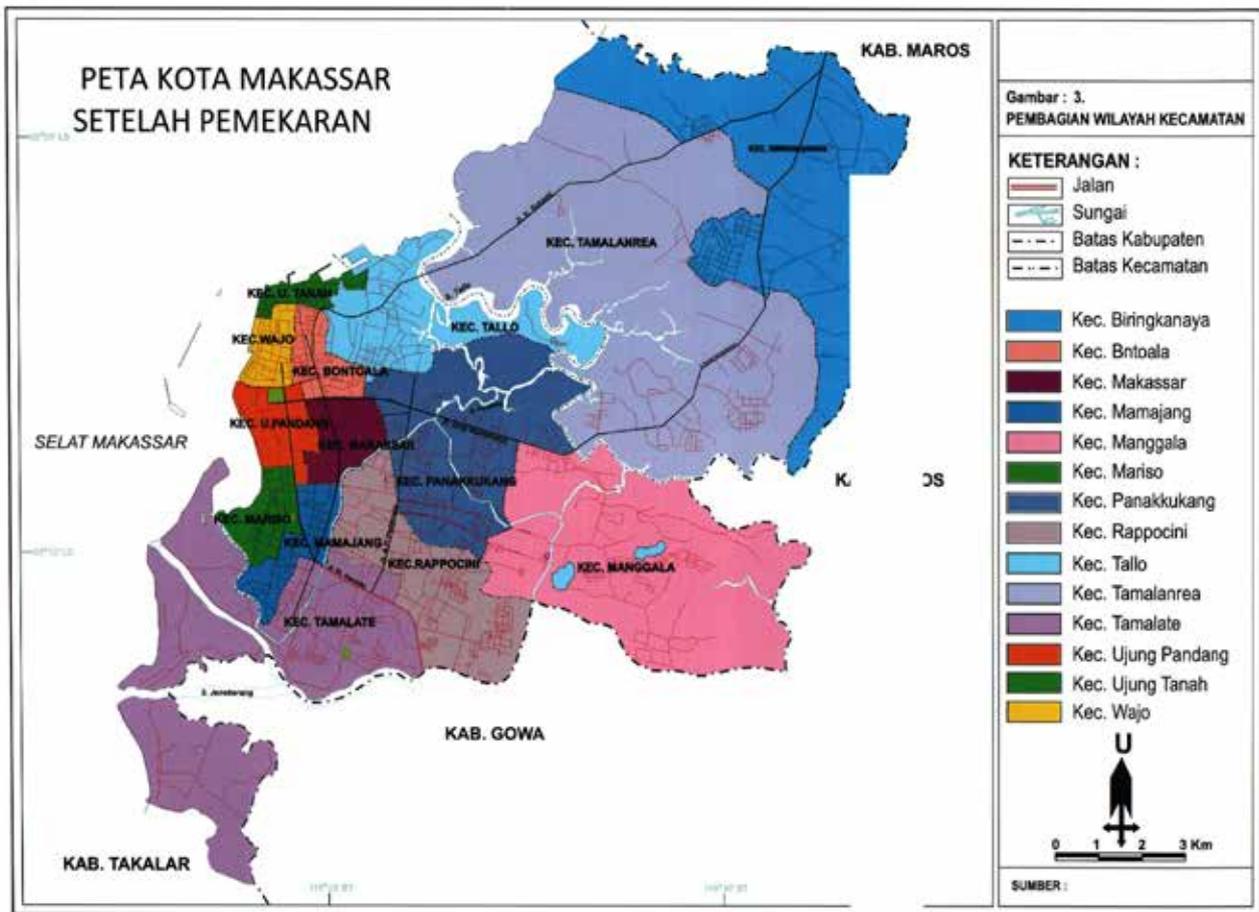
Beny Oktavianto, S.Kom

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978-602-6503-06-0





PETA WILAYAH KOTA MAKASSAR
Sumber: Dinas Kearsipan Kota Makassar



LAMBANG PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



IR. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

Walikota Makassar

Periode 2014 - 2019



DR. SYAMSU RIZAL MI, S.SOS. M.SI

Wakil Walikota Makassar

Periode 2014 - 2019

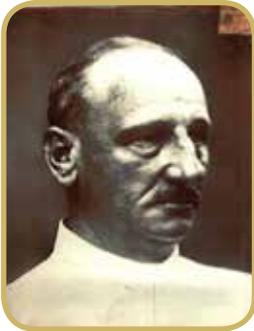


IBRAHIM SALEH
Sekretaris Daerah Kota Makassar



IR. FAROUK M BETTA, MM
Ketua DPRD Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR DARI MASA KE MASA



J.E. Damrinc
Periode 1918 - 1927



M.R. GUNTA
Periode 1942 - 1945



ABDUL HAMID DG. MAGASING
Periode 1947 - 1950



J.M. QAIMUDDIN
Periode 1950 - 1951



J. MEWENKANG
Periode 1951



SAMPARA DG. LILI
Periode 1951 - 1952



ACHMAD DARA SYAHARUDDIN
Periode 1952 - 1957



YUNUS DG. MILE
Periode 1957 - 1959



A. LATIEF DG. MASSIKI
Periode 1959 - 1962



H. AROEPALA
Periode 1962 - 1965



KOL. H.M. DG. PATOMPO
Periode 1965 - 1976



KOLONIEL ABUSTAM
Periode 1967 - 1982

WALIKOTA MAKASSAR DARI MASA KE MASA



KOLONIEL JANCY RAIB
Periode 1982 - 1988



KOLONIEL SUWAHYO
Periode 1988 - 1993



H.A. MALIK B. MASRI
Periode 1994 - 1999



H.B. AMIRUDDIN MAULA
Periode 1999 - 2004



ILHAM ARIEF. S
Periode 2004 - 2008



H.A. HERRY ISKANDAR
Periode 2008 - 2009



ILHAM ARIEF. S
Periode 2009 - 2014



MOH. RAMDHAN POMANTO
Periode 2014 - 2019

**SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**





SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkrystal dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga" (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah arsip mengenai Kota Makassar banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, ekonomi, kunjungan kenegaraan, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Makassar. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kota Makassar melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Makassar Dalam Arsip. Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang

berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Makassar ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan buku Citra Daerah ini hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota Makassar yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya di bidang kearsipan dengan memberdayakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Jakarta, 22 Mei 2017

Kepala,



Dr. Mustari Irawan, MPA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Wilayah Kota Makassar	iii
Lambang Pemerintah Kota Makassar	iv
Walikota Makassar	v
Wakil Walikota Makassar	vi
Sekretaris Daerah Kota Makassar	vii
Ketua DPRD Kota Makassar	viii
Walikota Makassar Dari Masa Ke Masa	ix
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	xi
Daftar Isi	xv
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Masa Kerajaan	4
B. Sejarah Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang	7
C. Sejarah Masa Kemerdekaan	12
Daftar Pustaka	15
CITRA KOTA MAKASSAR DALAM ARSIP	17
A. Geografis dan Keadaan Alam	19
B. Politik dan Pemerintahan	29
C. Pertahanan dan Keamanan	59
D. Keagamaan	77
E. Pariwisata dan Budaya	95
F. Pendidikan	109
G. Olahraga dan Kesehatan	131
H. Transportasi dan Komunikasi	143
I. Infrastruktur	157
J. Perekonomian	205
Daftar Arsip	221
Penutup	235







PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya Makassar mempunyai makna penting baik dilihat dari fungsi maupun peranannya sebagai sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Dalam posisinya yang sangat strategis, Makassar sejak dahulu ramai dikunjungi nelayan maupun pedagang yang mengikuti rute pelayaran lokal maupun yang hendak menuju kawasan Asia Pasifik dan Eropa.

Pada abad ke-16 di Makassar terdapat dua pusat pemerintahan, yaitu *Kale Gawe* yang terletak di tanah tinggi pinggiran utara Sungai Jeneberang dan yang lainnya berada di muara Sungai Tallo. Perkembangan Makassar sebagai kota, bandar niaga dan pangkalan pertahanan Kerajaan Makassar dalam pertengahan abad ke-16, didukung oleh dua faktor yang menentukan yaitu faktor dari dalam, yakni tumbuhnya Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan yang menghimpun dan melindungi negeri-negeri orang Makassar di sepanjang pesisir selatan jazirah selatan Sulawesi, sedangkan faktor dari luar, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara untuk berniaga.

Kemasyhuran Kota Makassar tidak lepas dari politik Kerajaan Gowa yang menempatkan Makassar sebagai pusat perdagangan. Gowa tampil sebagai kerajaan besar dibuktikan dengan adanya ekspansi kerajaan ini. Pada masa pemerintahan Tumapa'risi Kallona Kerajaan Gowa mengadakan perluasan kekuasaan ke Kerajaan Bugis. Hal ini bertujuan untuk membentuk jaringan perdagangan antar daerah pedalaman dengan pusat niaga Makassar. Kehadiran Makassar sebagai kota niaga diikuti pula oleh penyusunan sistem administrasi dan birokrasi negara maritim Kerajaan Gowa yang kuat.

Pada abad ke-17, Makassar merupakan pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. Makassar saat itu memegang supremasi perdagangan setelah Jawa Timur, yaitu tempat berkumpul barang-barang dagangan terutama rempah-rempah dari daerah Maluku untuk selanjutnya dikirim ke barat melalui pedagang-pedagang Melayu yang berpusat di Malaka. Pedagang dan pelaut yang melakukan pelayaran niaga di Asia Tenggara dan Asia Timur menempatkan Makassar sebagai kota pelabuhan Internasional pada akhir abad ke-16 dan pertengahan kedua abad ke-17. Peranan Makassar sebagai pusat perdagangan meningkat dan Makassar pun jadi pusat penyebaran Agama Islam. Sejak itu, Makassar menjadi pemukiman multi etnik, terdiri dari suku-suku di Suawesi Selatan dan para pendatang dari Malaka dan Jawa.

Munculnya Pelabuhan Makassar tidak terpisahkan dari usaha Kerajaan Gowa membangun diri menjadi kerajaan maritim utama di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa menguasai jalur pelayaran dan perdagangan Indonesia Timur dan menjadikan Somba Opu sebagai pelabuhan transito utama bagi perdagangan rempah dari Maluku. Keramaian bandar Makassar mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17 ketika bandar itu

menjadi tempat transit barang dagangan dari timur dan barat nusantara. Saat itu, Makassar telah memiliki jalur perhubungan dengan berbagai daerah, dalam dan luar negeri. Daerah-daerah yang mempunyai hubungan dengan Makassar adalah Johor, Patani, Minangkabau, Aceh, Gresik, Jepara, Banten, Banjarmasin serta di sebelah timur yaitu Maluku, Tidore, Ternate, Banda.

Kota Makassar sampai saat ini, masih menunjukkan sebagai kota dagang. Di sepanjang pantai Kota Makassar terdapat pelabuhan-pelabuhan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan. Masuknya agama dan kebudayaan Islam yang dibawa para pedagang mempunyai pengaruh terhadap susunan kota. Speelman menata Kota Makassar menjadi tiga bagian, pusat kegiatan administrasi pemerintahan di *Fort Rotterdam*, pusat perdagangan di wilayah "*Negory Vlaardingen*" dan wilayah pemukiman penduduk yang disebut kampung. Makassar sebagai bandar niaga tidak terlepas dari perkembangan dunia Internasional dengan adanya motif ekonomi, politik dan agama. Peranan Makassar dalam perjalanan sejarahnya sebagai kota pelabuhan atau bandar niaga di jalur sutera menjadikan Makassar muncul sebagai kota pelabuhan serta pusat peradaban dan kemaritiman yang membentuk tiga peran, *centre of change*, *centre of interation* dan *centre of culture*.

Kota Pelabuhan Makassar berada dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang pada pesisir barat bagian selatan dari jazirah selatan Pulau Sulawesi yang merupakan salah satu pulau terbesar di antara pulau-pulau yang berada di bagian tenggara Benua Asia. Pulau ini terletak antara Kalimantan di bagian barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur dan antara Kepulauan Sulu yang merupakan wilayah negara Filipina di sebelah utara dan Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan yang masing-masing secara berurutan dipisahkan oleh Selat Makassar dan Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Laut Flores. Antara jazirah selatan dan jazirah tenggara terletak Teluk Bone, antara jazirah tenggara dan jazirah barat laut terletak Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo.

Proses pembentukan Kota Makassar sebagai kota pelabuhan sangat dipengaruhi beberapa hal yaitu, munculnya Kerajaan Gowa sebagai suatu kekuatan politik dan ekonomi terutama menjelang abad ke-17, hadirnya para pendatang dari berbagai suku bangsa asing di Pelabuhan Makassar serta meningkatnya intensitas pelayaran laut serta peletakan pertama batyu sedimen (*batu Nide'de*) dalam pembangunan dinding Benteng Somba Opu tahun 1548 merupakan suatu momentum tahun berdirinya Kota Makassar begitupun perkembangan pelabuhan Makassar telah mendorong terbentuknya kota dan karakteristik masyarakatnya.

A. SEJARAH MASA KERAJAAN

Kerajaan Makassar oleh beberapa peneliti diidentifikasi sebagai nama lain dari Kerajaan Gowa. Penyebutan ini bertolak dari nama Kota Pelabuhan Makassar yang dipandang sebagai bandar niaga Gowa. Pada dasarnya kota pelabuhan itu adalah

pengembangan pelabuhan dari kerajaan bersaudara yang lazim disebut kerajaan kembar yaitu Pelabuhan Tallo (Kerajaan Tallo) dan Pelabuhan Sombaopu (Kerajaan Gowa). Dua kerajaan ini membentuk satu kesatuan pemerintahan sekitar tahun 1528 dan kemudian bersama-sama memperluas pengaruh kekuasaan di wilayah Sulawesi Selatan dan berusaha memusatkan kegiatan niaga di wilayah itu pada bandar niaga mereka. Dua pelabuhan yang terpisah itu dalam perkembangannya kemudian tidak memperlihatkan adanya batas pemisah sehingga di mata pengunjung asing dikenal sebagai satu kota pelabuhan yang disebut Makassar. Oleh karena itu, penamaan Kerajaan Makassar bukan hanya menunjuk pada Kerajaan Gowa tetapi juga meliputi Kerajaan Tallo. Penamaan itu dikenal setelah dua kerajaan itu membentuk kesatuan wilayah, penduduk dan pemerintahan. Raja Gowa senantiasa mewarisi kedudukan sebagai raja kerajaan kesatuan itu, dan raja Tallo sebagai mangkubumi kerajaan.

Munculnya Makassar sebagai pusat kegiatan niaga awal pengembangannya pada masa pemerintahan raja Gowa ke-9, Karaeng Tumaparisi Kalonna (1510-1546). Tumaparisi Kalonna, memiliki pertalian darah dengan keluarga pedagang. Ibunya, I Rerasi adalah seorang putri dari pedagang Kapur dari utara yang mengunjungi Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-7, Batara Gowa. Dalam hubungan ini, Raja Gowa ke-9 tentu dipengaruhi oleh pihak keluarga ibunya atau juga terdorong oleh jiwa dagang yang diwarisinya secara keturunan dan keadaan kegiatan keluarganya. Oleh karena itu, Raja Gowa ke-9 bergiat untuk mengembangkan kerajaannya sebagai pusat perdagangan terpenting di wilayah ini. Raja inilah yang mengawali pemindahan istana dan pusat pemerintahan ke Benteng Sombaopu yang dibangun di pesisir dekat muara Sungai Jeneberang. Wilayah Sombaopu ini dijadikan bandar niaga kerajaan sehingga dipandang sebagai awal kerajaan ini terlibat dalam dunia niaga. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-9, dikenal adanya jabatan Syahbandar yang bertugas mengatur lalu lintas niaga dan pajak perdagangan di pelabuhan. Dilihat dari perkembangan yang ada bahwa perhatiannya pada dunia niaga tampak jelas dalam kerja dan karyanya.

Sejak perang antara Gowa pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 dengan Tallo yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang merupakan ikrar bersama untuk membentuk satu kesatuan, dengan sumpah yang berbunyi : “barang siapa yang mengadu-dombakan Gowa dan Tallo dia akan dikutuk oleh dewata” (*ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo' iamo nacalla rewata*). Sejak itu dalam kehidupan dua kerajaan itu dikenal ungkapan yang menyatakan “satu rakyat tetap dua raja” (*sereji ata, narua karaeng*). Pernyataan ini menunjukkan kesepakatan diantara mereka untuk membentuk kesatuan, sehingga sering disebut kerajaan kembar Gowa-Tallo atau Kerajaan Makassar.

Kerajaan Makassar kemudian bergiat memperluas kekuasaan dengan memerangi dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sulawesi Selatan seperti Garasi, Katingang, Parigi, Siang, Suppa, Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, dan Selayar. Tindakan penaklukan itu, dengan harapan kerajaan-kerajaan itu akan mengalihkan kegiatan niaga

mereka ke bandar niaga Kerajaan Makassar. Pada dasarnya, kerajaan-kerajaan pesisir yang ditaklukan itu melakukan hubungan niaga dengan Kerajaan Makassar. Namun, mereka tetap bergiat mengembangkan bandar niaga mereka masing-masing. Keadaan itu, dipandang menghambat usaha untuk mengembangkan dan memajukan perniagaan, sehingga ketika Karaeng Tunipalangga Ulaweng (1546-1565), Raja Gowa ke-10 menduduki takhta kerajaan dilakukan lagi penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Siang, Suppa, Sidenreng, Bacukiki, Lamuru, Soppeng, Lamatti, Wajo, Duri, Panaikang, Bulukumba, Bajeng, Lengkesse, Polombangkeng dan beberapa kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone. Raja ini dinyatakan memaksakan kerajaan-kerajaan yang ditaklukan untuk menyatakan ikrar *makkanama nu mammio* (aku bertitah dan kamu taati) dan mengangkut orang dan barang dari negeri taklukan ke bandar niaganya. Kebijakan politik Tunipangga Ulaweng bertujuan untuk memudahkan dan melenyapkan bandar niaga kerajaan-kerajaan lain. Pemerintahan kerajaan ini telah mengembangkan bidang perdagangan dan politik pintu terbuka. Itulah sebabnya pada masa pemerintahan Tunipangga Ulaweng terjadi perubahan besar dalam bidang organisasi politik, ekonomi dan sosial. Tunipangga Ulaweng, menciptakan jabatan *Tumakkajanangngang* (pimpinan urusan perlengkapan dan perang), organisasi kerja, dan memisahkan jabatan *tumailalang* (pati) dan *sahbanara* (syahbandar) serta sejak itu dikenal pemakaian timbangan, mesiu dan batu bata.

Perkembangan itu mendorongnya untuk membangun Benteng Somba Opu dan memasang Meriam pada benteng-benteng itu untuk melindungi dan menjamin keamanan wilayahnya. Politik perluasan kekuasaan dan pintu terbuka ini akhirnya berhasil mewujudkan tujuan untuk menempatkan Makassar sebagai satu-satunya pusat perdagangan di wilayah ini. Pedagang dan pelaut Bugis, Makassar, Selayar, Melayu dan Portugis yang melakukan pelayaran niaga menjadikan Makassar sebagai pelabuhan singgah dan pasar produksi mereka. Makassar tampil sebagai bandar utama dalam hubungan niaga dengan daerah produksi dan bandar niaga lainnya di bagian timur, selatan, barat dan utara.

Sejak Somba Opu menjadi bandar niaga Internasional, bangsa Eropa yang telah menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Gowa yaitu Inggris, Denmark, Portugis, Spanyol, Arab dan Melayu. Bangsa Eropa gemar dengan rempah-rempah, mereka mendirikan kantor perwakilan dagang di Somba Opu. Hubungan dagang Kerajaan Gowa dengan bangsa Eropa terjalin dengan baik dan sekitar tahun 1600-an hubungan dagang dengan bangsa Eropa terganggu setelah kedatangan Belanda yang berupaya melakukan blokade perdagangan rempah-rempah. Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang membuka peluang dan memudahkan terjalin hubungan niaga yang baik dengan penguasa pusat perdagangan lain.

Kehadiran kelompok pedagang lokal maupun asing sejak awal sangat berperan dalam mendorong perkembangan niaga di wilayah ini. Kelompok pedagang lokal maupun asing berperan dalam membangun jaringan perdagangan dengan penguasa dan penduduk di pusat-pusat produksi dan kota dagang-kota dagang lainnya serta menjadi penggerak

dinamika kehidupan pasar (mobilitas pasar) ketika itu. Orang-orang Makassar memiliki keterikatan erat dengan kehidupan laut maupun tradisi laut. Kompleksitas perwujudan kehidupan bahari dapat dilihat dalam bentuk berbagai pranata sosial, karakteristik dan mata pencaharian hidup masyarakatnya.

B. SEJARAH MASA KOLONIAL DAN PENDUDUKAN JEPANG

Pada permulaan abad ke-16, Makassar telah berkedudukan sebagai pusat perniagaan dari pedagang dan pelaut Makassar dan pangkalan bagi persebaran pelayaran niaga. Makassar merupakan pelabuhan transito terpenting dari komoditi rempah-rempah dan kayu cendana, Makassar merupakan daerah yang berlimpahan produksi pangan, bandar niaga Internasional serta pemerintahannya sangat baik dan toleransi yang menunjukkan adanya keharmonisan hubungan antara berbagai pihak dalam kegiatan perdagangan dan kehidupan sosial keagamaan. Kemajuan yang dicapai Kerajaan Makassar ini tidak memberikan kepuasan bagi pedagang-pedagang Belanda. Pihak Belanda tidak menginginkan keberadaan pedagang-pedagang Eropa lainnya dan pemasaran rempah-rempah di Makassar.

Kedudukan politik dan ekonomi Kerajaan Makassar semakin kuat berkat kebijaksanaan yang dilakukan dan perluasan pengaruh hingga ke Kepulauan Maluku merupakan tantangan yang besar bagi pihak Belanda. Keterlibatan pedagang-pedagang dari Makassar dalam perdagangan di Maluku bagi Belanda merupakan perampasan kekayaannya sedangkan Kerajaan Makassar memandang Belanda sebagai pihak yang menentang pengaturan Ilahi dan menghancurkan pendapatannya. Pertentangan dan permusuhan Kerajaan Makassar dengan Belanda (*VOC dipanjangkan*) berlangsung sejak tahun 1615. Peristiwa itu (Perang Makassar) yang terjadi pada Desember 1666 hingga 18 Desember 1667 berakhir dengan keberhasilan Belanda memaksakan lawannya untuk mengakui keunggulannya yang terpatri dalam Perjanjian Bungaya (*Het Bongaais Verdrag*). Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian itu berakibat kehidupan perdagangan menjadi pudar dan lesu. Pihak Kerajaan Makassar masih menunjukkan sikap tidak puas akan hasil perjanjian perdamaian dan pada tahun 1668 timbul perlawanan serta untuk kedua kalinya Kerajaan Makassar dipaksakan mengakui sepenuhnya isi perjanjian dan mensyahkannya kembali pada tanggal 28 Juli 1669 di Binaga Berua.

Oleh karena perjanjian ini merugikan kerajaan, maka selanjutnya timbul perlawanan yang lebih heroik lagi melawan Belanda. Akibat yang ditimbulkan dari peperangan tersebut Benteng Somba Opu jatuh ke tangan Belanda. Setelah hampir 16 tahun melawan penjajah, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatannya sebagai Raja Gowa ke-16 (tahun berapa sampai berapa) dan bersumpah tidak akan kooperatif dengan Belanda. Perjanjian Bungaya tidak hanya menandai kekalahan Kerajaan Makassar dalam Perang Makassar, tetapi juga merupakan awal dari Kompeni menyodorkan kekuasaannya di wilayah pemerintahan Kerajaan Makassar dan awal memudarnya keunggulan kekuasaan Kerajaan Makassar di

Sulawesi Selatan. Cornelis Speelman membendung kegiatan dan keterlibatan Kerajaan Makassar dalam percaturan pelayaran perdagangan maritim di Nusantara. Kebijakan Speelman menghapuskan peran Kerajaan Makassar sebagai pengawas bandar niaga, lokasi kegiatan perdagangan dipersempit dan hanya meliputi negara *Vlaardingen*, Benteng Jung Pandang diganti namanya menjadi *Fort Rotterdam* dan dijadikan markas tentara dan kantor perwakilan VOC.

Dalam perkembangan berikutnya, Makassar dijadikan sebagai pos pengaman terdepan untuk mengawasi jalur pelayaran ke bagian timur dan melindungi monopoli perdagangan VOC di Maluku. Keberhasilan dan kemajuan perdagangan selama berada di bawah pengawasan Kerajaan Makassar menjadi tidak ada lagi (*sirna*). Menjelang pertengahan abad ke-17, Pelabuhan Makassar yang mulanya berfungsi sebagai bandar transito dalam perkembangannya kemudian tumbuh menjadi pangkalan kegiatan maritim dan bandar niaga internasional bahkan sebagai “pasar-internasional”.

Pada permulaan abad ke-19, kedudukan kompeni (VOC) digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Daerah-daerah yang berdasarkan perjanjian dinyatakan berada di bawah kekuasaan kompeni kini beralih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Untuk menata pemerintahan di daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan, maka pada tahun 1824 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pengaturan itu dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) 1824 No. 31 a. Pemerintah Makassar dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Makassar en Onderhoorigheden*) dibagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan yaitu : Makassar meliputi Kota Pelabuhan Makassar, *Fort Rotterdam*, Kota *Vlaardingen* dan kampung-kampung di sekitarnya dan pulau-pulau yang terletak di depan Kota Pelabuhan Makassar.

Pelaksanaan pemerintahan dipundakan pada seorang gubernur sebagai pimpinan pemerintahan Makassar dan daerah bawahan. Gubernur membawahi lima orang residen yang masing-masing ditempatkan pada setiap wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan aturan, setiap residen masih membawahi beberapa kontrolir (*controleur*) yang ditempatkan pada setiap distrik untuk melaksanakan pengawasan kekuasaan dan kegiatan-kegiatan penguasa-penguasa setempat dan bangsawan-bangsawannya. Pengaturan wilayah administrasi pemerintahan diperbaharui setelah dilakukan pemetaan pada tahun 1857. Pemerintahan Makassar dan daerah bawahan ditata tidak menurut aturan yang seragam akan tetapi beragam, juga penempatan pejabat pemerintahan tidak merata. Bagian pemerintahan Makassar dibagi dalam dua cabang pemerintahan (*onderafdeeling*), yaitu Cabang Pemerintahan Makassar dan Tallo. Cabang Pemerintahan Makassar berada langsung di bawah pengawasan asisten residen (*assistent resident*) yang dibantu oleh seorang pejabat hukum (*magistraat*) dalam melaksanakan pemerintahan di bagian pemerintahan Makassar.

Masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 hanya merupakan pengawasan kekuasaan penguasa bumiputra dalam kegiatan pergantian penguasa dan hubungan

kekuasaan antara penguasa-penguasa bumiputra. Pengawasan kekuasaan itu dilakukan terhadap semua kekuasaan bumiputra di daerah itu, baik terhadap daerah-daerah pemerintahan (*gouvernement landen*) yaitu daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan langsung, maupun terhadap kerajaan pinjaman (*leenvoorstendom*) dan kerajaan-kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*).

Masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1906-1942 di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Makassar merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh. Penguasaan wilayah ini dicapai setelah dilancarkan pengiriman pasukan pendudukan (*militaire expeditie*) Sulawesi pada tahun 1905 untuk memaksa penguasa-penguasa di wilayah itu khususnya dan di Sulawesi Selatan pada umumnya untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Pemerintah Hindia Belanda melalui penandatanganan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*). Atas dasar ini, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan diri sebagai penguasa yang sah dan melakukan tugas-tugas pemerintahan serta melakukan kekuasaan langsung terhadap rakyat di wilayah itu.

Masa pertengahan abad ke-20 dapat dikatakan awal dari pemerintahan dan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan yang besar. Kerajaan-kerajaan yang dahulu merupakan kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*) kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini terjadi perubahan politik dalam bidang penataan dan pelaksanaan pemerintahan, penetapan dan penerimaan kebijaksanaan serta pengaruh kelompok lapisan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) diatur secara bertingkat ke bawah bagian pemerintahan (*afdeeling*), cabang pemerintahan (*onderafdeeling*), daerah adat (*adat gemeenschap*) dan kampung (*kampong*). Tingkat bagian pemerintahan dan cabang pemerintahan berada di bawah pimpinan pejabat pemerintah Belanda, dengan urutan pejabat asisten residen (*assistent resident*) dan kontrolir (*controleur*). Tingkat daerah adat dan kampung berada di bawah pejabat pemerintah bumiputra, yang dijabat oleh regen (*regent*) dan kepala kampung (*hoofd*).

Pengalihan kekuasaan ini, mengakibatkan timbulnya perlawanan dan penolakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukannya, pemerintah Hindia Belanda menawan dan mengasingkan pihak yang melakukan perlawanan dan bersikap menentang. Beberapa bangsawan yang diasingkan, Karaeng Mappanyuki diasingkan ke selayar, Karaeng Bontonompo diasingkan ke Sumbawa. Regen Tanralili diasingkan ke Bima (Sumbawa) Sementara terhadap kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama dirangkul dan diperbaiki kedudukannya. Perubahan penataan wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan terjadi lagi pada tahun 1917, dimana wilayah bagian Pemerintahan Makassar dan Bonthain dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu Makassar, Sungguminasa, dan Bonthain.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Makassar antara tahun 1906-1942 terjadi banyak tindakan rakyat baik yang bercorak perampokan maupun tindakan-tindakan yang bersifat kepercayaan. Pada umumnya tindakan-tindakan itu dipandang sebagai gerakan rakyat menentang pemerintah Belanda. Dalam berbagai laporan resmi pemerintah Hindia Belanda disebutkan sebagai pangkal sebab terjadinya gerakan-gerakan rakyat menentang pemerintah disebabkan pemerintah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pemerintah hanya menggantungkan segala kekuatannya pada kekuatan militer dan mata-mata. Kenyataan itu yang berakibat terjadinya ketidakteraturan dan kepastian serta apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan menjadi semu.

Kegiatan sosial politik terutama tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada awal tahun 1900-an, mempengaruhi para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk juga bangkit mendirikan organisasi politik kebangsaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penolakan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1913, berdiri Sarikat Islam di Makassar dipimpin oleh Ince Hasanuddin, dan kemudian berdiri pula Sarikat Islam di Pamboang (Mandar) tahun 1914, tahun 1915 di Majane, tahun 1929 di Tinambung, Polewali, Pampusuang dan tahun 1930 di Palopo. Pada tahun 1920, K.H. Abdullah mendirikan Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, Muhammadiyah dan organisasi di bawah naungannya, Aisyah (kewanitaan) dan Hizbul Wathan (Kepanduan) berdiri pula di Salayar, Palopo, Majene, dan Mandar. Selain itu, di Makassar pun berdiri organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya antara lain Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Parindra), Nadhlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut mengalami perkembangan setelah organisasi lokal juga menggabungkan diri.

Pada masa pemerintahan Gubernur J.L.M. Swaab (1931-1937) terjadi lagi perubahan penataan wilayah pemerintahan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi mulai berkembang organisasi sosial dan politik di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah Hindia Belanda mulai mendekati kelompok-kelompok bangsawan yang telah ditekan dengan menjalin hubungan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah agar para bangsawan tersebut tidak dalam kegiatan organisasi sosial, politik yang mulai berkembang, yang dipandang dapat mengancam kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalin hubungan kerjasama, pemerintah menawarkan pemulihan kedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri.

Pendudukan Jepang di Indonesia dilatarbelakangi ambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi (keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-daerah di Asia sebagai tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. Pendudukan Jepang di Indonesia pada awalnya di Kota Tarakan tanggal 10 Januari 1942, kemudian melebarkan wilayah kekuasaannya hingga Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali kurun waktu Januari-Februari 1942.

Penyerangan pasukan *Kaigun* (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) yang dipimpin Laksamana Takeo Takagi dengan tujuan Makassar dilakukan melalui serangan dari arah selatan dengan jumlah 2.000 tentara terdiri dari 2 brigade (resimen) pasukan. Kapal perang berlabuh sejauh 3 km dari garis pantai, terdiri dari 3 kapal perusak, 15 kapal pengangkut dan 3 kapal penjelajah. Selain itu disiapkan kapal pendarat yang sudah mempersiapkan pasir dalam karung dan papan untuk jembatan guna memudahkan kendaraan dan tank naik ke darat..

Pada masa Jepang dalam menjalankan pemerintahannya dibagi dalam 3 (tiga) wilayah. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara termasuk wilayah III dengan pusat komando pertahanan di Makassar. Jepang dalam menjalankan pemerintahan sebagian besar struktur pemerintahan Hindia Belanda tetap dilanjutkan. Kabupaten maupun kotapraja-kotapraja berjalan terus, semua kekuasaan dijalankan oleh *kentyo* (bupati) dan *sico* (walikota). Pasukan Kaigun membangun lapangan terbang pesawat tempur bersama penduduk setempat di Panyangkalang, Limbung, Gowa serta beberapa bunker (pertahanan militer dalam tanah) menghadap ke barat sebagai perlindungan serangan udara tentara sekutu dari arah selat Makassar.

Untuk pertama kalinya tanggal 23 Juni 1943, pasukan Angkatan Udara Sekutu kelima dan 17 pesawat pembom Jenis B-24 menyerang dan membom Angkatan Laut Dai Nippon di Pelabuhan Makassar dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Jepang. Selain itu beberapa perkampungan, pabrik dan Benteng Ujungpandang serta sepanjang pantai Kota Makassar diserang Sekutu, yang mengakibatkan banyak tentara Jepang luka-luka dan meninggal dunia termasuk penduduk yang sedang bekerja di pelabuhan. Selanjutnya, sejak saat itu sebanyak 21 kali misi serangan dilancarkan oleh sekutu dengan sasaran utama, pelabuhan Makassar, galangan kapal, pabrik, perumahan dan barak (asrama) tentara Jepang, gudang persenjataan, Benteng Rotterdam, dan selat Makassar. Saat pendudukan Jepang di Makassar, pada tanggal 8 Februari 1942, tidak ada pemerintahan kota.

Penduduk Makassar mayoritas mengungsi ke luar kota ke daerah Sungguminasa yang jaraknya 15 KM dari pusat kota. Diantara para pengungsi itu terdapat para tokoh perintis kemerdekaan yang telah diasingkan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Diantara tokoh tersebut, diantaranya Manai Sofjan, Iwa Kusuma Sumantri serta Najamuddin Daeng Malewa seorang tokoh berpengaruh di Makassar. Pemerintah tentara Jepang di Makassar, meminta tokoh-tokoh tersebut untuk membangun kembali pemerintahan kota. Najamuddin Daeng Malewa dan Yusuf Samah terpilih sebagai walikota dan wakil walikota Makassar zaman pendudukan Jepang.

Dalam melancarkan lalulintas perekonomian, Komandan Angkatan Laut Jepang di Makassar "Shireikan" mendirikan suatu perusahaan Angkatan Laut yang dinamakan "Minsen Unkokai" berkedudukan di Makassar. Usaha ini untuk menghimpun perahu-

perahu Bugis/Makassar. Para pemilik perahu hanya menerima sewa peahunya, sedangkan segala muatan dan perlengkapan selama berlayar disediakan oleh Minsen Unkokai.

Sekolah-sekolah di Makassar dalam masa pendudukan Jepang, menerapkan sistem pendidikan Jepang. Jenis-jenis sekolah di Makassar pada saat itu, terdiri dari Futsu Kogakko (Sekolah Dasar Tiga Tahun), Futsu Jokyu Kogakko (Sekolah Dasar Enam Tahun), Jokyu Kogakko (Sekolah Dasar Sambungan Tiga Tahun), Sihon Gakko (Sekolah Guru Menengah), Tokubetsu Cugakko (Sekolah Menengah Istimewa yang hanya menerima anak-anak bangsawan serta Cugakko (Mulo/SMP) dan Kota Gakko (HBS/SMA). Selain itu, pemerintah Kaigun di Makassar mendirikan Sen In Kunrensyo (Sekolah Latihan Pelayaran) untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang dapat membantu Kaigun.

Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak dan beberapa pusat pertahanan di Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. Kota Makassar di akhir Perang pasifik sudah parah kondisinya karena serangan sekutu sehingga awal tahun 1945 Angkatan Laut Jepang memindahkan sejumlah besar persenjataan dan amunisinya dengan truk ke Malino dan membangun benteng pertahanan termasuk rumah sakit untuk menghindari serangan dari laut.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jakarta dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang anggotanya terdiri dari 27 orang termasuk tambahan 6 orang. Wakil-wakil dari Sulawesi yang duduk sebagai anggota PPKI adalah Andi Mappanyuki, DR.G.S.S.J Ratulangi dan Andi Pangerang Pettarani. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan berakhir masa pendudukan Jepang di Indonesia sehingga tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Penjajahan Jepang dalam waktu tiga tahun memberikan dampak diantaranya semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat diantaranya perampasan kekayaan rakyat, produksi pertanian menurun dan sandang pangan sulit didapatkan. Kesejahteraan rakyat berangsur-angsur mulai membaik setelah kemerdekaan dan pulihnya keamanan daerah ini dari gangguan serta ancaman sisa-sisa kolonialisme.

C. SEJARAH MASA KEMERDEKAAN

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Makassar pada tanggal 23 September 1945. Tanggal 24 September 1945, rakyat di kota Makassar secara serentak menaikkan bendera Merah Putih dan menjadikan Makassar jadi Kota Merah Putih. Sejak saat itu, insiden kekerasan pertempuran bersenjata dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Makassar terus berlanjut menjadi peristiwa Palagan Makassar (28 Oktober 1945). Peristiwa Palagan Makassar sebagai perjuangan perlawanan terhadap penjajahan asing dari kawasan timur Indonesia yang berkorban khusus sebagai salah satu "Tiang Penggerak" NKRI. Begitupun peristiwa Korban 40.000 jiwa di Makassar akibat kekejaman Westerling menjelang berlangsungnya Konferensi Malino di Malino 14 Desember 1946 merupakan sikap

heroik dan patriotisme rakyat Makassar dalam mempertahankan kemerdekaan sehingga mendapatkan perlawanan tragis dari sekutu. LAPRIS (Lasykar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan taktik ekspedisi lokalnya telah mempanikan pertahanan musuh penjajahan Belanda dan sekutu-sekutunya di empat *afdeeling* (Bonthain, Makassar, Pare-pare dan Mandar).

Di era Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 serta Negara Indonesia Timur yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 1946, Kota Makassar merupakan *gemeente Makassar*. Pada bulan Mei 1950, *gemeente Makassar* dilebur menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Kota Makassar menjadi DT II Kotapradja Makassar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 merubah Kotapraja Makassar menjadi DT II Kotamadya Makassar dengan wilayah administratif 8 kecamatan serta jumlah penduduk 450.000 jiwa.

Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Ujung Pandang merupakan nama baru yang dikenakan untuk menggantikan nama sebelumnya setelah terjadi perluasan wilayahnya dengan menambah sebagian wilayah dari Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tahun 1978. Kotamadya Ujung Pandang itu merupakan perluasan dari bekas Kotamadya Makassar, perluasan wilayah ini merupakan salah satu sebab nama kota itu diganti menjadi Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1976. Pengambilan nama Ujung Pandang berlandaskan pada anggapan bahwa pusat kota itu adalah wilayah sekitar Benteng Ujung Pandang dan kebanyakan penduduk di luar kota itu senantiasa menyebut kota itu Jung Pandang atau Ujung Pandang.

Pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah luas wilayah pun bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha menjadi 175.77 km.

Makassar merupakan kota yang multi etnis, penduduk Makassar kebanyakan berasal dari Suku Makassar dan Suku Bugis. Sisanya berasal dari Suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi Selatan, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Wilayah Kota Makassar berada pada koordinat 119 derajat BT dan 5,8 derajat LS dengan ketinggian bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat. Kota Makassar diapit dua muara sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.

Makassar yang dikenal dengan kota Anging Mamiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa serta di bagian barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Topografi wilayah Kota Makassar merupakan dataran rendah dan daerah pantai. Selain

terdiri dari wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar.

Di era reformasi ini, Kota Makassar meliputi 15 kecamatan dan 153 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 1.398.804 jiwa. Ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Saat ini Kota Makassar dipimpin oleh Walikota terpilih, Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto serta Wakil Walikota, Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M.Si. Walikota ke-27 ini visinya mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia dengan Semboyan Kota Makassar, *Sekali Layar Berkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai*.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia-Sulawesi Selatan*. Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Encyclopedie van Nederlandsch Indie. Leiden : EJ Brill, 1918.

Kahin, A.R., *Pergerakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Mattulada. 1990. *Menyusun Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin.

M.D. Sagimun. 1975. *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Paeni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Gowa : Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Pangerang, Rimba Alam A. t.t. *Merajut Sistim Pemerintahan di Sulawesi Selatan : Masa Lalu Sebuah Catatan Rimba Alam Pangerang*. Makassar : Ainun Bersaudara.

Patunru, Abdul Razak Daeng. 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX : Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

_____. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta : Ombak.

Resink, G.J. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987.

Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.

<http://www.makassarkota.go.id>

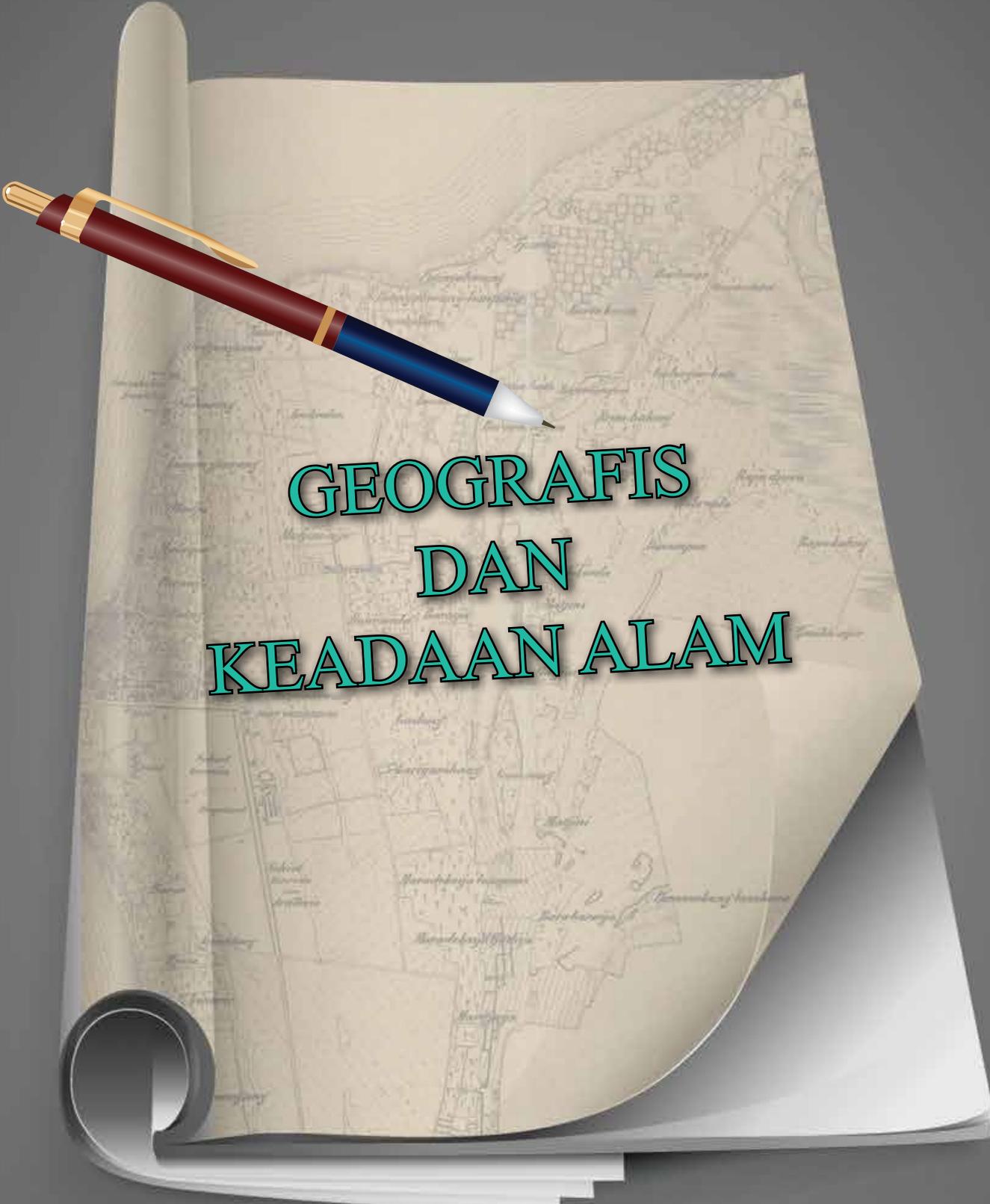
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar



**CITRA KOTA MAKASSAR
DALAM ARSIP**





A rolled-up map on a scroll, with a pen resting on it. The map is a detailed historical or geographical drawing showing a city or region with various buildings, streets, and landmarks. The pen is a dark red and blue fountain pen with gold accents. The scroll is unrolled on the right side, showing the map's details. The background is a dark grey gradient.

GEOGRAFIS DAN KEADAAN ALAM

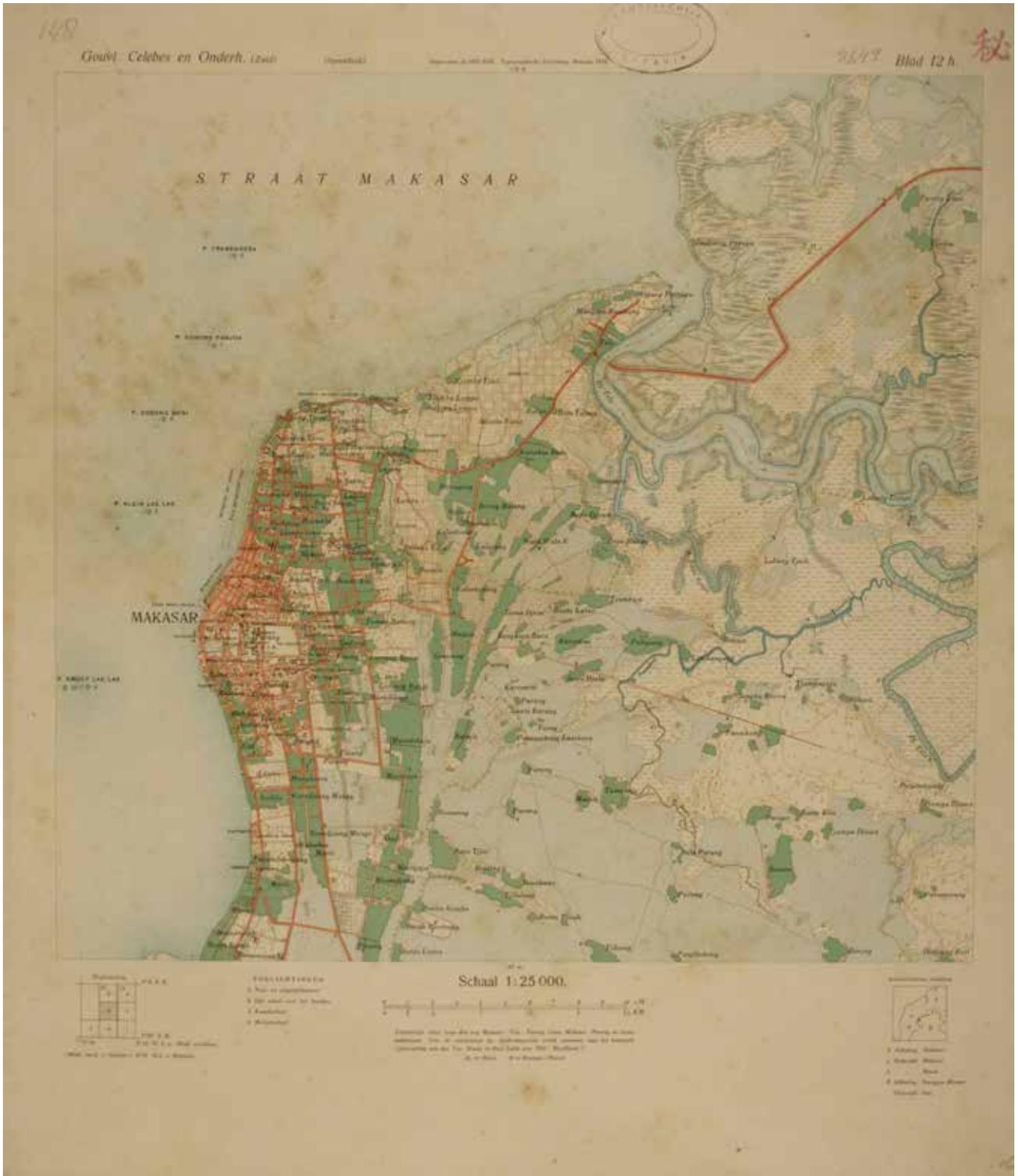
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi Selatan, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Kota Makassar diapit dua muara sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Makassar yang dikenal dengan kota Anging Mamiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa serta di bagian barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.



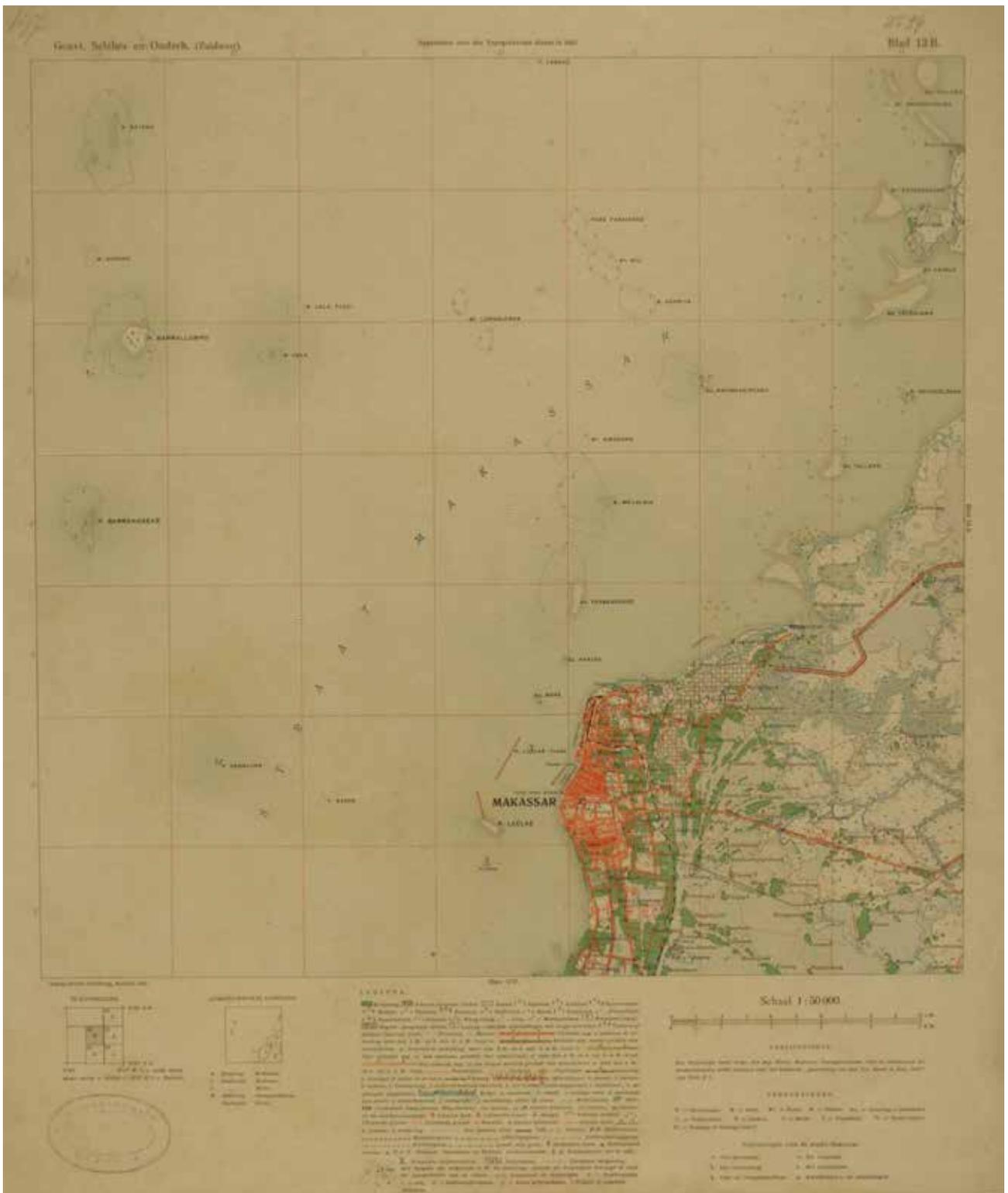
Peta Kota Makassar dan sekitarnya, [1910]

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. C. 79



Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1922.

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148



Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan, 1924
 Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147



Perkampungan yang asri di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT No. 832/29



Bagian kota yang dibombardir sekutu ketika pendudukan Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, 1945.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 342/40



Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan 12 Agustus 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 2-2



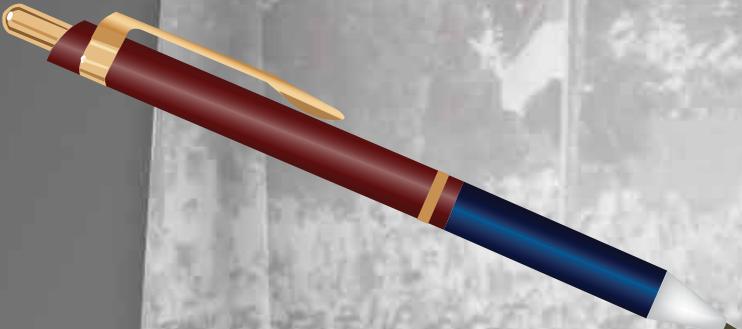
Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan 5 Oktober 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 4-2



Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1968.

Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 23



**POLITIK
DAN
PEMERINTAHAN**

Kemasyhuran Kota Makassar tidak lepas dari politik Kerajaan Gowa yang menempatkan Makassar sebagai pusat perdagangan. Pada permulaan abad ke-16, Makassar telah berkedudukan sebagai pusat perniagaan dan pangkalan bagi persebaran pelayaran niaga. Perjanjian Bungaya tidak hanya menandai kekalahan Kerajaan Makassar dalam Perang Makassar, tetapi juga merupakan awal dari kompeni menyodorkan kekuasaannya di wilayah pemerintahan Kerajaan Makassar dan awal memudarnya keunggulan kekuasaan Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan.

Keramaian bandar Makassar mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17, adapun masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 merupakan pengawasan kekuasaan penguasa bumiputra dalam kegiatan pergantian penguasa dan hubungan kekuasaan antara penguasa-penguasa bumiputra. Masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1906-1942 di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Makassar merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh.

361.

Wij den Ouden Koning van
Goa, op den 6 April des jaars 1696.
desen wraecd aflivig geworden is, wat
doon de aankomende Tijgrooten, na
lands gebruik, voor de Beguavinge, tot
Dijn loyden Successien genomincend,
Deskelc Nere of Zulten Zoon
Aroepalaha, welke naderland,
Bij de Leven Dier Deenen des Tijg,
niet name van alle, in D. waandig.
Eind als Koning van Goa is
geconfimicend, en bevelige, geen
vervolgend op een Latienke reizze,
gecommincend noerend aan de
Gouverneur en den Raad tot
Ondjongs Pandang in Casteel
Zottendam, als mijn name van
de,

Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda, 1667.

Sumber: ANRI, Makassar No. 273.a

Inhoud.

Opgevan der stukken, documenten en brieven bij
het zamenstellen dezer Nota gekoepd bl. 1.
Friedelike opmerking over het gebruik der ge-
noemde stukken 9.

Eerste Deel

Sydeukkundig overzicht der Geschiedenis van des
Kon. Celebesche volken tot op de verovering van Makassar
door den Admiraal Speelman in 1667 en 1669 bl. 11

Het rijk van Goak of Makassar (Kangasae) 12.

Het rijk van Telle 29

Het rijk Sandjaberi 31

Het rijk van Boni 32

Het rijk van Sojuna 31

Het rijk van Souwa / Soada 33

Het rijk van Souwa / Soada 33

Het collectieve rijk van Sandjaberi 34

Het collectieve rijk Kapeli 37

Het collectieve rijk Sojuna in het koninkrijk
Makassar. Poela 35

Het collectieve rijk Adja Tamparung in de oorspronkelijke
Kraan-districten 39

Het rijk van Tanetti of Adja Konink 44

De Konink Pommer of Konink 60

De landschappen Galiang Potingbangrang in de
eilanden langs de S. W. kust van Celebes 62

Het rijk van Tanetti 63

De rijken Pontava, Pontakombal, Pina ind. 64

Het rijk Torongun of Pontakombal / de Telle lamp. 65

Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar, [1669].

Sumber: ANRI, Makassar No. 294

No. 1

129

Spaarte notulen ter order
van Syn Hoog Edelhejd de
Wel Edite Heer Gouverneur
Generaal Mr. Willim van
Oultlooren ende de Indische
Raaden van Nederlandts India
byeen gebracht don den Gouverneur
Cornelis Beernick. &
om by Syn verhech van anac.
Cassar opgegeven te werden aan
Dijn Grauer D'BB Heer
Gouverneur Willern de Roo.
ten bynde Syn BB. in sij naa syde
gelijck hejd des te Raade verduide
van soude Koninc bedienen

L. T. Aglbare Heer. —

Naw Lang draender de Raadaan den wick
Klaud, daar ik, beginnigend goeds
vurp.

Memorie van Overgave (Memori Serah Terima Jabatan) Residen
Makassar antara Cornelis Beernick dan Willem de Roo, 14 Juni 1703.

Sumber: ANRI, Makassar No. 157

Politiek Verslag
van het Gouvernement Celebes
en Onderhoorigheden van het jaar
1856.

Bestelijk en Zuid-
lijk deel

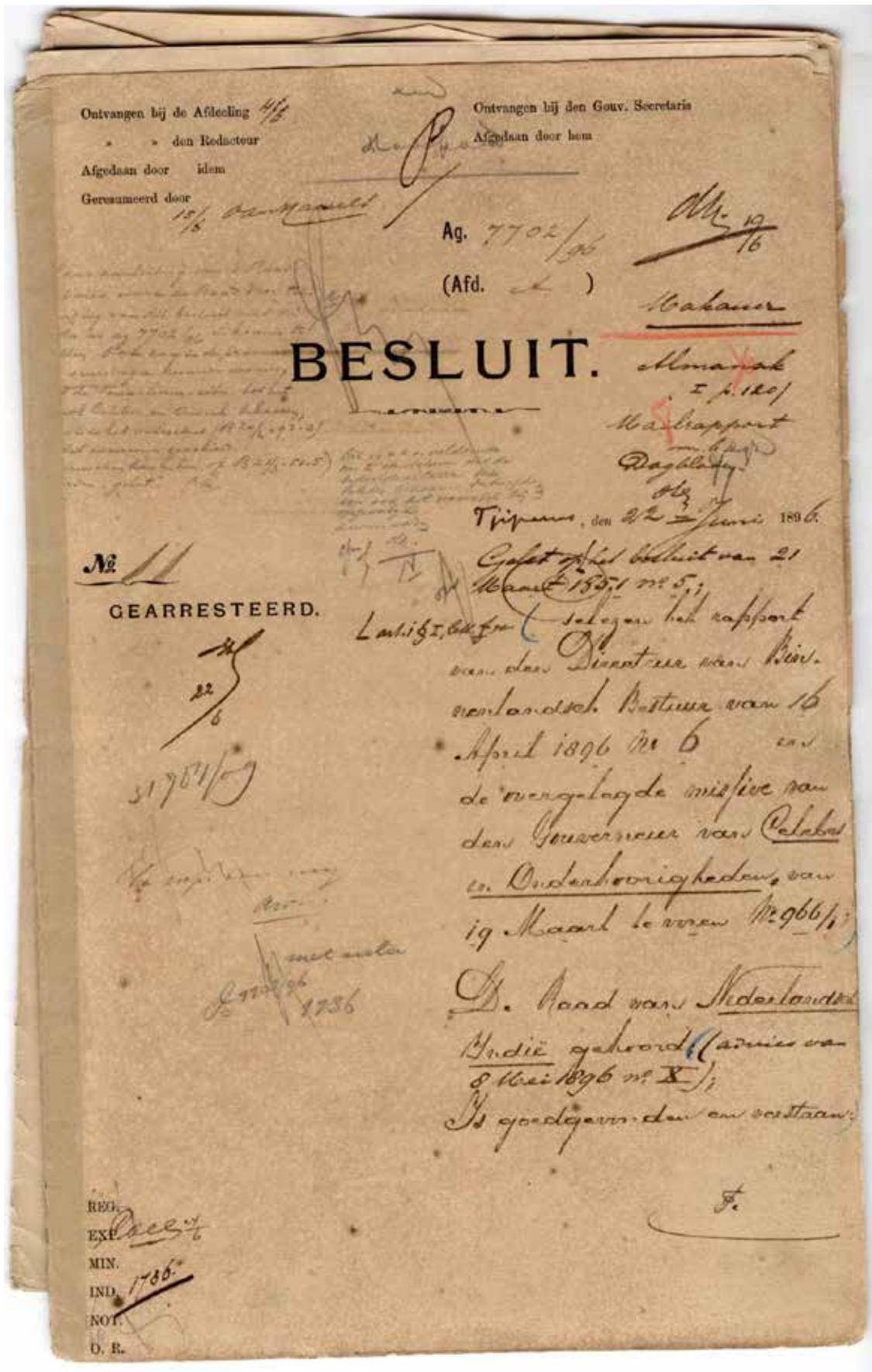
- A. Landen onder direct
Nederlandsch beheur.
1. Steen van bestuur.

Het voornaamste maat
regelen het jaar 1856 in dit
rubriek kon aangehouden
worden, is de inlijving van
het landverstand Delle
in het Gouvernements ge-
bied, en de organisatie van
deszelfs bestuur.

De geweren Levy
Serat van Delle La
Malaka Dangi Parani
had bij kontrakt aangino-
men een grooten bijdrag doen
zijn rijk te maken en

Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi
(Celebes) dan Daerah Kekuasaannya, 1856.

Sumber: ANRI, Makassar 1.2



Ontvangen bij de Afdeling ^{4/12}
den Redacteur
Afgedaan door idem
Gevanneerd door ^{15/6}

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
Afgedaan door hem

Ag. 7702/96
(Afd.)
Me 19/16
Makassar

BESLUIT.

Almanak
I p. 120/
Wapport
Dagbladen

Tripurus, den 22 Juni 1896.

N^o 11
GEARRESTEERD.

Handwritten notes and signatures on the left side of the document, including a large signature and the number '22'.

Gelet op het besluit van 21
Maart 1896 n^o 5;
Lid 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100;
van den Directeur van Nid.
Nederlandisch Posten van 16
April 1896 n^o 6 en
de overgelegde missive van
den Gouverneur van Calabar
en Onderhoorigheden, van
19 Maart 1896 n^o 966/1;
De Raad van Niederlandsch
Indie gehoord (advies van
8 Mei 1896 n^o 8);
Is goedgekeurd en vastgesteld.

REG.
EXP. ^{Paccy}
MIN.
IND. ¹⁷⁸⁶
NOT.
O. R.

Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima yang merupakan bagian dari wilayah Tallo, Sulawesi Selatan.
Sumber: ANRI, Besluit 22 Juni 1896 No. 11



Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/12



Istana residen Indonesia Timur dilihat dari depan dan samping,
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/54





Duta Besar Cina Hi Ti Chung mengunjungi Walikota Cina di Makassar dengan Membawa Bunga, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/28



Duta Besar Cina Hi Ti Chung dengan beberapa staff mengunjungi Walikota Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/62

=TP=
KEMENTERIAN URUSAN DALAM NEGERI
NEGARA INDONESIA-TIMUR.-
=0000=

AUTIPAN dari Daftar beslit2 Menteri
Urusan Dalam Negeri Negara
Indonesia-Timur.-

No. U.P.U.1/105.-

MAKASSAR, 19 Djanuari 1950.-

MENTERI URUSAN DALAM NEGERI-NEGARA
INDONESIA-TIMUR.-

Telah membuat surat Paduka Jang Mulia Perdana Menteri
Negara Indonesia-Timur (Bahagian Keresidenan Negara Tanah)
tertanggal 9 Desember 1949 No. 9/14/D;

Menimbang, bahwa berhubung dengan terbentuknja Hadat
Pulau2 Makassar, maka perialih diadakan perubahan dalam pembaha-
gian tata-usaha dari Afdeling Makassar;

Telah memperhatikan beslit dari Gubernur Timur Besar
tertanggal 24 Februari 1949 No. 21 (Bijblad pada Staatsblad
Hindia Belanda No. 14377) yang terakhir diubah dengan beslit
kami tanggal 7 Mei 1949 No. B.Z. 1/8/21;

Telah memperhatikan lebih djauh beslit kami tertanggal
12 November 1947 No. B.Z. 1/9/12.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa pembahagian tata-usaha dari Afdeling
Makassar dari bekas Keresidenan Selebes-Selatan seperti jang
telah ditetapkan pada ayat bahagian AI, 1 dan 5 dari beslit Guber-
nur Timur Besar tersebut diatas, diubah sebagai berikut:

1. Makassar (ibu kota Makassar), terdiri dari distrik2:
 - a. Makassar
 - b. Wadje
 - c. Ujung-Tana (dengan Tallo) dan
 - d. Mariso.
2. Pulau2 Makassar (ibu kota Makassar), meliputi:
 - a. Pulau2 Semporaonde
 - b. Pulau2 Kalu2kuang-Masulina
 - c. Pulau2 Pastiljen dan Sempnoster
3. Maros (ibu kota Maros).
4. Pangkadjene (ibu kota Pangkadjene)
5. Gowa (ibu kota Sungguminasa)
6. Takalar (ibu kota Takalar) dan
7. Djenebonto (ibu kota Djenebonto).

Salinan beslit ini akan dikirimkan kepada:

1. Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia-Serikat di
Djakarta,
2. Paduka Jang Mulia Presiden Negara Indonesia-Timur di Makassar,
3. Paduka Jang Utama/Padan Senat Negara Indonesia-Timur di Makassar
4. Paduka Jang Utama Ketua Badan Perwakilan Negara Indonesia-
Timur di Makassar,

/Ketua

KABINET PRESIDEN
AGENDA No. 44/2 Pul. 10
TGL. TERIMA : 6.10.1950
BUNDEL : - 183 - 8

SIMPAN

TGL. 6.10.1950
BUNDEL: 183

Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai perubahan pembagian tata usaha dari afdeling Makassar dari bekas Keresidenan Selebes Selatan, 19 Januari 1950.

Sumber: ANRI, RIS No. 164



Presiden Soekarno berfoto bersama masyarakat India di Makassar, 1 Agustus 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 23



Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika tiba di Bandara Hassanudin Makassar dalam rangka kunjungannya ke Makassar, 24 Februari 1951.

Sumber: ANRI, Kempen No. 5647



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 56 TAHUN 1951
TENTANG

PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN,
PERSIAPAN PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAN PEMBAGIAN WILAJAHNJA DALAM LINGKUNGAN
DAERAH OTONOM PROPINSI SULAWESI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan politiek dan ketatanegaraan dalam Daerah Sulawesi-Selatan, ternjata penjelenggaraan pemerintahan dan susunan alat-alat pemerintahan seperti sekarang dalam Daerah tersebut pada waktu ini tidak memuaskan;
 - b. bahwa djika keadaan-keadaan itu tidak segera diperbaiki, hal itu akan merugikan Daerah itu dan Negara;
 - c. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan dalam mengurus dan mengatur kepentingan Daerah itu, ternjata tidak mengadakan tindakan-tindakan jang perlu untuk mengatasi dan menghindarkan kesulitan-kesulitan seperti dimaksud sub a;
 - d. bahwa rakjat Daerah Sulawesi-Selatan berulang-ulang telah menjatakan tidak menjukai lagi adanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan, berhubung dengan keinginannja supaja Daerah itu selekas-mungkin dibubarkan dan wilajahnja dibahagi dalam beberapa daerah otonoom lain, hal mana pada azasnja disetudjui oleh Pemerintah;
 - e. bahwa berhubung dengan keadaan didaerah tersebut dan hasrat Pemerintah untuk segera menjusun pemerintahan Daerah-Daerah jang sesuai dengan keinginan rakjat, Pemerintah menganggap perlu mengadakan tindakan-tindakan dan peraturan seperti tersebut dibawah ini.

Mengingat

Bagian awal Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi, 6 September 1951.

Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88



Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen No. K 511111 RR 18





Kunjungan Kerja Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kunjungannya antara lain melihat harta benda negara dari Raja Goa di Makassar, 2 Juli 1952.

Sumber: ANRI, Kempen No. 520702 RR 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 34 TAHUN 1952

tentang

PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN
PEMBAGIAN WILAJAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH
SWATANTRA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan alat-alat dan penjelenggara pemerintahan, sambil menunggu adanya suatu peraturan mengenai Daerah-Daerah swatantra (otonom) yang uniform bagi seluruh Indonesia, perlu segera membubarkan Daerah Sulawesi Selatan dan membagi wilayahnya dalam Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam Sub a, Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1951, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1951 No. Des. 1/14/4 perlu ditjabut/dibatalkan;
- Mengingat : a. pasal-pasal 98 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1950;
- Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952;

MEMUTUSKAN :

- I. Membatalkan : a. Peraturan pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan atau "Daerah Sulawesi Selatan" tanggal 18 Oktober 1948, yang telah disahkan dengan Penetapan Resid Sulawesi Selatan tanggal 12 Nopember tahun 1948;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1951 No. Des. 1/14/4;
- II. Menarik kembali Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1951;
- III. Menetapkan : Peraturan tentang pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam Daerah-Daerah swatantra.

BAB I. DAERAH DAN TEMPAT KEDUDUKAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

Pasal 1.

Wilayah Daerah Sulawesi Selatan dibagi dalam tujuh "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, yaitu:

I.

Bagian awal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra, 12 Agustus 1952.

Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138

Kata pengantar Kepala DaErah Makassar pada upatjara
pengresmian pemindahan ibukota DaErah Swatantera
Makassar ke Sungguminasa.-

J.M. Perdana Menteri, para Menteri, Bapa' Gubernur hadi-
rin jang terhormat,

Sjukur Alhamdulillah, saja utjapkan, karena pada
saat ini, kita dapat berkumpul ditempat ini, untuk ber-
sama-sama menghadiri pengresmian pemindahan Ibu kota DaE-
rah Swatantra Makassar ke Sungguminasa ini, jang sedjak
sekian lamanja berhubung den gan beberapa hal terpaksa
masih menumpang dalam wilajah daErah Otonoom Kota Besar
Makassar.

Peristiwa ini sungguh mengandung arti jang besar ba-
gai rakat dalam daErah ini chususnja, bukan sahadja kare-
na selain dari pada bertepatan dengan peringatan Pahlawan
Hasanuddin jang kita telah peringati bersama beberapa saat
jang lampau, akan tetapi djuga karena hal ini memberikan
kenjataan, bahwa DaErah Swatantra Makassar, jang dibentuk
atas dasar P.P. 34/1952 sedjak 1 Djanuari 1953, telah
mempunyai Ibu kota tersendiri.

Dengan pemindahan ibu kota ini, sedjarah akan mengu-
langi riwayatnja, dimana kita diingatkan kepada zaman jang
lampau, dimasa keradjaan Gowa mengalami masa keemasannja
jang gilang-gemilang, suatu keradjaan jang djaja, jang
ra'jatnja mendapat djulukan "De haantjes van het Oosten".

Harapan kami ialah, semoga dengan pindahnja e ibu
kota ke Sungguminasa ini, daErah ini akan mengalami pula
zaman keemasan, suatu zaman jang djaja, dalam rangka In-
donesia-Raya, jang adil dan ma'mur.

Hadirin jang terhormat,

Dibalik dari pada ini terpaksa saja menjatakan
penjesalan saja, oleh karena pada saat jang bersedjarah
ini, pengresmian pembukaan balai Pemerintah DaErah Swa-
tantra Makassar, belum dapat dilangsungkan.

Sedjak dari bulan Pemerintah
telah berusaha, dengan segala daja upaja serta kemauan

jang

Formul 100513

Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara peresmian pemindahan ibukota daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa, Januari 1953.

Sumber : ANRI, Muhammad Yamin No. 329

5.

P I D A T O Kepala DaErah Makassar pada upatjara
peringatan „SULTAN HASANUDDIN“, tang-
gal 12 Djuni 1954.-

Bapa' Perdana Menteri, Para Menteri jang kami muliakan,
para hadirin jang terhormat,

Izinkanlah kami pertama2 menjampaikan rasa sjukur kami
kehadirat Allah Subehanahu Wataala, jang telah melimpahkan
rachmat dan taufiknja kepada kita sekalian, sehingga pada
saat ini, pada hari bersedjarah ini, kita dapat berkumpul
ditempat ini untuk turut menghadiri, meramaikan serta me-
muliakan hari jang dikandung oleh sedjarah, sebagai ternja-
ta pada saat ini. Kampun ta' lupa menjampaikan rasa terima
kasih kami kehadapan J.M. Perdana Menteri serta para Mente-
ri, jang telah mentjurahkan perhatiannja kepada upatjara
peringatan ini, jang dengan setjara kebetulan berlangsung
didaErah kami, hal mana adalah merupakan suatu kehormatan
dan kebanggaan bagai kami berserta dengan seluruh ra'jat
Kabupaten Makassar. Kehadiran Bapa' Perdana Menteri jang
kami muliakan, beserta para Menteri pada upatjara ini, sung-
guh ta' dapat disangkal merupakan suatu dorongan semangat
keprtjajaan ra'jat terhadap Pemerintahnja, jang sekian lama
dalam daErah ini dianggapnja selalu didjauhi, belum diberika-
n perhatian sewadjarnja. Kini dengan terang, laksana ma-
tahari, ra'jat telah dapat menjaksikan akan perhatian Bapa2
jang kami muliakan, jang mana hal ini disambut dengan rasa
kesjukuran oleh ra'jat Kabupaten Makassar chusussenja dan Su-
lawesi pada umumnja.

Hadirin jang terhormat,

Djika pada saat ini, kita berkumpul ditempat ini, maka
adalah maksud pertemuan ini ta' lain dan ta' bukan untuk
memperingati arwah almarhum Sultan Hasamuddin, seorang Pahlawan
jang dikagumi, baik di Timur, maupun di Barat. Masih
terdengung ditelinga akan gelaran jang diperoleh beliau
dari bangsa Barat, „ De haantjes van het Oosten “, sebagai
akibat dari tiap2 perlawanan jang telah diadakan oleh be-
liu dalam memnentang tiap2 bentuk pendjadjahan jang dida-
tangkan oleh Bangsa Barat. Masih teringat oleh kita akan

kepahlawanan

Fessal 10853

Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara Peringatan Pahlawan
Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1954.

Sumber: ANRI, Muhammad Yamin No. 329a



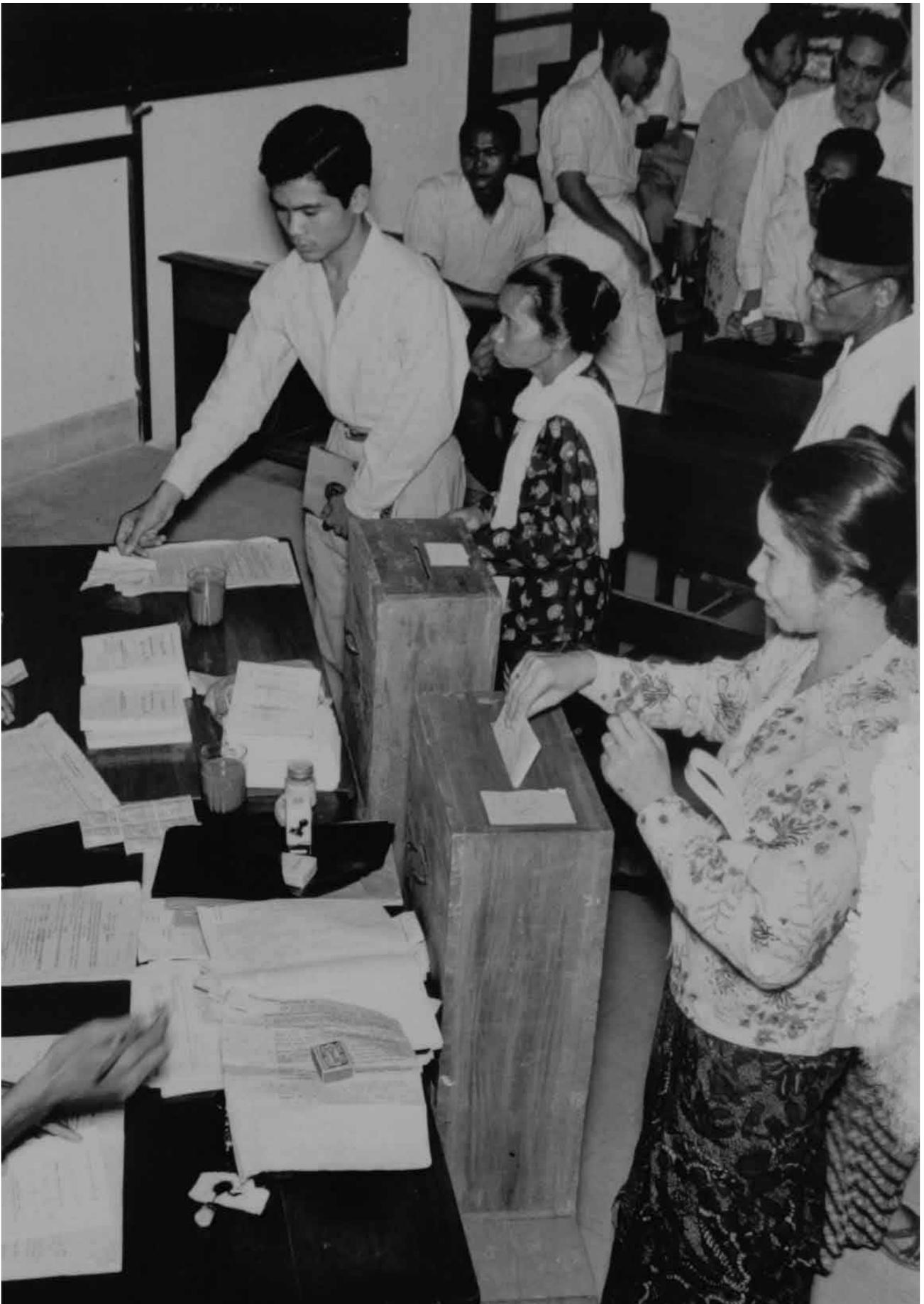
Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara Mandai Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Juli 1954.

Sumber: ANRI, Kempen No. 540715 RR 6



Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 22 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M 10534



Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar, 29 September 1955.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 11856



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1957

TENTANG

PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH
GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH DJENEPONTO-TAKALAR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengenai Gowa yang wilayahnya adalah termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Makassar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1952 (Lembaran Negara No.48 tahun 1952) jo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1953 (Lembaran Negara No.2 tahun 1953) Pemerintah Daerah Makassar tidak dapat menjalankan pemerintahannya setjara efektif disebabkan pertentangan-pertentangan politik yang menghebat yang menghendaki agar Gowa tersebut selengkap-lengkapnya dikeluarkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Makassar dan dibentuk menjadi Daerah otonom tersendiri;
 - b. bahwa untuk dapat mengatasi pertentangan-pertentangan politik itu demi mengingat kepentingan rakyat serta untuk segera melentarkan jalannya pemerintahan di daerah, satu sama lain bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan, dipandang perlu sambil menanti berlakunya Undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, membubarkan Daerah Makassar dan membentuk Gowa, Maree-Pangkadjane dan Djeneponto-Takalar masing-masing sebagai "Daerah" dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;
 - c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan ketiga daerah-daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;

- Mengingat :
- a. Pasal-pasal 96, 131 jo. 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
 - b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-51 tanggal 2 Djanuari 1957.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
- Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Djeneponto-Takalar.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Swapradja Gowa yang meliputi Onderafdeling ad 1 dibawah ini dan

Onderafdeling

Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Goa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar, 16 Januari 1957.

Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No. 137



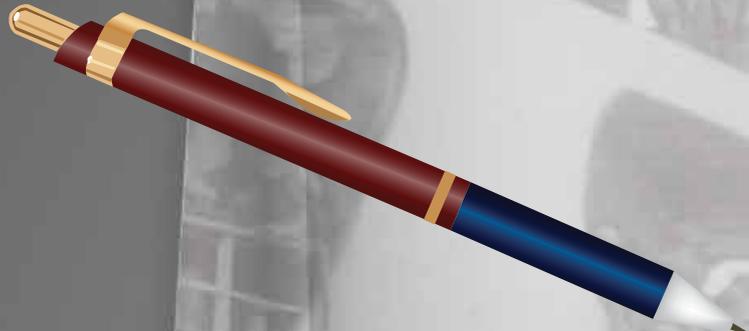
Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Januari 1958.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 14451



Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa “Pembebasan Irian Barat” di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.

Sumber: ANRI, Kempen M 16589/1



PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Sejak masa kerajaan, nasionalisme, patriotisme dan heroisme telah ditunjukkan oleh orang-orang Makassar dalam menentang kolonialisme. Sikap patriotisme dan ksatria dari Sultan Hasanuddin dimana setelah hampir 16 tahun melawan penjajah, meletakkan jabatannya sebagai Raja Gowa ke-16 dan bersumpah tidak akan kooperatif dengan Belanda. Begitupun dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI, terjadi beberapa peristiwa di Makassar, diantaranya peristiwa Palagan Makassar sebagai perjuangan perlawanan terhadap penjajahan asing dari kawasan timur Indonesia yang berkorban khusus sebagai salah satu "Tiang Penggerak" NKRI. LAPRIS (Lasykar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi) yang dibentuk Robert Wolter Monginsidi dan Ranggong Daeng Romo dan lainnya dengan taktik ekspedisi lokalnya telah mempanikkan pertahanan musuh penjajahan Belanda dan sekutu-sekutunya.



Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 87/K/1973.

Sumber: ANRI, R 530312 FG 1-1

yang terhormat
 Tuan Wedana.

Saya Sismadi Stb no 902. kamp A. mencerit perem-
 tahnya kawan Dokter saya moesti di Operatic ke
 Makassar lewat kapal ini.

Saya mochoen keterangan, hari kapan saya
 moesti berangkat.

Menunggu perintah
 12/6/29 Van der
 Wedana W. antromog & Hartmatija
 met vergele om Hooyand
 naar Ambon verdu 12/6 29.
 Macassar voor een
 Operatic Si

Sismadi

Surat dari Sismadi kepada Wedana Tanah Merah tentang operasi penangkapan ke Makassar, 12 Juni 1929.

Sumber: ANRI, Boven Digoel No. 259



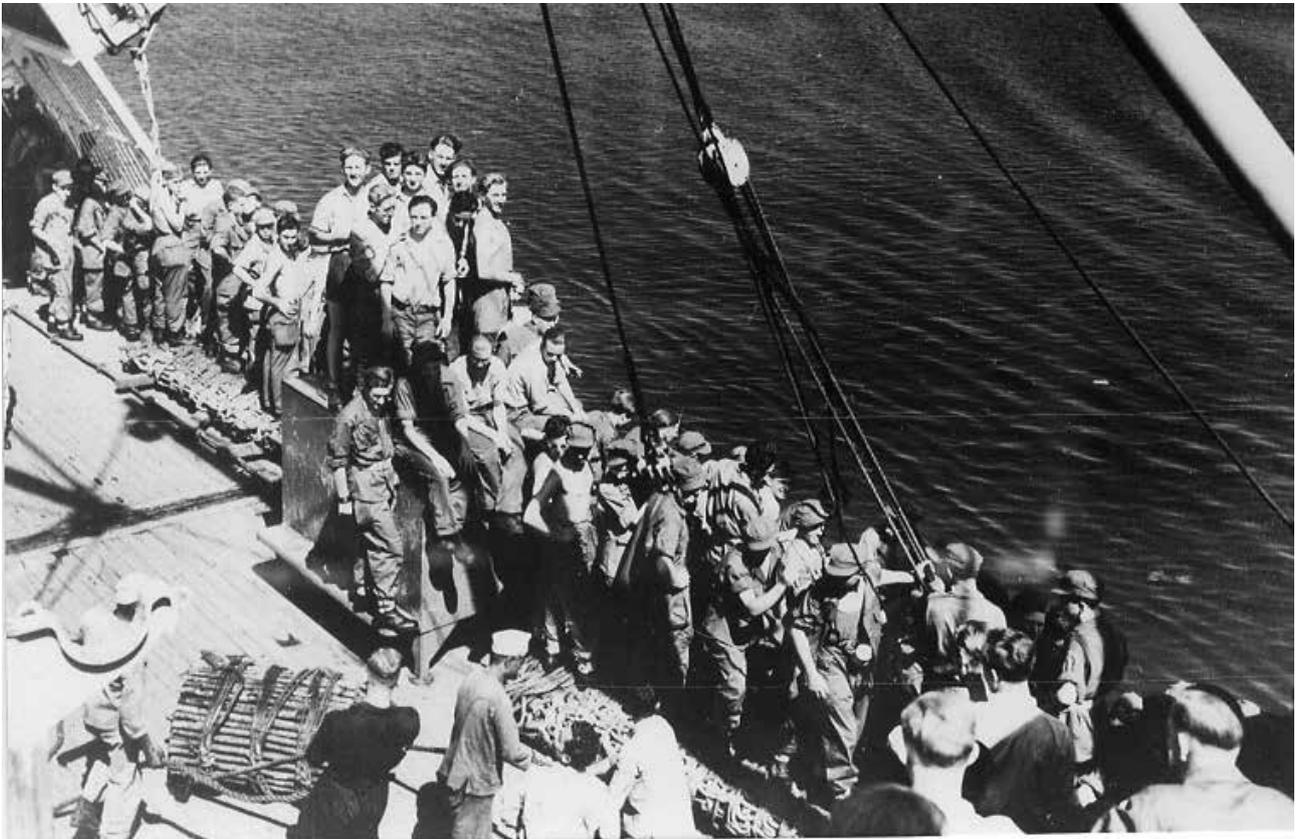
Pembesar Belanda diikuti Prajurit di benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/39



Pawai Sipil dan Militer, pada Pelaksanaan Pelantikan di depan Banteng Rotterdam, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 326/84



Kedatangan Tentara Belanda di Makassar Batalyon ke 3 dari Infanteri Pemerintahan ke 11 dari Pasukan Angkatan Darat Berada di Atas Kapal, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/58

A G S I

Panitia Penyelenggara Konferensi seluruh kaum perjuangannya di Indonesia Timur dan Panitia bekas Tawanan politik di Makassar

Memperhatikan:

1. Pengumuman kami tertanggal 15 Desember 1949 meminta T.M.I. ke Indonesia Timur dan resolusi rapat raksasa umat Islam di Makassar pada hari persidha Maulid Nabi Muhammad s.a.w. tgl. 2 Januari 1950 yang mendesak pada Pemerintah RIS untuk selekas mungkin menandatangani APRIS atau T.M.I. di daerah Indonesia Timur.
2. Pengumuman bersama oleh Pemerintah NIT dan Komisi Militer Teritorial untuk Indonesia Timur no. 2 tanggal 30 Desember 1949.

Menimbang:

1. Bahwa adalah syarat mutlak untuk lanjutnya pembangunan negara adalah keamanan dan ketenteraman hati ra'jat
2. Bahwa ketenteraman hati hanya bisa diperoleh, bilamana ra'jat hidupdela perlindungan tentara nasional sendiri (tentara sendiri)
3. Bahwa banyak pemuda yang telah mengambil bagian aktif dalam mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 yang pantas dapat kopertjajaan memikul pertanggung jawaban keamanan dan menjadi anggota APRIS

Memutuskan:

1. Mengucapkan pengumuman kami tertanggal 15 Desember 1949 itu dan menyetujui menyetujui sepenuhnya resolusi umat Islam dalam rapat raksasa pada hari Maulid tgl. 2 Januari 1950.
2. Mendesak pada Komisi Militer Teritorial Indonesia Timur terus menanggapi sebagai tentara resmi, *sewaktu yang datang memenuhi panggilan dalam komunikasi bersama dari Pemerintah NIT dan Komisi Militer Teritorial No. 2 tgl. 30 Desember 1949*
3. Mendesak supaya buat penerimaan menjadi anggota APRIS ditetapkan titik beratnya pada pengalaman dalam revolusi dan jiwa nasionalnya yang meluas.
4. Menjampaikan mosi ini kepada:
 1. Pemerintah R.I.S. di Jakarta dan markas besar APRIS
 2. " " N.I.T. di Makassar
 3. Komisi Militer Teritorial untuk Indonesia Timur di Makassar
 4. Pene dan radio untuk diumumkan.

Makassar, 2 Januari 1950

Panitia Penyelenggara Konferensi seluruh kaum perjuangannya Ind. Timur dan Panitia Bekas Tawanan Politik di Makassar,

1. Makkarang Daeng Djarung
2. Jusuf Dauti
3. S. Fondaag
4. M. Riri Amin Daud
5. Hamang
6. Aminuddin

Lageweg 32
Moch Kiri Timur Daud
Yusuf Dauti

Surat Panitia penyelenggara konferensi seluruh nama perjuangan di Indonesia timur dan panitia bekas tawanan politik di Makassar tentang desakan supaya mendapat pengakuan menjadi tentara resmi guna menjaga keamanan di wilayah Indonesia timur, 2 Januari 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 84



RESTRICTED
S/AC.10/Conf.4/6/Rev.
3 May 1950.
ORIGINAL : ENGLISH

SECURITY COUNCIL
UNITED NATIONS COMMISSION FOR INDONESIA
CONTACT COMMITTEE

LETTER DATED 28 APRIL 1950 FROM THE
REPRESENTATION OF THE REPUBLIC OF THE
UNITED STATES OF INDONESIA
FORWARDING A REPORT ON THE INCIDENTS AT MACASSAR.

Paniti j Penghubung Perwakilan
Republiek Indonesia Serikat

(Contact Committee R.U.S.I.)

Sekretariat
Dj1. Pintu Air 21.

Djakarta, April 28, 1950.

No. 130/D/1950
Lamp. ----
Perihal. Report Macassar
Affair.

Dear Sir,

With reference to our letter of April 20th,
No. 105/D/1950 offering you a report on the incidents
at Macassar, I hereby have the honour to forward you
a corrected report on the incidents.

I am sorry to inform you that in our first report
many wordings and sentences were wrongly translated from
the original Indonesian text, a copy of which was sent
to the Netherlands High Commissioner.

With this correction we consider the second report
as the right view on the Macassar affair.

I have the honour to be

Sir,

Your obedient servant,

Mr. Paul Bihin,
Chairman of the UNCI,
Hotel des Indes,
Djakarta.

/s/
(B.S. Praptodjojo)
Principal Secretary

Laporan Panitia Penghubung Perwakilan Republik Indonesia Serikat tentang insiden Makassar,
28 April 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 283

1942/89

DJAKARTA, 6 Mei 1950.

1372/50-P
Permohonan Front Penentang
Proklamasi Republik Maluku Selatan,
Makassar.

1.

Kepada
Jth. Jang Mulia Menteri Pertahanan
di
DJAKARTA.

M e r d e k a !

Terlampir saja atas perintah P.J.^{ad}. Presiden meneruskan surat kawat dari Front Penentang Proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar, tertanggal 5 Mei 1950 tentang permohonan ikut serta dalam tindakan-tindakan Angkatan Perang ke Maluku Selatan, untuk mendapat perhatian Jang Mulia.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
a.n.b.

(Mr. RATMOKO).

Kawat dari Front penentang proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar kepada Pati APRIS tentang permohonan untuk ikut serta dalam angkatan perang ke Maluku Selatan, disertai pengantar, 5 Mei 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 108



Komisi Parlementer Makassar mengunjungi rumah dimana Robert Wolter Monginsidi ditangkap tentara Belanda, 7 November 1950.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 5435

Not: 04/5, 104/IS.G/51

afno: 1-19/RI/51
3/9-51

LR

terima 24/8/51

SIFAT: SEGERA

KEMENTERIAN PERTAHANAN
STAF GABUNGAN
(SP)

DJAKARTA....., 29.....AGUSTUS... 1951.

DARI : Kepala Staf Angkatan Perang.

- KEPADA : 1. Presiden Republik Indonesia.
- 2. Perdana Menteri. X
- 3. Menteri Penerangan.-X

POKOK : Peristiwa Kahar Muzakkar.-

P. J. M.
R. M. S.
R. M. S.

Disamping pidato Presiden jang akan di-
utjapkan nanti malam djam 22.00 saja usulkan agar
Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mengadakan
desakan setjara persoanlijk kepada pemimpin2 di
Makassar agar mereka berusaha dengan njata agar
Kahar Muzakkar memenuhi panggilan Pemerintah.

Saja sebut sebagai tenaga2 jang dapat ber-
usaha dalam hal ini :

- 1. Njonja SALAWATI DAUD,
- 2. Ketua Masjumi Sulawesi (Sdr. ABBAS Dg MALOWO),
jang telah mengundjungi Perdana Menteri.
- 3. Tenaga2 lain, jang agaknja dapat ditjapai de-
ngan perantaraan Menteri Penerangan.-

KAPALA STAF ANGKATAN PERANG,
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMAS STAF
SIMATOE PANG
KOLONEL.-

Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal kepada Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar memenuhi panggilan pemerintah, 29 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.199 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.98 tahun 1953 (Berita Negara No.49 tahun 1953);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar:

1. KAPTEN GEORGE KANDOU MONTOBALU
N.R.P.15960.Kep.Staf R.I.24. T.T.VII.
2. KAPTEN JOOST ALEXANDER WUISAN
N.R.P.16266. Kmd.Bn. 717. T.T.VII.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.

S.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

Iwa Kusumasumantri

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

Djody Gondokusumo

DJODY GONDOKUSUMO.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953 tentang Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar, 18 November 1953.

Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Keppres No. 882



Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, Makassar, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1962.

Sumber: ANRI, Djapen Prosul Sulselra M 16807



Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H.Nasution di Lapangan Terbang Mandai, Makassar, menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD, 30 Maret 1960.

Sumber: ANRI, Kempen K 600330 RR 1



Dari kiri ke kanan: Kolonel M. Yusuf, Panglima Operasi Mandala; Mayor Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan Letnan Jenderal Gatot Subroto saat menghadiri Timbang Terima Deputy Kepala Staf Angkatan Darat Wilayah Indonesia Timur di Makassar, 22 Januari 1962.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M 16641



Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Februari 1962.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16668.



PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA
PEMBUBARAN "KOMANDO MANDALA" DI MAKASAR
6 MEI 1963.

37.

Saudara-saudara sekalian,
....Terdapat sembojan-sembojan digulung semuanya, Koperasi RK I,
Koperasi RK II, Koperasi RK III, semua digulung. Digulung dan ditu-
runkan. Ja sebelah kiri djuga. Gulung, itu sembojan-sembojan
jang merah itu digulung, jang biru gulung. Koperasi RK II.Ja
itu djuga turun, BPP, PKI, turun.....

Nah, Komandan perintahkan pasukan beristirahat ditempat, isti-
rahat!

Saudara-Saudara, sekarang diam, ja diam, diam, sebelah kiri
diam!

Saudara-Saudara lebih dahulu saja menjampaikan salam Islam:
Assalamu alaikum Warachmatullahi Wabarakatuh!

"Mu'alaikum salam"! (sahut hadirin - red).

Lantas pokik merdeka lima kali, naik tangan!

"Merdeka!".Kurang naik tangan semua.....Ja! "Merdeka!,
Merdeka!, Merdeka!, Merdeka!..(Dengan diikuti oleh hadirin
- red)

Saudara-Saudara sekalian,sebelah kiriku ini diam....!

Saudara-Saudara, beberapa saat jang lalu diadakanlah dilapangan
Karebosi ini upatjara pembubaran Komando Mandala. Saudara telah men-
dengarkan segala sesuatu jang dibatjakan tadi itu.

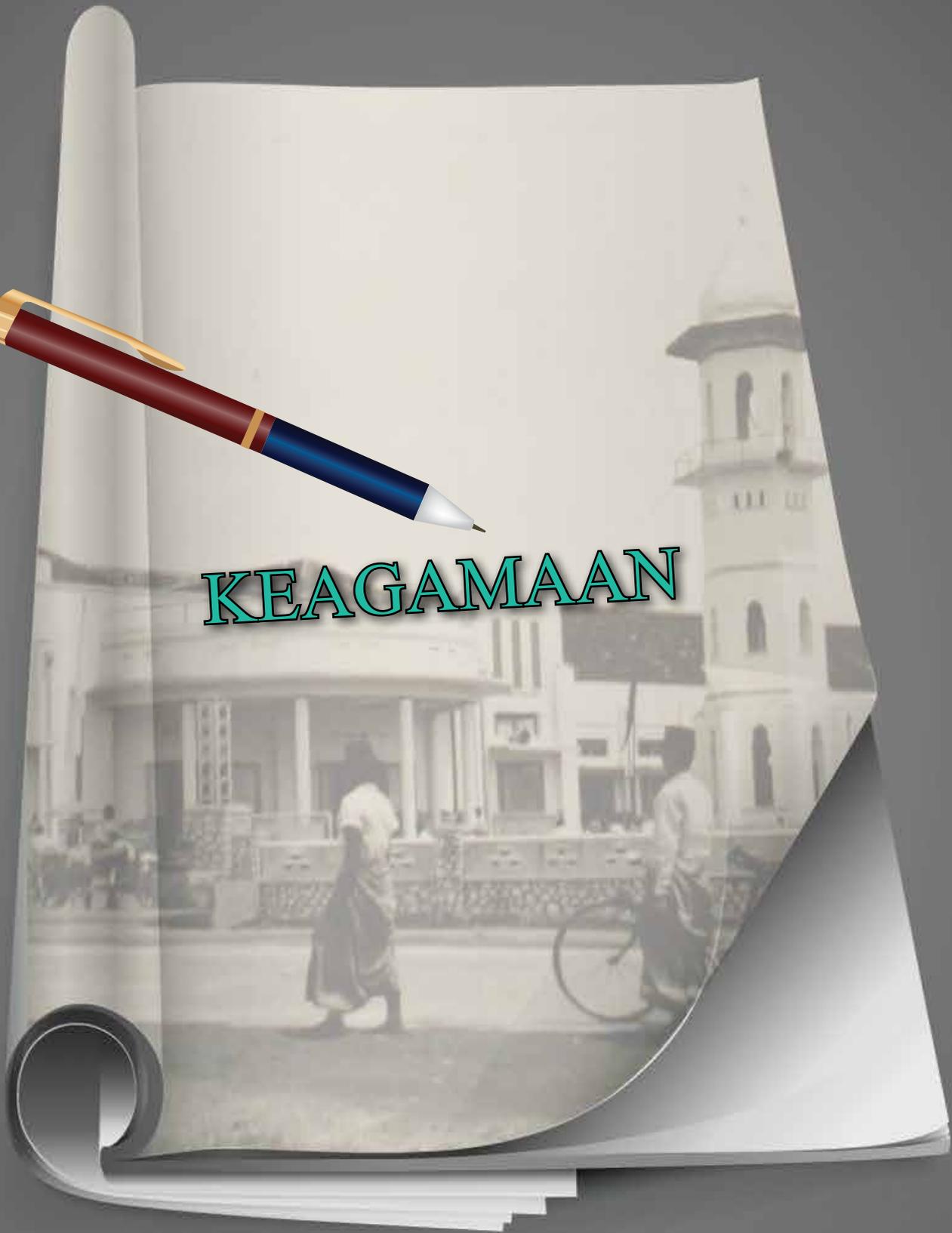
Saudara-Saudara, sebagai Saudara mengetahui, saja pada hari ini
baru kembali dari Irian Barat - tjoba tulung kasih tahu anak ketjil
itu supaja tidak berteriak-teriak. Anak ketjil dekatmu itu. Ja, itu.

Saja baru kembali dari Irian Barat ini hari. Tanggal 29 jang
lalu saja meninggalkan Djakarta menuju ke Irian Barat. Apa sebabnja
saja pergi ke Irian Barat? Sebabnja ialah pada tanggal 1 Mei,- seka-
rang sudah tanggal berapa Mei? Berapa? sekarang 6 Mei. Tanggal 1 Mei
Saudara-Saudara, Irian Barat telah kembali kedalam wilajah kekuasaan
Republik.

Saudara telah mengetahui, bahwa lama Irian Barat itu tidak masuk
kedalam wilajah kekuasaan Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ki-
ta memproklamkan kemerdekaan kita. Kita memproklamkan kemerdekaan
Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan itu disambut dengan hebat oleh
seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, antara lain
rakjat dari Sulawesi Selatan pun menjambut dengan hebat. Ditanah
Djawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Kepulauan Nusatenggara, di
kepulauan Maluku, sambutan daripada rakjat adalah demikian hebatnja
sehingga bendera si Tiga Warna, bendera Belanda lekas dapat diturun-
kan dari angkasa diganti dengan bendera kita Sang Merah Putih. Teta-
pi kekuasaan Belanda di Irian Barat adalah demikian kuatnja sehingga
kita tidak bisa

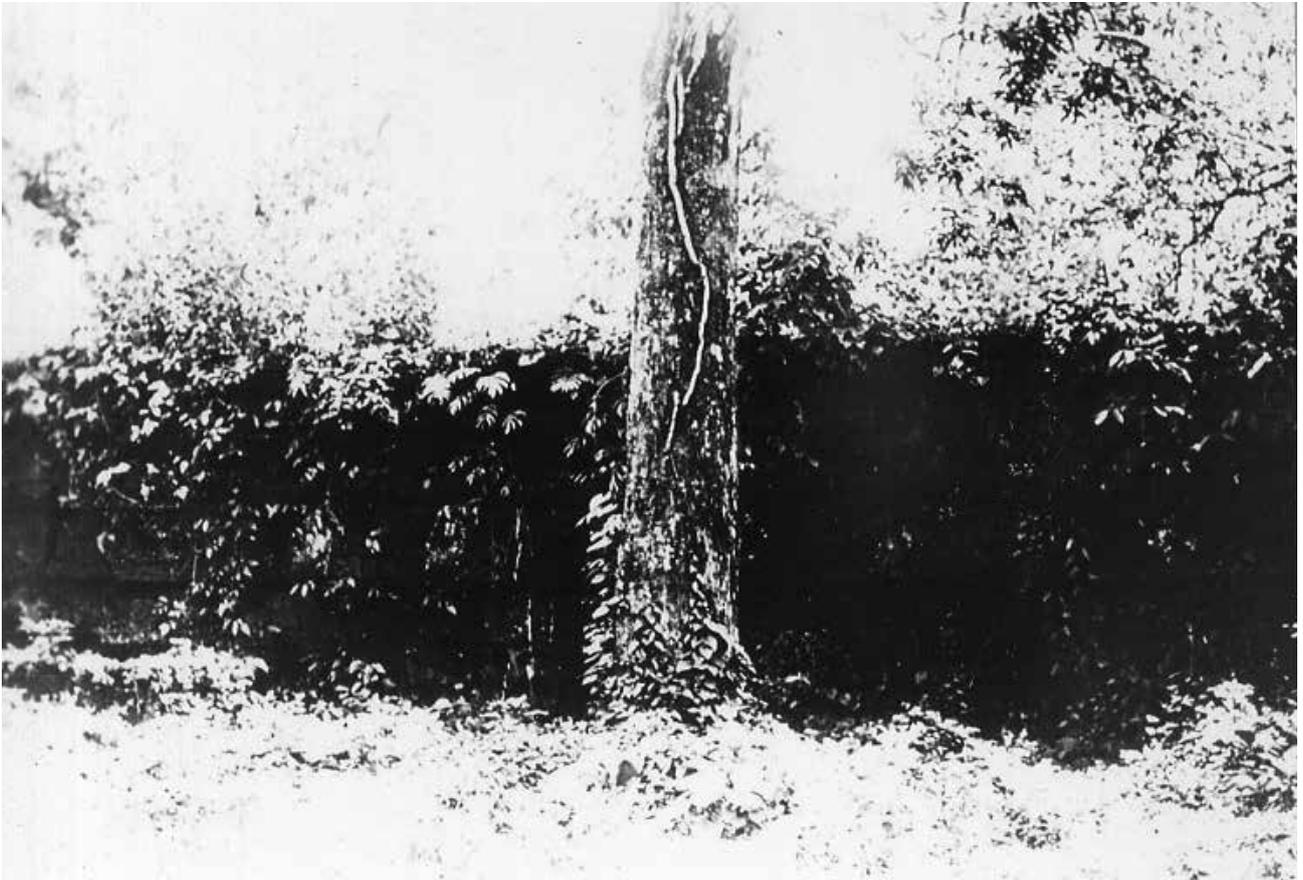
Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara Pembubaran "Komando
Mandala" di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 1963.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 492



KEAGAMAAN

Salah satu ulama yang termasyhur dari Makassar adalah Syech Yusuf yang wafat tanggal 23 Mei 1669 di Afrika Selatan. Sejak masa Kerajaan Gowa, Agama Islam telah masuk ke Makassar. Pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Raja I Mangerangi Daeng Manrabbia Raja Gowa XIV menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Sejak kedatangan kolonialisme Belanda di Makassar, Agama Kristen juga menyebar di wilayah ini. Sehingga saat ini di Kota Makassar selain berdiri masjid-mesjid megah juga berdiri beberapa gereja tua seperti gereja dekat Kastil Rotterdam dan Gereja Katholik.



Tembok Sisa reruntuhan Masjid Bone di Makassar,
Sulawesi Selatan, 1814-1816.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 807/004



Masjid tampak depan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 808/37



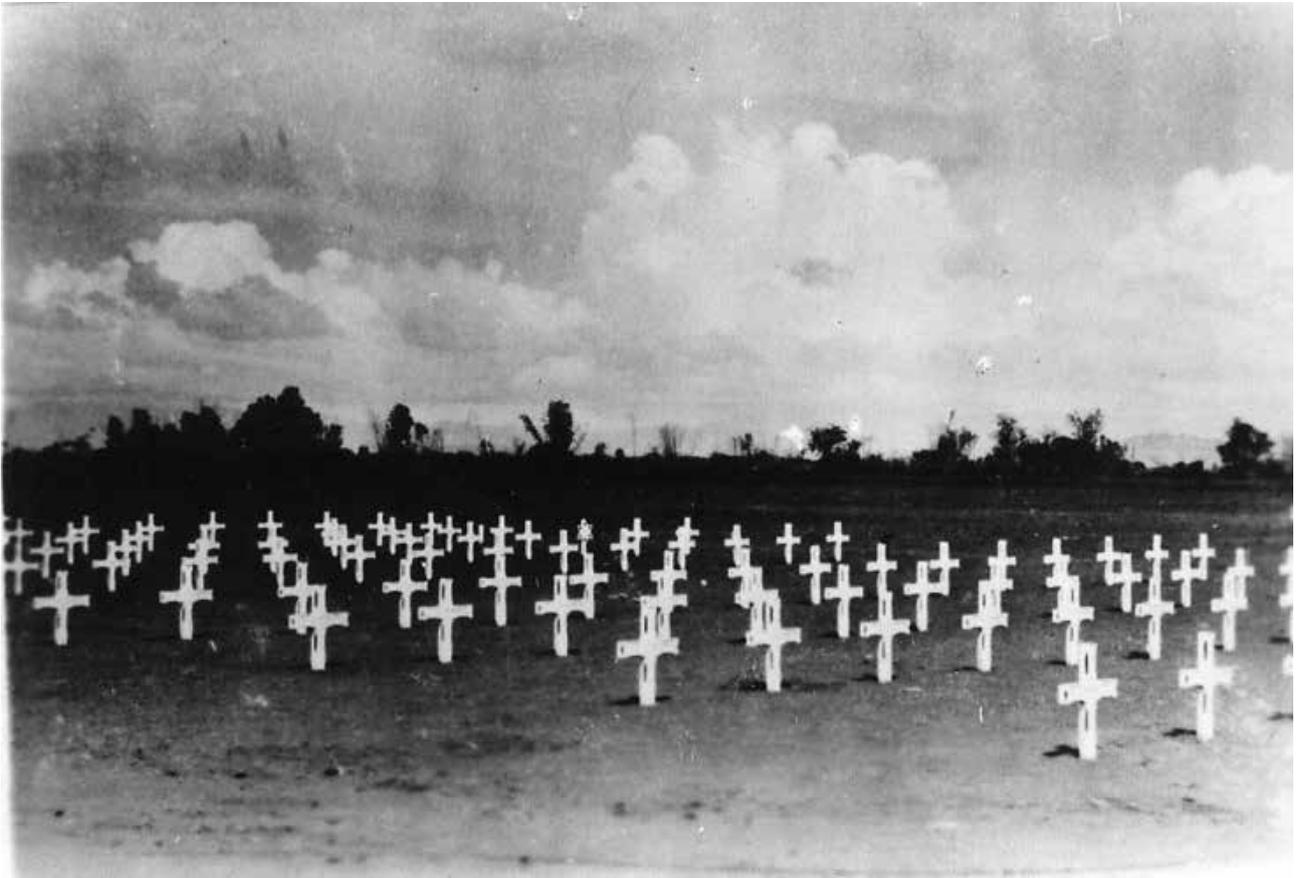
Gereja Protestan orang Toraja di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/14



Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 809/42



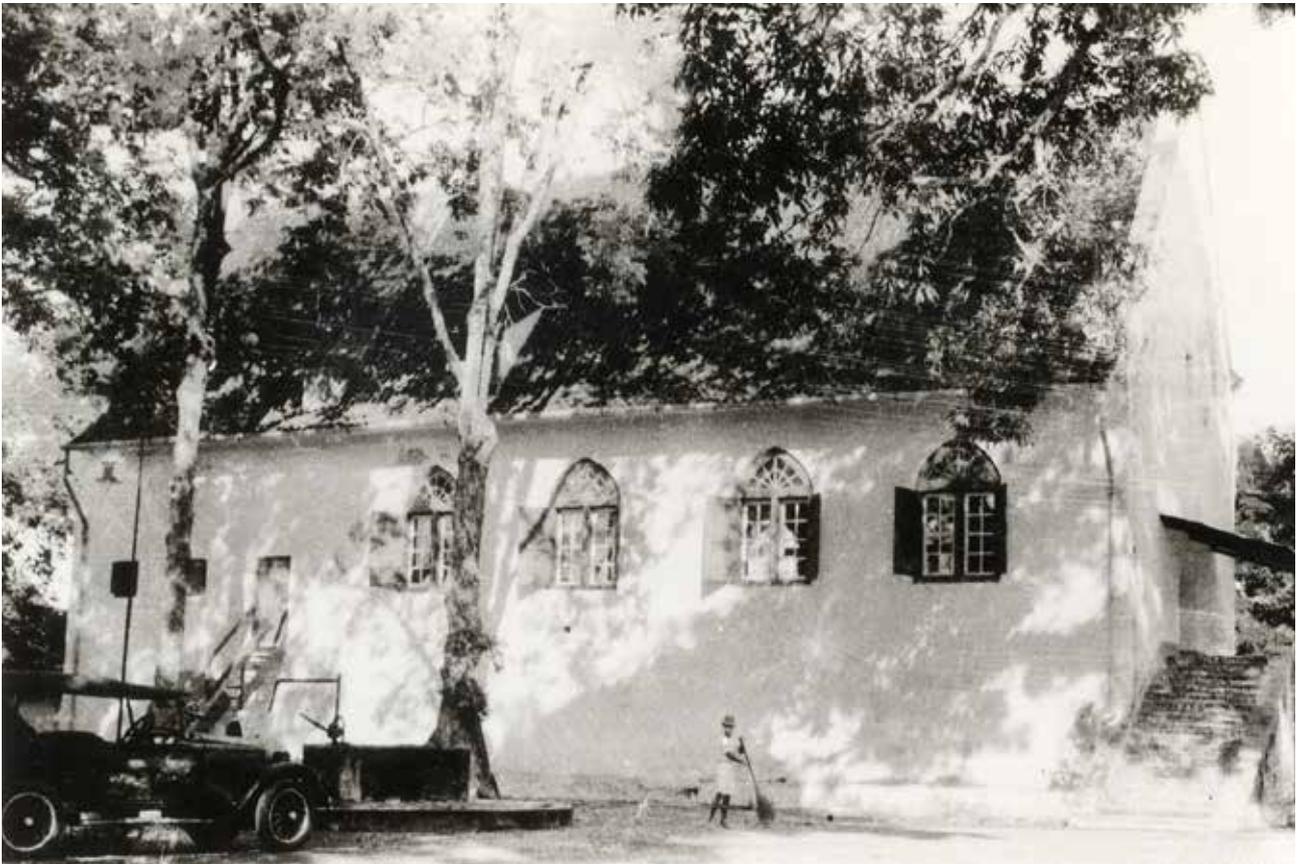
Pemakaman tentara sekutu beragama kristen di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/90



Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri di Lapangan Karebosi, Makassar, 13 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 8559





Gereja tua dekat Kastil Rotterdam yang sekarang di pakai gudang senjata Garnizun di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/20



Pintu masuk Klenteng Cina, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/14





Pemandangan di depan Masjid Raya
Kota Makassar, 26 November 1954.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531126 RR 4



PIMPINAN WILAJAH "LAPUNU" (LADINAH PEMILIHAN UMUM NAHDLATUL ULAMA)
 DJALAN ANUANG 37A - TELP. - MAKASSAR

Makassar, 1 November 1955.-

No.135/L III/55

Kepada
 Pengurus Besar Partai N.U.
 Djalan Menteng Raya 24
 Djakarta.-

Ag. No.	5094
Di trima	5/11/55
Di balas	

Bismillahir-rahmanir-rahiem

Assalamu Alaikum w.w.

Dengan hormat,

Surat sdr2 No.1203/Tnf/X/55 telah kami terima untuk mana kami utjapkan terima kasih. Mengenai pendapat sdr2 agar diadakan konfrensi kami sambut dengan baik. Memang telah ada rentjana dalam hal ini semendjak Mei 1955, karena pada bulan itulah sdr Andi Namba mendjandjikan akan menjampaikan jang diterimanya dari pusat (sampai sekarang belum kami terima sebesar Rp.6.000.--). Tetapi sangat sajang karena setiap kami minta dari sdr Andi Namba belum pernah kami menerima. Sdr Andi Namba hanya selalu berdjandji dengan mengatakan bahwa nanti djika sepeda motornja telah terdjual barulah dia berikan. Olehnja kami menanti. Dan pada suatu hari kami datang lagi beliau dan menanjakan apakah sepeda motornja telah laku, djika belum laku berikan saja kepada kami, nanti kami jang mendjualnja dan harganja diperhitungkan dengan uang tsb. Djawab beliau bahwa motornja telah laku dan segerah dia akan memberikan uang itu. Tetapi sangat menjagal karena hingga sekarang belum beliau menjampaikan sekalipun telah berulang2 kami usahakan memintanja baik dengan kata2 jang sangat halus maupun dengan kata2 jang agak lain.-

Pada tanggal 14 October 1955 kami ada mengirim surat lagi kepada sdr Andi Namba (dan tembusemnja kami ada kirikan kepada sdr2). Sampai hari ini sdr Andi Namba belum memberikan djawabannya. Hal ini kami sangat sesalkan dan kami masih tetap berusaha agar soal ini tidak mendjadi soal keluar, tetapi bagaimanapun djuga djika sudah sangat mendesak maka kami akan djadikan persoalan ini dengan melalui saluran2 hukum jang telah ditentukan (sesudah pemilihan dewan konstituante).

Djadi sebab jang utama sehingga konferensi jang kami rentjanakan itu belum terlaksana ialah soal keuangan.

Semoga untuk pemilihan dewan Konstituante jang akan datang ini dapatlah kemenangan kita bertambah.-

Ketua.

K. U. S. Siafuddin.



Massalam.

Penulis.

Gulan.

Tembusan: Laporan Personel.

Surat surat mengenai konferensi Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), Makassar, 1955.

Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 1273



PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA

DJALAN RAYA MENTENG 24 — TELEPON 1392 GAMBIR — DJAKARTA - RAYA

DJAKARTA, 22 S J A ' B A N , 13 74.1
16 A P R I L , 19 55.

No. *484* / Inf. / IV / '55

Prihal : Sekitar perongkasan
K.H. M. R O M B L I. —

Lamp. : —

Kepada

KONSUL PENGURUS BESAR
Joh. Sdr. = NAHDLATUL-'ULAMA' =

di MAKASSAR.-

Perji Jomana Djkt. 11/1955

Bismillahir - rahmaanir - rahieem

Wa'alailaumus salam war. wab.

Saudara jang terhormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa harini kami telah menerima tembusan surat Saudara2 tanggal 3 Maret 1955 No.0029/MIC/IV/55 tentang pindjaman K.H.M.Ranli kepada N.V.FAUZI-JAH berkenaan dengan kaudjungannya ke Djakarta untuk menghadiri sidang pleno Pengurus Besar Sjuritjah = NAHDLATUL-'ULAMA' =, jang aslinja Saudara2 kirinkan kepada P.B.Sjuritjah N.U.

Berhubung dengan itu kami beritahukan pula disini, bahwa oleh Pengurus Besar = NAHDLATUL-'ULAMA' = Bagian Keuangan, K.H.M.Ranli telah dikasih wang perongkasan buat G.I.A. pulang pergi Makassar-Djakarta dan Djakarta-Makassar. Mungkin Saudara2 akan mendapat keterangan sendiri dari beliau.

Demikianlah, semoga dengan djawaban jang sesingkat ini Saudara2 maklum adanja. Terima kasih.

WASSALAM.-



PENGURUS BESAR
= PARTAI NAHDLATUL -'ULAMA' =
Tanfidjiah.
S E K R E T A R I S.

(A. S J A H R I).-

KEMIS MIM.
[Signature]
K.H.M. R O M B L I.

- Tembusan untuki
1. PBNU Sjuritjah, di DJOMBANG-DJAKARTA.
 2. PBNU Bagian Keuangan, di DJAKARTA,
 3. Arsip.

Surat dari PBNU kepada Konsul PBNU Sulawesi di Makassar mengenai penyelesaian dan penggantian ongkos perjalanan Udara Jakarta - Makassar untuk mengikuti konferensi Nahdlatul Ulama, 1 November 1955.

Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 61

SAMBUTLAH!



SAMBUTLAH!

KONGRES BHINNEKA TUNGGAL IKA

Diadakan di Makassar mulai pada tgl. 8 Mei s/d tgl. 12 Mei 1957

**RAKJAT dan PATRIOT2 REPUBLIK INDONESIA,
CHUSUSNJA DIWILAJAH WIRABUANA.**

- Ketahuilah, bahwa keadaan Tanah Air kita, tidak membenarkan kita tinggal bertopang dagu.
- Bengkalai Revolusi Nasional dalam segala lapangan dan tingkatan menghendaki kita menggulung lengan badju mengambil kebidjaksanaan untuk menjelesaikan segala bengkalai itu.
- Keruntuhan dan kehantjuran sebagai akibat pertentangan antara kita dengan kita, mari kita tjegah dengan mengambil tindakan jang tjepat, djitu dan tegas demi pertanggungjangan djawab sebagai patriot bangsa jang bersedia mengabdikan untuk NUSA dan BANGSA.
- Piagam Perdjjuangan Semesta (Permesta) jang diikrarkan pada tgl. 2 Maret 1957 di Makassar, adalah pernjataan kebulatan tekad untuk melandjutkan revolusi nasional dengan tetap berpegang teguh pada: Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Kongres BHINNEKA TUNGGAL IKA jang akan dilangsungkan di Makassar dan jang akan terdiri dari tokoh2 perdjjuangan sembilan belas empat puluh lima (1945), tokoh2 daerah, tokoh2 politik, anggota2 Parlemen/Konstituante jang mewakili Indonesia bagian Timur, serta tokoh2 Pemuda/Veteran, Buruh, Tani, Adat, Agama, Wanita dsb., akan membahas dan menjempurnakan pelaksanaan PIAGAM PERDJJUGAN SEMESTA dalam bidang2:
 - a. Pertahanan
 - b. Pemerintahan
 - c. Pembangunan
 - d. Keamanan
 - e. Personalialia
 - f. Nasional.

Rakjat diwilajah WIRABUANA, baik ia berada di Nusa Tenggara, Maluku, maupun di Irian Barat atau pun di Sulawesi:

BANGKITLAH!!!

Marilah kita pelopori Pembangunan Semesta - lahir dan bathin-dari seluruh Tanah Air kita, REPUBLIK INDONESIA jang kita tjintai.

Makassar, April 1957

Panitia Pusat

KONGRES BHINNEKA TUNGGAL IKA

VKIRM 4 07

Surat mengenai penyelenggaraan Kongres Bhinneka Tunggal Ika keamanan di Makassar, April 1957.

Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2977

KEMAS PENGURUS TJAB. BONE
PARTAI NAHDLATUL ULAMA
DJL. PALLETTE 12 WATAMPONE.

2059-
D/W 58

WATAMPONE, 12 RAMADHAN 1977.
8 APRIL 1958.

No. : 1/IV-58.
Lamp : --
Hal : Grasi atas Keputusan Pengadilan Negeri Watampone tgl. 1 April 58 terhadap diri Abd. Azis Palaguna bekas Ketua N.U. Tjabang Bone.--

PARAP,

Kepada P.J.M.
Presiden Republik Indonesia
di- Djakarta.
d/p. Pengadilan Tinggi
di- Makassar.
d/m. Pengadilan N e g e r i
di- Watampone.

Handwritten signature/initials

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Assalamu alaikum w.v.

Dengan segala hormat !

Jang bertanda tangan dibawah ini Abd. Azis Palaguna bekas Ketua N.U. Tjabang Bone, pekerjaan Penilik pada Kantor Pendidikan A g a m a Kabupaten Bone, dengan ini memajukan G r a s i kepada P.J.M. atas keputusan Pengadilan Negeri Watampone tgl. 1 April 1958 berupa denda/ kurungan Rp. 30.--/ 2 (dua) hari.

Bahwa jang bertanda benar mengatakan dhalim atas jang bersangkutan dalam peristiwa ini pada sidang pengadilan Negeri Watampone tgl. 3 Desember 1957, karena penjelasan jang diminta oleh Ketua Pengadilan pada saat itu, dan kemudian jang bertanda minta maaf pula atas perkataan tsb. sesuai dengan nasihat Ketua Pengadilan dan walaupun dia nja-ta-njata telah melanggar hak jang bertanda sebagai Ketua N.U. Tjabang Bone dengan menunjukkan suatu surat kopertjajaan kepada Pd. Kepala Daerah Bone atas nama N.U. Tjabang Bone jang sama sekali tidak setahu dan seisin jang bertanda.

Pada hal ketika itu jang bertanda masih tetap sebagai Ketua N. U. Tjabang Bone dan berada ditempat.

Perkataan dhalim jang oleh pemohon maksudkan, maftumnja ialah tindakan jang tidak menurut ketentuan2 organisasi atau peraturan2 yg. berlaku. Jadi perkataan jang bertanda itu atas jang bersangkutan adalah tepat dan bukanlah penghinaan, tetapi merupakan ketjamaan jang membangun.

/Pd.

Pula perkara ini hanja bersumber dari suatu surat (nota Politik) N.U. Tjabang Bone jang telah disampaikan kepada Kepala Daerah Bone yg. maksudnja semata-mata untuk kepentingan umum. Tambahan lagi asal mula peristiwa ini telah diadili dua kali dan jang bertanda telah memajukan revisi atas keduanya. Karena kejakinan jang bertanda, bahwa surat (nota politik) tsb. adalah bersifat membela kepentingan umum dan tidak disiarkan setjara umum.

Dengan keterangan jang sesingkat ini, maka jang bertanda mohon kepada P.J.M., kiranja pemohon dapat memperoleh G r a s i atas keputusan pengadilan tsb. diatas.

Demikianlah, dan pemohon tetap menunggu dan terlebih dahulu mengutjapkan banjak terima kasih dan sjukur.--

W a s s a l a m,
Jang memajukan grasi,

Handwritten signature of Abd. Azis Palaguna

(Abd. Azis Palaguna)

Bekas Ketua N.U. Tjab. Bone.--

TEMBUSAN KEPADA JTH:

1. Konsel N.U. Sulawesi di Makassar.
2. P.B. N.U. di Djakarta.
3. Gubernur Sulawesi di Makassar.

No.1 dan 2, untuk diperdjoangkannya demi
untuk kehormatan partai.--

Surat mengenai permohonan grasi dan memorie Van kasasie yang PBNU lakukan di pengadilan tinggi Makassar dan Surabaya, 2 April 1958.

Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2958

AGENDA No. :	6391
DITERIMA TGL. :	17 Juni 58
DIBALAS TGL. :	
HUBUNGAN :	PARAP. 12/7.58

: 168/Cag/Pang/58
 : 2
 : Pengiriman S.B.I.I. Sulawesi
 kepada Bapak2.

22 Juni 1958

Sifat : R a h a s i a .

Kepada
 Jth. 1. J.M. Wakil Perdana Men-
 teri I Republik Indonesia
 (Bapak Idris Chalik)
 2. J.M. Menteri P.U. & T.
 Republik Indonesia
 (Bapak Ir. Bangerang Nur)
 3. J.M. Menteri Kesehatan
 Republik Indonesia
 (Bapak Dr. Asia Saleh)
 di
Djakarta.

Republik Indonesia

Dengan hormat,

Bermula ini, kami menadjukan persoalan kami dengan P4P dalam menotop kan susunan P4D Makassar yang sangat memuat hati kami dan sangat tidak memuaskan nja, sebagai tindakan yang sangat tidak bijaksana oleh J.M. Menteri Pertahanan P.I. dapat menadjukan susunan P4D Makassar dimana wakil S.B.I.I. Sulawesi (sdr Abdi Bahar) hanya dijadikan anggota pengganti saja.

Sungguh? tindakan itu adalah suatu penghinaan kepada Pemimpin2 Organisasi di Buruh kelas dan pemimpin2 kelas pada umumnya, dan adalah pula suatu tjara yang buruk guna menedak dan melahak bersekutu atau mengorganisasi buruh kelas yang kini, berkesbang menajul dari Gerakan Buruh Socialisme (P.K.I. dan Partai Social).

Sebagai konjikasi kami dapat sampaikan kepada J.M., bahwa di Propinsi Sulawesi, sampai pada hari ini S.B.I.I.-lah yang masih utuh dan terdandang oleh anggota2 (Manjuri, M.U. dan P.S.I.I.), selanjutnya karena S.B.I.I. di daerah ini hanya mengutamakan kepentingan perdjouangan buruh dari pada soal2 politik, selain untuk menghadapi ahak dari para pemimpin2 buruh ala Socialis ne dapat dihadapi dan inaja Allah akan gagallah tjita2 mereka itu didaerah ini.

Adapun organisasi buruh yang dimajuk oleh P4P menadjadi anggota P4D Makassar, sebagaimana kami terangkan dibawah ini :

1. Iswadi (Sobsi - P.S.I.)
2. H. Pijo (Gobi - Partai Buruh)
3. Thung Tok Gie (Iobis - Socialis)
4. A. Turangan (B.P.B. - Socialis)
5. H. Bur Patta (K.B.K.I. - P.M.I.)

Mengenal praktek2 dari kelas2 yang kami njatakan diatas ini tidak per lu kami sampaikan kepada Bapak J.M., tetapi sebaiknya kelas dapat disampaikan kepada Bapak J.M., bahwa ; Gobi dan K.B.K.I. adalah organisasi yang ter- ketjil didaerah ini dan menpunjai anggota hanya di kota Makassar. Djuga B.P.B dan Iobis tidak menpunjai anggota diluar kota Makassar, akan tetapi anggota2 nja dalam daerah kota Makassar dapat mengimbangi S.B.I.I. dan Sobsi, akan tetapi kalau sudah di Kabupaten2 atau luar kota Makassar, S.B.I.I. lah yang menpunjai anggota dan Sobsi hanya ada di Djawatan P.U. dan lain2 se bagainya, sehingga kami berpendapat anggota P4D Makassar ini tidak representa tif dan untuk menentorokan kelas didaerah ini, kami mengadakan soal ini ke pada person Bapak2 J.M. atas periksaan yang kami tidak terdca itu.

Surat dari ketua konsulat SBII (Serikat Buruh) Sulawesi kepada waperdam I RI mengenai ketidak puasannya terhadap wakil SBII Sulawesi dalam susunan p4d yang dianggap menguntungkan PKI, 22 Juni 1958.

Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2906



PARIWISATA
DAN
BUDAYA



Di Kota Makassar sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Mengingat potensi obyek wisata yang dimiliki Kota Makassar sangat beragam meliputi kawasan wisata seperti wisata sejarah/budaya, wisata alam/pantai. Kekayaan Wisata Sejarah/budaya di Kota Makassar terlihat dari beberapa *heritage* dan benda cagar budaya yang merupakan warisan dari Kerajaan Makassar tempo dulu.

Warisan *heritage* diantaranya, Fort Rotterdam, klenteng Cina di daerah Pecinan, kompleks makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya, serta warisan seni budaya seperti alat musik gantang, orkes kulu-kulu wa, tari Cakalele, atraksi Mappadendang, Tarian Ma'giri, Tarian Pepe-pepeki ri Makka serta tarian tradisional Tari Pakarena.



Profil laki-laki muda di Makassar, Sulawesi Selatan, 1913.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 693/12



Sepasang pengantin Makassar dan Naik Kereta Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 388/72



Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik gantang (tromels), kecapi dua senar dan gong, Sulawesi Selatan, [1940].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 909/53



Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan, [1940].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/70



Profil gadis Makassar dengan pakaian adatnya, 1 Agustus 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 13



Presiden Soekarno berfoto bersama para gadis dengan menggunakan pakaian adat Makassar, 1 Agustus 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 152



Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Robert Wolter Monginsidi di Makassar, 28 Juli 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-29



Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro,
di Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-43



Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan ketika sedang bermain di Studio RRI Makassar, 28 November 1952.

Sumber: ANRI, Kempen No. 521128 RR 1



Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar,
8 Oktober 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. 531008 RR 2-3



Makam Sultan Hasanuddin di Makassar,
10 Oktober 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 571010 RR 4-7



Barisan Penari Cakalele menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan Terbang Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.

Sumber: ANRI, Kempen No. 620104 RR 14



PENDIDIKAN

Sejak masa kolonial di wilayah Makassar sudah didirikan SR (Sekolah Rakyat), pada tahun 1930 sudah dibangun pula Rumah *Onderwyzer* (Guru Sekolah Dasar) di Makassar. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah di Makassar menerapkan sistem pendidikan Jepang.

Pada era 1950-an didirikan Universitas Hasanuddin di Makassar. Pada tanggal 7 November 1953, Presiden Soekarno berkunjung ke Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin serta tanggal 10 November 1962, Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menandatangani Naskah Peresmian Universitas Muslimin di Makassar. Pada tanggal 29 April 1963, Presiden Soekarno menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin

Duplicaat
No. 10

Bij de aankomst de-
zer resolutie, moet de
datum en het nummer
van deze's naauw-
keuriglijk worden uit-
gesluit.

Bijlagen.

Extract uit het Register der Han- delingen en Resolutien van den Luitenant Gouverneur Generaal in Rade.

BATAVIA, den 31 Mei

1828.

Gelesen de missie van den Gouverneur van Makassar
van den 30 Januarij 1828. No. 10. waarbij enz.
Is na deliberatie goedgekeurd en verstaan

Luitenant Gouverneur Generaal
van Batavia
P. J. van der
Linden

1. Den Gouverneur van Makassar te kennen te geven,
dat hij door de Sub Commissie van Onderwijs, vastge-
steld den Schoolgelden, door Regering bestemd, ge-
hoort zijn voorgekomen, en zij niet te veel verlangen dat
deze Schoolgelden onderzocht of deze Schoolgelden niet
op eene lagere schaal zouden kunnen worden gebracht
en voortrent door Hen, naar bevoegd van jaren we-
ruvooren, met aanschouwing om at eindelijk lot of
een derde gedeelte te verminderen, de door voornoemde sub
Commissie bepaalde contributie van 2000000 Hindoen
welke met de school komen, en van den Gouvernements
Onderwijs geneeten, als zijnde die bepaling,
nu Regering bovendien druktheid voorgekomen de
omstandigheden kunnen bestaan, welke het voor de
ouders of jongen, verkieslijk doen zijn, of zelfs nood-
delijk maken om hunne kinderen of pupillen ter
kinner huizen te doen onderwijzen.

2. Den Gouverneur voornoemd, te kennen te geven,
dat de regering met bevoegdheid heeft getien dat
voor de sub Commissie van Onderwijs te Makassar,
in afwijking van het voorgeschreven bij de algemeene
order over de lagere scholen is bepaald, dat de kinderen
erst na den outwasm van 6 jaren te hebben bereikt, ter

Aan

Den Gouverneur
van Makassar

Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur Makassar tentang dasar-dasar ketertiban di Makassar, 31 Mei 1828.

Sumber: ANRI, Makassar 458.a



Rumah *Onderwyzer* (Guru Sekolah Dasar) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 826/71



Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang telah lulus di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen No. 511123 RR 3

No.15/Up/3/3/34.-

KUTIPAN dari daftar surat2-keputusan Gubernur Sunda Ketjil..

Singaradja, 24 Djamuari 1952.-

1670 Skat
6.2.12
GUBERNUR SUNDA KETJIL.-

Membatja surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14/1-1952 No.Pem.30/1/45 mengensi peresetujuan untuk memberi kesempatan beladjar pada S.M.A. Makassar bagi V.H.R. Koroh, jang dengan beslit Menteri Dalam Negeri tanggal 6/12-1951 No.Pem.66/10/25 terhitung tanggal 1/5-1951 diangkat sebagai Kepala Daerah Swapradja Amarassi.

Membatja pula risalah dari permusjawaratan jang diadakan menurut adat pada tanggal 10/4-1951 di-Boun (Amarassi), dalam rapat mana dikedendeki agar V.H.R. Koroh termaksud dapat melandjutken sekolahnja.

Menimbang bahwa bersekolah di-Makassar pasti oleh V.H.R.Koroh harus diadakan pengeluaran, sehingga dirasa tepat agar ketjuali gadjinja sebagai Kepala Daerah Swapradja bila gadji ini tidak mentjukapi, diberikan padanja suatu djumlah tertentu guna keperluan pembeli alat-alat peladjaran, buku-buku dab. dan djumlah mana dibebankan pada anggaran belandja Swapradja Amarassi.

Memperhstikan keputusan kita tanggal 7 Mei 1951 No.101 mengenai pembentukan Madjelis Pemerintah Harian Sementara Swapradja Amarassi.

M e m u t u s k a n :

- I. Memberi kesempatan beladjar pada S.M.A. Makassar bagi V.H.R.Koroh,Kepala Daerah Swapradja Amarassi,peladjaran mana harus diselesaikan dalam djangka waktu jang biasa bagi S.M.A.
- II. Selama meneruskan peladjaran di-Makassar gadji sebagai Kepala Daerah Swapradja Amarassi dibajer penuh dibebankan pada anggaran belandja Swapradja Amarassi.
- III. Mentjatat bahwa keputusan ini berlaku surat pada tanggal 1 Mei 1951.-

Salinan dari surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden di-Djakarta
2. Para Menteri R.I. di-Djakarta
3. Dewan Pengawasan Keuangan di-Bogor
4. Direktur S.M.F.P.A.A. di-Makassar
5. Kepala Daerah Timor dan Kepulauannja di-Kupang
6. Para Radja Timor
7. Kepala2 Djawatan Daerah Timor
8. Petikan dikirim kepada jang bersangkutan untuk diketshui dan didjelaskan.

Kepada
Kabinet Presiden
di
DJAKARTA.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut diatas.
S e k r e t a r i s

Katon
I.Gst.Kt.Katon.-

SIMPAN

TGL:
BUNDEL:

Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil No. 15/UP/3/3/34 tentang pemberian kesempatan belajar kepada V.H.R. Koroh, Kepala Daerah Swapraja Amarassi di SMA Makassar, 24 Januari 1952.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1080



Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 November 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. 531007 RR 7

Aan Zijne Excellentie
Ir. Sukarno
President van de Republik Indonesia
Serikat,
Paleis "Merdeka"
Djakarta.

Tomohon 18 Juli 1950.-

KABINET PRESIDEN
AGENDA No: 3913 Van 50
TGL. TERIMA : 13.9.50
BUNDEL : -19- 8

Surat 18 Juli 1950
26/7/50
J. P. [Signature]
Excellentie,

Met verschuldigde eerbied geeft ondergetekende P.H.J.M. Theunissen, wonende S.M.R.K. te Tomohon (Sulawesi Utara), Mulo-onderwijzer tewerkgesteld als Directeur der Sekolah Menengah R.K. te Tomohon, aan Uwe Excellentie te kennen:

dat hij sedert 20 Mei jl. zonder opgave van redenen door legerautoriteiten uit zijn huis is gezet, onder toevoeging van de woorden: "Binnen 3 uren er uit of wij komen met patronen en wapens!";

dat hij geen andere woonruimte kreeg toegewezen, maar als gevolg hiervan vier maal andere woonruimte heeft gehad en tot slot belandde in een klaslokaal, waar hij tegen het einde dezer maand wegens aanvang der lessen weer uit moet;

dat hij sinds 1 September 1949 benoemd werd tot waarnemend directeur der Sek. Menengah R.K. te Tomohon en na enkele maanden daarna verzocht had aan het Ministerie van Onderwijs te Makassar om een besluit als Directeur dezer inrichting, dat toen inspectie volgde door de Inspecteur Ondang van het Ministerie van Onderwijs te Makassar waarop hij nooit iets hoorde, dat hij enige tijd daarna weer verzocht om benoemingsbesluit en bezoldigingsbesluit waarop weer geen antwoord kwam, waarna nogmaals aangevraagd en nog geen antwoord binnen is gekomen; (Juiste data als bijvoegsel ingesloten)

dat hij sinds enige maanden geen distributie van sigaretten of sterke drank of textiel heeft gehad en dus deze goederen op de vrije markt tegen enorm hoge prijzen moet kopen;

dat hij ten einde raad zich tot Uwe Excellentie zelve wendt, omdat klachten bij andere instanties geuit niet gehoord schijnen te worden;

SIMPAN

TGL: 13.9.1950
BUNDEL: -19- 4

Surat dari P.H.J.M Theunissen kepada Presiden tentang pengangkatan PH YM Theunissen sebagai direktur sekolah menengah R.K Tomohon Makassar, 18 Juli 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 366

UNIVERSITAS



HASANUDDIN

Djalan Masjid Raja MAKASSAR Kawat : UNHAS

Perit. P.L. Mak.

No. : 2828/4I/57.

Makassar, 15 OKTOBER 1957.-

Lamp. : 1 (satu).-

Pribal : Laporan tahunan Universitas Hasanuddin.-

Kepada

Jth. P.J.M. Presiden R.I.

di D J A K A R T A.-

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan tahunan Universitas Hasanuddin tahun 1956/1957 untuk diketahui se-perluja.-



(Djokomarsaid Tirtodiningrat).-

Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233

TRANSLATION

nst.1658/58.

LECTURE BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT SUKARNO
TO PROFESSORS AND STUDENTS OF THE HASANUDDIN UNIVERSITY
AT MAKASAR, 31 OCTOBER 1958.

Ladies and Gentlemen, my friends,

I was requested to give a lecture to all of you, especially the students of the Hasanuddin University. You are all students of a University, and our Governments as well as the Indonesian society may well pose the following question: for what purpose do we give you a university education? Is it just to fill your minds with knowledge for the sake of knowledge alone? The answer is obviously : No. The Government and society provide you with higher education not only for the benefit of the students personally, but the knowledge thus required should be mainly used for the benefit of our country and people. This is especially true because we are now living in a period of reconstruction aiming at the just and prosperous society which will provide happiness for the whole of the Indonesian people from Sabang till Merauke.

I have said this before to two other Universities; the University of Indonesia in Djakarta and the Pedjadjaran University in Bandung. I stressed to the students of both Universities that science taught to them should be used in the first place in the service of public interest, in the service of the country and people. I urged the professors to give their students knowledge which is useful for development, scientific knowledge which is really serving the needs of society.

I pointed out to the undergraduates of the University of Indonesia and the Pedjadjaran University that in the 20th century it is no use to indulge in theories which are of no practical use for our country and our people.

For that reason I shall give a lecture tonight which is meant as an effort to give you a broader view and a better insight in recent developments, the knowledge of which may be used in our own interest.

In

Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 31 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No.929

AMANAT P.J.M. PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA PELANTIKAN
Sdr. ARNOLD MONONUTU SEBAGAI PRESIDEN UNIVERSITAS HASANUDDIN
(MAKASSAR) DAN PROF. Ir. OTONG KOSASIH SEBAGAI PRESIDEN
INSTITUT TEKNOLOGI (BANDUNG); ISTANA MERDEKA, 15 DJULI 1960.

Sdr. Arnold Mononutu dan Sdr. Otong Kosasih,

Saudara2 telah dengan resmi mengutjapkan sumpah untuk mendjalan-
kan pekerdjaan sebagai Presiden Universitas. Sdr. Arnold Mononutu se-
bagai Presiden Universitas Hasanuddin, Sdr. Otong Kosasih sebagai
Presiden Institut Teknologi di Bandung.

Sumpah jang Saudara2 batjakan djelas dan terang, maka sudah
barang tentu Saudara2 akan memenuhi apa jang Saudara2 telah ikrarkan
dalam sumpah itu. Didalam sumpah ini ada tertulis bahwa Saudara akan:
memadjukan ilmu pengetahuan sebagai perkembangan hikmah kebidjaksanaan
bangsa Indonesia. Saja menaruh tiga garis dibawah perkataan "Bangsa
Indonesia". Saudara tidak diminta untuk memadjukan ilmu pengetahuan
sebagai perkembangan hikmah kebidjaksanaan bangsa lain. Tidak! Seba-
gai perkembangan hikmah kebidjaksanaan bangsa Indonesia.

Sebagai Saudara mengetahui, maka negara kita adalah satu negara
jang specifiek mengandung sifat-sifat kepribadian bangsaja sendiri.
Negara Republik Indonesia adalah satu negara republik jang specifiek
mengandung sifat-sifat kepribadian bangsa Indonesia jang Saudara2
mengetahui, sifat2 kepribadian itu tersimpul dalam Pantjasila.
Ketuhanan jang Maha Esa, -- sebagai nomer satu --, perikemanusiaan,
kebangsaan, kedaulatan rakjat, keadilan sosial. Tetapi masing2 sila
inipun mengandung kepribadian bangsa Indonesia.

Kita mendjundjung tinggi dan mendasarkan diri kita atas sila
Ketuhanan jang Maha Esa, maka "begrip" kita daripada Ketuhanan jang
Maha Esa itupun satu hal jang specifiek mengandung kepribadian bangsa
Indonesia. Ketuhanan jang Maha Esa jang dapat mentjakup segala agama
jang berketuhanan di Indonesia ini, baik agama Islam maupun agama
Kristen atau Katholik, atau lain2.

Maka demikian pula sila jang kedua, kebangsaan. Djelas, djelas
sekali itu adalah kebangsaan Indonesia.

Peri kemanusiaan pun adalah perikemanusiaan Indonesia, peri kamanu-
siaan jang meliputi dari Indonesia kesoluruh pangkuan ibu dunia,
meliputi seluruh bangsa2 didunia, oleh karena itu maka Republik
Indonesia selalu mentjari persahabatan, kerdja sama, dengan bangsa2
lain didunia ini, dibawah kolong langit manapun mereka berada.

Sila kedaulatan rakjat inipun membawa kepribadian bangsa Indo-
nesia. Sudah sering saja djelaskan dimana-mana bahwa kedaulatan
rakjat jang kita kehendaki adalah kedaulatan rakjat Indonesia, bukan
kedaulatan rakjat à la Eropa Barat, jang terkenal dengan nama demo-
krasi parlementer; bukan kedaulatan rakjat jang terkenal dengan nama
politik liberalisme; bukan kedaulatan rakjat jang berupa pula

ekonomis

Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold
Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin dan Ir. Otong Kosasih
sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, 15 Juli 1960.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno No. 197

BELUM DIKOREKSI

nst.19/8/60.-

AMANAT P.J.M. PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA PELANTIKAN
Sdr. ARNOLD MONONUTU SEBAGAI PRESIDEN UNIVERSITAS HASANUDDIN
(MAKASSAR) DAN PROF. Ir. OTONG KOSASIH SEBAGAI PRESIDEN
INSTITUT TEKNOLOGI (BANDUNG); ISTANA MERDEKA, 15 JULI 1960.

Sdr. Arnold Mononutu dan Sdr. Otong Kosasih,

Saudara2 telah dengan resmi mengutjapkan sumpah untuk mendjalankan pekerjaan sebagai Presiden Universitas. Sdr. Arnold Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin, Sdr. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi di Bandung.

Sumpah jang Saudara2 batjakan djelas dan terang, maka sudah barang tentu Saudara2 akan memenuhi apa jang Saudara2 telah ikrarkan dalam sumpah itu. Didalam sumpah ini ada tertulis bahwa Saudara akan memadjukan ilmu pengetahuan sebagai perkembangan hikmah kebidjaksanaan bangsa Indonesia. Saja menaruh tiga garis dibawah perkataan "Bangsa Indonesia". Saudara tidak diminta untuk memadjukan ilmu pengetahuan sebagai perkembangan hikmah kebidjaksanaan bangsa lain. Tidak! Sebagai perkembangan hikmah kebidjaksanaan bangsa Indonesia.

Sebagai Saudara mengetahui, maka negara kita adalah satu negara jang spesifik mengandung sifat-sifat kepribadian bangsaja sendiri. Negara Republik Indonesia adalah satu negara republik jang spesifik mengandung sifat-sifat kepribadian bangsa Indonesia jang Saudara2 mengetahui, sifat2 kepribadian itu tersimpul dalam Pantjasila. Ketuhanan jang Maha Esa, -- sebagai nomor satu --, perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakjat, keadilan sosial. Tetapi masing2 sila inipun mengandung kepribadian bangsa Indonesia.

Kita mendjundjung tinggi dan mendasarkan diri kita atas sila Ketuhanan jang Maha Esa, maka "begrip" kita daripada Ketuhanan jang Maha Esa itupun satu hal jang spesifik mengandung kepribadian bangsa Indonesia. Ketuhanan jang Maha Esa jang dapat mentjakup segala agama jang berketuhanan di Indonesia ini, baik agama Islam maupun agama Kristen atau Katholik, atau lain2.

Maka demikian pula sila jang kedua, kebangsaan. Djelas, djelas sekali itu adalah kebangsaan Indonesia.

Peri kemanusiaan pun adalah perikemanusiaan Indonesia, peri kemanusiaan jang meliputi dari Indonesia keseluruh pangkuan ibu dunia, meliputi seluruh bangsa2 didunia, oleh karena itu maka Republik Indonesia selalu mentjari persahabatan, keridja sama, dengan bangsa2 lain didunia ini, dibawah kolong langit manapun mereka berada.

Sila kedaulatan rakjat inipun membawa kepribadian bangsa Indonesia. Sudah sering saja djelaskan dimana-mana bahwa kedaulatan rakjat jang kita kehondaki adalah kedaulatan rakjat Indonesia, bukan kedaulatan rakjat à la Eropa Barat, jang terkenal dengan nama demokrasi parlementer; bukan kedaulatan rakjat jang terkenal dengan nama politik liberalisme; bukan kedaulatan rakjat jang berupa pula

ekonomis

Bagian awal Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Sdr. Arnold Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Prof. Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, di Istana Merdeka, 15 Juli 1960.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 197



nst.353/62-.

TJERAMAH PJM PRESIDEN SUKARNO DIHADAPAN PARA MAHASISWA, PARA UNDANGAN SIPIL DAN MILITER DI GEDUNG OLAH RAGA MAKASSAR, 7 DJANUARI 1962.

Saudara-Saudara sekalian,

Lebih dulu saja mengutjapkan pujian atas kerdja pekerdja-pekerdja jang menjediakan tempat tjeramah ini. Indah permai, tjantik.

Saja tidak tahu jang bekerdja mati-matian untuk membuat tjeramah ini demikian bagusnja, tetapi terimalah saja punja utjapan terima kasih ini jang keluar dari hati jang ichles.

Saja diminta untuk membuat tjeramah. Ja, tentang apa?

Oo ja, lebih dahulu saja mengutjap terima kasih atas tanda mata jang diberikan oleh rakjat Sulawesi Selatan kepada saja, kepada kawan-kawan Menteri, kepada Duta-Duta Besar, kepada Gherman Stepanovich Titov. Terima kasih saja sampaikan atas pemberian itu, moga-moga mendjadi kenang-kenangan jang sebaik-baiknja.

Tjeramah, ini adalah sebenarnja satu tjeramah terhadap kepada mahasiswa-mahasiswa.

Ja, ada pedjabat-pedjabat, ada Perwira-Perwira, tetapi pada pokoknja mahasiswa-mahasiswa.

Saja mendengarkan tjeramah dari Pak Ruslan Abdulgani, maka amat tertarik sekali hati saja untuk melandjutkan apa jang diberikan oleh Pak Ruslan Abdulgani kepada saudara-saudara. Dan kebetulan saja mengantongi beberapa tjatatan.

Tjatatan utjapan-utjapan dari Menteri Luar Negeri Luns, jang sebetulnja tidak perlu terlalu saja ladeni. Tetapi oleh karena saja berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa, baiklah saja beri uraian kepada mahasiswa-mahasiswa tentang salahnja, bohongnja apa jang dikatakan oleh Luns itu.

Begini saudara-saudara, Luns itu selalu mondar mandir dari negeri Belanda ke Amerika Serikat, pulang ke negeri Belanda, pergi Amerika Serikat, pulang kenegeri Belanda, pergi ke Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat dia pernah — katanja — di internieuw oleh sadjalah imperialis-kapitalis jang bernama "United States News and World Report".

Saja sendiri kalau membatja "United States News and World Report" itu, dan tiap-tiap kali saja membatja saja djengkel, saudara-saudara. Sehingga achirnja boleh dikatakan tidak pernah saja batja lagi. Sebab keterlaluhan "United States News and World Report" itu. Terlalu mentjer-tja kepada orang-orang pemimpin-pemimpin Asia, pemimpin-pemimpin Afrika, pemimpin-pemimpin Komunis, pemimpin-pemimpin Indonesia dan lain-lain sebagainja.

Nah, internieuw Luns kepada "United States News and World Report" itu, saja tidak tahu apakah benar-benar interview ataukah, jah apa itu,

"doorgeestoken kaart"

Pidato Presiden di hadapan Mahasiswa, Sipil dan Militer di Gedung Universitas Hasanuddin Makassar, 7 Januari 1962.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 362



Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962.

Sumber: ANRI, Deppen RI No. 62-7336



Saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharno sedang memberikan ucapan selamat kepada Presiden Soekarno, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16950.



Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16947

BELUM DIKOREKSI

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA PEMBERIAN GELAR DOCTOR HONORIS CAUSA DALAM ILMU POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA DARI UNIVERSITAS HASSANUDDIN KEPADA PJM PRESIDEN SUKARNO, MAKASSAR, 29 APRIL 1963.

Saudara-Saudara sekalian,

Buat kesekian kalinya dalam hidup saja ini, saja dianugerahi oleh sesuatu Universitas gelar Doctor Honoris Causa. Ini kali oleh Universitas Hassanuddin. Saja terima penganugerahan Doctor Honoris Causa itu dengan mengutjap banjak-banjak terima kasih.

Tatkala Presiden Universitas Bapak Arnold Mononutu beberapa detik jang lalu menjerahkan piagam kepada saja, demikian pula kalung rantai emas jang terbuat dari emas Kendari, ukiran Kendari, beliau berkata kepada saja jang saudara-saudara tidak mendengar. Moga-moga Bung Karno tetap Bung Karno. Moga-moga Bung Karno tetap berdjoang untuk kepentingan bangsa dan peri-kemanusiaan. Itu diutjapkan oleh Presiden Universitas pada waktu menjerahkan piagam kepada saja dan kalung emas. Dan benar-benar mana jang lebih mengharukan kepada saja, apakah gelar Doctor Honoris Causa ini, ataukah doa harapan Sdr. Arnold Mononutu, moga-moga Bung Karno tetap Bung Karno, moga-moga Bung Karno berdjoang untuk kepentingan bangsa dan peri-kemanusiaan.

Sebab, sungguh saudara-saudara, harapan jang diutjapkan oleh Presiden Mononutu, kamu mahasiswa mahasiswi sekalian barangkali sebagai saja menjebut beliau "Oom No", melukiskan satu anggapan jang tinggi sekali dari beliau terhadap kepada diri saja. Moga-moga Bung Karno tetap Bung Karno. Artinja beliau menganggap Bung Karno itu seseorang jang, katakanlah, istimewa. Moga-moga Bung Karno tetap berdjoang untuk kepentingan bangsa dan peri-kemanusiaan. Artinja bahwa beliau amat menghargai perdjongan saja untuk kepentingan bangsa dan peri-kemanusiaan. Harapan-harapan jang demikian itu saudara-saudara, amat mengharukan kepada saja. Dan saja disini mendjawab, moga-moga Tuhan Jang Maha Esa tetap memberi kepada saja taufik dan hidajat untuk berdjoang terus bersama-sama dengan rakjat untuk kepentingan bangsa dan tanah air.

Saudara-Saudara, saja tadi katakan, bahwa ini adalah kesekian kalinya jang sesuatu Universitas menganugerahkan gelar doctor honoris causa kepada saja.

Tempo hari Universitas Indonesia di Djakarta memberikan gelar doctor honoris causa, dan waktu itu adalah ke-19 kalinya saja menerima gelar doctor honoris causa.

Sekarang ditambah satu lagi, mendjadi ke-20 kalinya. Barangkali ada baiknya saja batjakan sebentar kepada saudara-saudara Universitas-Universitas mana telah memberi gelar doctor honoris causa kepada saja. Dan lantes saja tjeritakan sedikit perbedaan tjara pemberian gelar doctor honoris causa itu diantara Universitas-Universitas itu.

Saudara-Saudara, saja disini ada tjatatan. Gelar doctor honoris causa pertama diberikan kepadaku oleh Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta.

Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden 1950-1959 No. 485

No. : 13110/UP/II/64.-

Ruslan
KUTIPAN : surat Keputusan Menteri Perguruan
Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Republik Indonesia.
Djakarta. 31 Desember 1964.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA : d.s.b. ;
MENIMBANG : d.s.b. ;
MENGINGAT : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa Dr Ruslan Abdul Gani, Menko Perhubungan dengan
Rakjat disamping djabatannja jang tersebut diatas, terhitung mulai tanggal:

1 - SEPTEMBER - 1964

untuk tahun kuliah 1964/1965 diangkat sebagai Guru Besar luar biasa dalam
mata peladjaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Ha-
samuddin di Makassar, dan kepada beliau diberikan uang tundjangan sebagai-
mana ditetapkan dalam daftar lampiran surat putusan Menteri Perguruan Tinggi
dan Ilmu Pengetahuan tanggal 19 Mei 1963 No. 4551/UP/IV/63 kategori 1-a;

dengan ketentuan, bahwa:

- a. djumlah djam mengadjar dalam seminggu akan ditehtukan kemudian oleh
Rektor/Dekan Fakultas jang bersangkutan;
- b. djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal
ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinja.-

Kutipan : d.s.b. ;

af.
Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,

dr. Sarif Thajeb
Brig. Djen. TNI.

Kepada jth. :
Dr. Ruslan Abdul Gani
d/a. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
di-
MAKASSAR.-

Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani (Menko Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 31 Desember 1964.

Sumber: ANRI, Roeslan Abdul Gani No. 1372



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0235 /U/1977

tentang

Pengesahan Statuta Universitas Hasanuddin.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1977 No. 046a/U/1977, dipandang perlu mengesahkan Statuta Universitas Hasanuddin.

Mengingat : a. Undang-undang No. 22 tahun 1961 ;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 9 tahun 1973 ;

2. No. 6/M tahun 1974 ;

3. No. 44 tahun 1974 ;

4. No. 45 tahun 1974 ;

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;

2. tanggal 1 Maret 1977 No. 046a/U/1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Statuta Universitas Hasanuddin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 1 Juli 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sjarif Thajeb

(Sjarif Thajeb).-

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tentang Pengesahan Statua Universitas Hasanuddin, 1 Juli 1977.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0235/U/1977



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0154/O/1983

tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 telah ditetapkan Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hal tersebut pada sub a, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979 dan No. 0222a/O/1980 sampai dengan No. 0222h/O/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-917/I/MENPAN/10/82 tanggal 9 Oktober 1982 dan Nomor B-236/I/MENPAN/2/83 tanggal 28 Februari 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HASANUDDIN.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Hasanuddin selanjutnya dalam keputusan ini disebut Unhas adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0154/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hasanuddin, 5 Maret 1983.

Sumber: ANRI, *Kepmendiknas RI No. 0154/o/1983*



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0398 /0/1988

tentang

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BHINEKA TUNGGAL IKA DI UJUNG PANDANG MENJADI SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI YAYASAN PENDIDIKAN BONGAYA MAKASSAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Mei 1988 No. 925/d/T/1988, Perihal : Mohon persetujuan dan penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang status perguruan tinggi swasta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan, dipandang perlu merubah bentuk dan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Bhineka Tunggal Ika di Ujung Pandang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bongaya Ujung Pandang di Ujung Pandang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Bongaya Makassar di Ujung Pandang ;
- b. bahwa perubahan bentuk dan nama tersebut pada sub a di atas, merupakan penyesuaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Bongaya Makassar di Ujung Pandang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 23 Tahun 1959 ;
- b. No. 14 Tahun 1965 ;
- c. No. 5 Tahun 1980 ;
- d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. No. 44 Tahun 1974 ;
- b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1987 ;
- c. No. 226/M Tahun 1987 ;
- d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
- b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
- c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;
- d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/O/1982 ;
- e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
- f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
- g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
- h. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
- i. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
- j. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
- k. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
- l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

6.

Perubahan bentuk dan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Bhineka Tunggal Ika di Ujung Pandang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Bongaya Makassar, 19 Agustus 1988.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0398/0/1988

DJENDERAL TNI SOEHARTO
KETUA PRESIDUM KABINET AMPERA R.I.

SAMBUTAN : BAPAK DJENDRAL SOEHARTO KETUA PRESIDUM
KABINET AMPERA PADA KONGRES NASIONAL KE II
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA - TANGGAL
8 DESEMBER 1966.

Assalamu'alaikum W.W.

Saudara2 peserta kongres serta hadirin dan hadirat sekalian
jang terhormat.

Pada saat ini dalam rangka Kongres Nasional ke II Serikat Maha-
siswa Muslimin Indonesia jang diselenggarakan dikota Makassar ini, saja
akan menjampaikan beberapa pokok pikiran sesuai dengan thema "Konsoli-
dasi Perdjoangan SEMMI didalam memenangkan Orde Baru".
Dengan ini akan terpenuhilah harapan Saudara2, dimana saja diminta un-
tuk memberikan kata sambutan dalam kongres jang meriah ini.

Saudara2 sekalian.

Saja dapat menjatakan disini, bahwa saja tak ragu2 terhadap per-
djoangan SEMMI selama ini, karena SEMMI adalah partner dalam memperkuat
barisan Orde Baru.

Perdjoangan SEMMI semasa Orde Lama, dimana semua perdjoangan pemuda,
peladjar dan mahasiswa didominasi oleh mantel2 organisasi dari PKI,
sungguh2 sangat berat, karena musuh2 agama itu selalu berusaha hendak
menghantarkan dan melenjapkan lawan2aja satu demi satu.

Sjukur alhamdulillah SEMMI dapat bertahan terus dengan penuh kegigihan,
walaupun selalu dalam keadaan terantjam.

Sekarang SEMMI telah ikut serta ber-sama2 dengan partner2 lainaja mem-
bina Orde Baru.

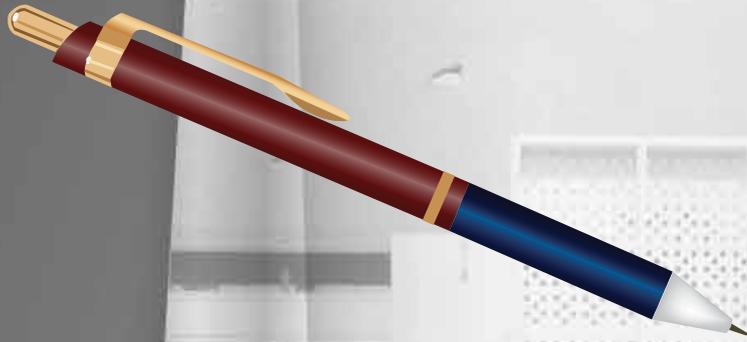
Sangat banyak jang harus kita fikirkan, persiapkan dan korbankan untuk
melaksanakan pembinaan Orde Baru tersebut.

Para pemuda, peladjar atau mahasiswa jang tergabung dalam sebuah organi-
sasi harus selalu menjadari fungsi dan posisinya sebagai golongan pe-
muda peladjar atau mahasiswa. Organisasi tersebut harus selalu disem-
purnakan agar tetap mempunjai kemampuan untuk terus berorganisasi, be-
kerdja-sama dan bertoleransi dengan organisasi2 pemuda peladjar atau
mahasiswa lainaja jang termasuk Orde Baru. Dengan demikian akan ter-
djalinlah persatuan dan kesatuan kesadaran dan pendapat atau pengertian
didalam pelaksanaan fungsi dan posisi ke pemudaan atau kemahasiswaan.

Kesemuaja itu.....

Fragmen sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Kongres Nasional
ke II Serikat Mahasiswa Indonesia di Makassar, 8 Desember 1966.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Suharto No. 9984



OLAHRAGA DAN KESEHATAN



Fasilitas untuk urusan kesehatan di daerah Makassar sejak tahun 1950-an sudah memadai. Tahun 1952 sudah ada Rumah Sakit Kusta Jongaya di Makassar, dimana pada tanggal 1 November 1952 telah dibuka pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta. Begitupun dalam upaya memberantas penyakit TBC, telah dilakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat pada tanggal 26 Agustus 1954 di Kota Makassar. Fasilitas obat-obatan sudah tersedia lengkap, hal ini bisa terlihat dari apotik-apotik yang sudah ada sejak tahun 1930, diantaranya Apotik Rumah Sakit Militer di Makassar.

Dalam bidang Olahraga sejak Septemer 1957, di Makassar telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional IV di Gedung Stadion Makassar. Begitupun prestasi dalam Olahraga Sepakbola sudah menuai prestasi. Pada tahun 1959 Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) sebagai Juara Nasional Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).



Bagian dalam apotik Rumah Sakit Militer di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 780/78



Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1950.

Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 128



Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 1952.

Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 7784



Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC di Makassar,
Sulawesi Selatan, 26 Agustus 1954.

Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 10149



Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV di Stadion Makassar, Sulawesi Selatan, 28 September 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 570928 RR 2-3



Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 September 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 570930 RR 2-1





Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah ditolong oleh para juri, 1 Oktober 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 571001 RR 1-34



Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari 800 meter putera pada Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1957.

Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 1-3



Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 10 September 1959.

Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 15547



TRANSPORTASI
DAN
KOMUNIKASI



Pelabuhan Makassar sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/perdagangan di Indonesia Bagian Timur sejak masa Kolonial. Kapal laut merupakan salahsatu sarana transportasi utama sejak masa Kerajaan Makassar sampai saat ini dalam melakukan pelayaran dan perniagaan ke beberapa daerah dan negara. Selain itu, kapal motor dan perahu layar sebagai sarana transportasi laut yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi ke beberapa daerah di sekitar Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Pada tahun 1930-an, kerbau digunakan sebagai alat transportasi darat di Makassar, selanjutnya becak dan sepeda merupakan alat transportasi murah yang digunakan masyarakat Makassar sejak tahun 1950-an hingga sekarang.

Untuk kebutuhan komunikasi sejak tahun 1930 sudah didirikan Kantor Pos dan Telegraf di Makassar, mengingat posisi Makassar sebagai daerah yang sangat penting di Indonesia Bagian Timur.

HAVEN VAN MAKASSAR.

Makassar, den 6en Februari 1919.

No. 169/11 HW.

Bijlagen: 1 in duplo.

Bezoldiging van klerken en bedienden personeel voor het
Jaar 1919.

Naar aanleiding van Uw schrijven ddo. 21 Januari jl.
No. 182/H, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hierbij aan te
bieden eene begrooting voor bezoldiging van klerken en be-
dienden personeel alsmede voor schrijffloonen voor het loo-
pende dienstjaar, opgemaakt naar de aanwijzingen voorkomende
in Uw bevenaangehaald schrijven.-

De Hoofdingenieur,
tjd. Directeur der haven van Makassar,

M. J. ...

Aan
den Directeur der
Burgerlijke Openbare Werken.
Weltevreden.

Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur *Burgerlijke Openbare Werken* tentang rencana pemberian kenaikan gaji untuk juru tulis dan pegawai bantu untuk tahun anggaran 1919.

Sumber: ANRI, BOW No. 1424

20^{te} Duwandi afd. H. geronden -
HAVEN VAN MAKASSAR.

Slag 4213-29/10-19
Makassar, den 20^{den} October 1919

N^o 1766/19 HW

Bijlagen: -

Handwritten: Handwritten 11/10
acc. p. 10/10

Handwritten: 7030 / 316/19

Verhuur, verkoop haventerreinen.

Handwritten: luy

In antwoord op Uw schrijven van 8 dezer No. 2550/H wordt U Hoog-
dat EdGestr. beleefd medegedeeld, een verhuur van gronden, als hier bedoeld,
afhankelijk is te stellen van een eventueelen niet-verkoop van deze terreinen
aan belanghebbenden, eigenaars van perceelen, gelegen aan de Passerstraat,
die hierop kunnen reflecteeren voor de vergrooting hunner terreinen, terwijl
bovenbedoelde gronden ook kunnen worden aangewend bij omruil van terreinen
voor aanleg van wegen of anderszins.

Aangezien de Commissie van Bijstand heeft geadviseerd den uitersten
datum van verstijking van de termijn, waarin rechten van vermeende preferentie
mogen worden uitgeoefend, vast te stellen op 31 December 1919, kan, behoudens
andere inzichten of een anderszuidende beschikking Uwerzijds, deze aangelegen-
heid niet vóór gemelden datum worden afgehandeld.

Gaarne verneem ik of U zich hiermede kunt vereenigen.-

Handwritten: acc.

Alle inkomende huur of koopsaanvragen voor buitenterrein, gelegen meer
zuidelijk van het havenemplacement worden thans bijeen gezameld, en zullen U,
overeenkomstig mijn schrijven van 1 October j.l. No 1655/19 HW in ééns ter
afdoening worden aangeboden, waardoor niet alleen het verrichten van een massa
overbodig werk wordt vermeden, doch tevens een beter overzicht over de geheele
situatie wordt verkregen.-

Handwritten: 24/10/19
Handwritten signature/initials

Handwritten: Het is niet mogelijk om te werken met een
7. duizend met een
12/4/19

De Hoofdingenieur
Directeur der Haven van
Makassar:

Handwritten signature: M. Stuyvenberg

Aan
den DIRECTEUR der
BURGELIJKE OPENBARE WERKEN
Afdeling H.
W E L T V R E D E N

2279
4-11

Surat dari direktur pelabuhan Makassar kepada Direktur *Burgerlijke Openbare Werken Afdeling H* di Weltevreden tentang penyewaan lahan pelabuhan dan pernyataan bahwa lahan pelabuhan tidak dapat dibeli, 20 Oktober 1919.

Sumber: ANRI, BOW No. 1422

HAVEN VAN MAKASSAR

Makassar, den 26 Augustus 1924.

No. 708/H.

Bijlagen: 1

Onderwerp: Omtrent de administratie van aangeschafte en verstrekte artikelen (magazijnsgoederen) bij het bedrijf der haven van Makassar.-

DEPT. II. D. W.
Ag. 4069-5/1924
Ontv. 5-9

Bij U hiernevens in afschrift aangeboden schrijven van de afdeling C. van Uw Departement, worden inlichtingen omtrent het magazijn gevraagd.

Waar sinds jaren het magazijn buiten de exploitatie gehouden is, zoals U maandelijks uit de U toezonden journalen en proefbalansen gebleken zal zijn, neem ik beleefd de vrijheid U te vragen of deze kwestie door afdeling H. met afdeling C. in behandeling genomen kan worden en met verzoek mij daarna van de noodige instructies te willen voorzien.

Ik teeken hierbij aan, dat er van de aangeschafte artikelen en de gedane verstrekkingen volledige administratie en controlestelsel middels kaartensysteem aangaande het magazijn te mijnen kantore aangehouden worden.

De inkoopsprijs wordt verhoogd met 5% waarvan de ontvangsten ten bate van het magazijn geboekt zijn ter betaling van diverse magazijnsonkosten.

Eventuele tekorten worden aan het einde van elk jaar overeenkomstig Uw schrijven ddo. 8 Februari 1924 No: 510/H over de verschillende bedrijfsonderdeelen verdeeld. Het hoogste bedrag, dat verdeeld is moeten worden heeft f.40.- bedragen. Een inventaris is uiteraard aanwezig en wel in dusdanigen vorm, dat op elk moment de stand van de goederen bekend is.

V.3691/1924

Alon

Ik vestig Uw aandacht erop, dat ongerekend de steen uit de steengroeve,

Het Hoofd van
afdeeling Havenwezen
te WELTEVREDEN.

HOOFDB: II. W.
Ag. 5227/16
Ontv. 5-24

V. D. 191-1-20

Surat dari Sekretaris Pelabuhan Makassar kepada Kepala Bagian Pelabuhan di weltevreden tentang sistem administrasi suplai barang masuk dan keluar di kantor pelabuhan Makassar, 26 Agustus 1924.

Sumber: ANRI, BOW No. 3699



Kedatangan Presiden pos Indonesia di Mandar Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/36





Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/17



Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai salah satu alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 674/78



Kantor pos dan telegrap di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/29



Kapal Motor "Bango" sebagai salah satu alat transportasi laut di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Desember 1952.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M.7876



Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar yang akan memuat rotan, 12 Agustus 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 5



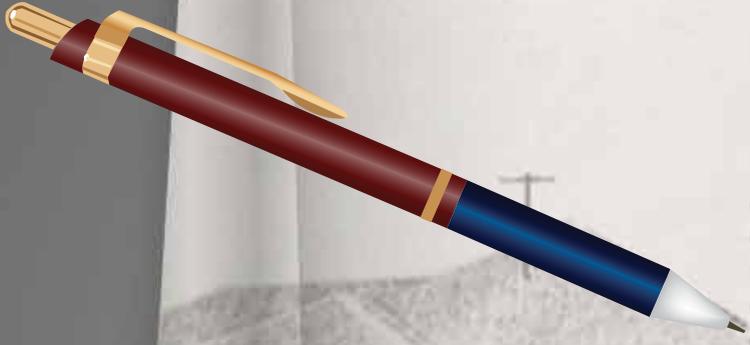
Lalu lintas di Kota Makassar dan beca sebagai salah satu alat transportasi yang murah, 8 Oktober 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. K531008 RR 3-3

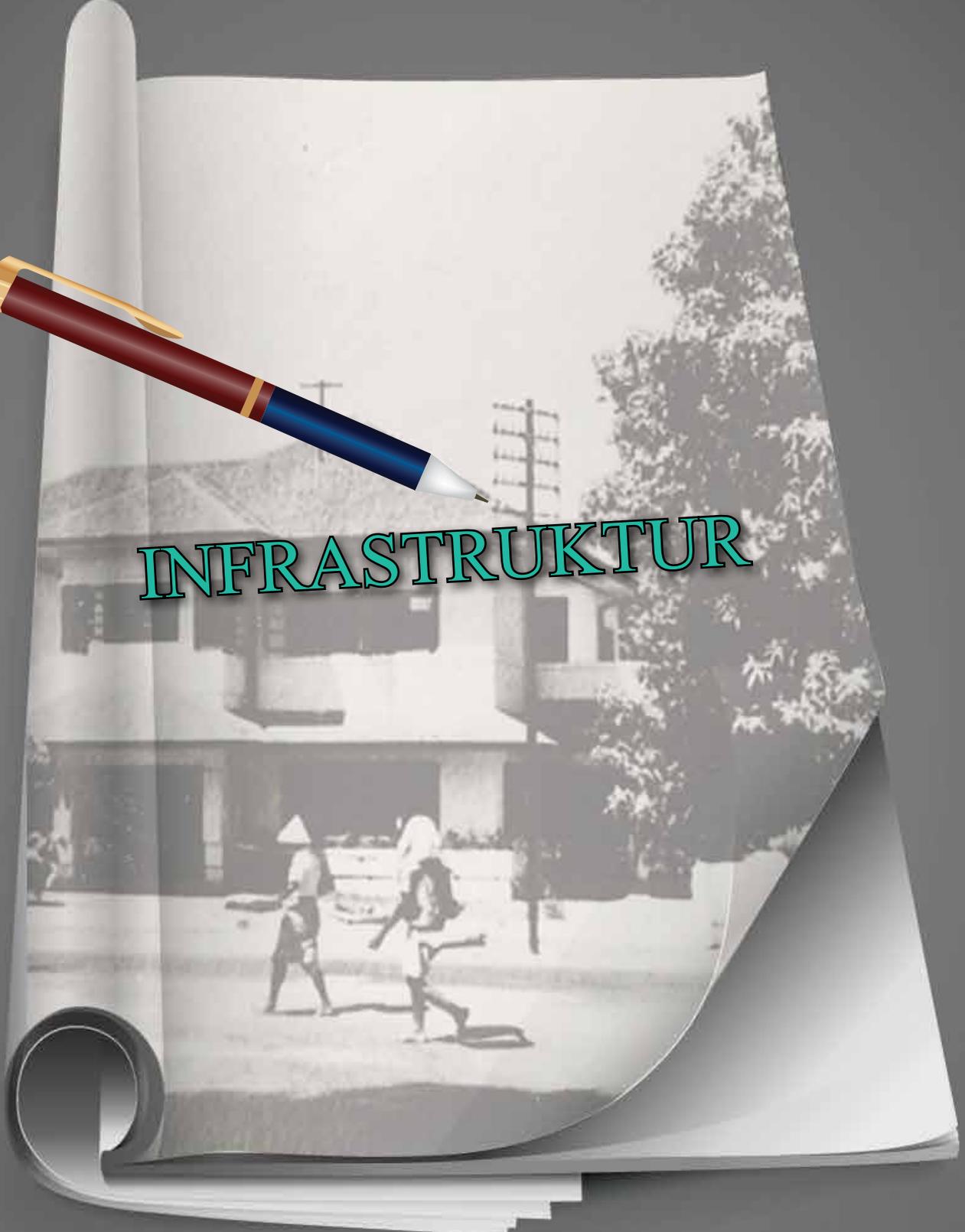


Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. K 531126 RR 1-9



INFRASTRUKTUR



Ketika Makassar berada dalam pengawasan Kerajaan Makassar, pertumbuhan perdagangan Makassar menampilkan kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa. Sejak permulaan abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 di Makassar telah bermukim bermacam-macam suku bangsa dari berbagai tempat dan budaya. Karakteristik Kota Makassar sebagai tipologi Kota Pelabuhan karena sejak awal pertumbuhannya dipengaruhi aktifitas pelayaran laut dan perdagangan. Pembentukan wilayah Kota Makassar mengikuti bentuk geografis sosial-kemaritiman. Hal ini bisa terlihat dengan tumbuhnya berbagai bangunan fisik dari struktur kota seperti istana raja, benteng, tempat ibadah, pasar, bangunan rumah pendatang asing di sekitar bandar. Pada tahun 1922 telah dibangun dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar. Begitupun pada tahun 1930-an di Makassar telah ada Hotel Oranye, Areal Perkumpulan Olah Raga Layar, Kantor Pos, Menara Air untuk menyediakan fasilitas air bersih, Gedung *Raad van Justitie*, Penjara, Gedung Gedung *Gemeente Huis*, Gedung Dewan, Rumah Gubernur, Gedung Kementerian Keuangan di Wilayah Indonesia Timur, fasilitas komunikasi seperti Stasiun Radio Zending di Makassar serta beberapa fasilitas infrastruktur jalan di Kota Makassar.



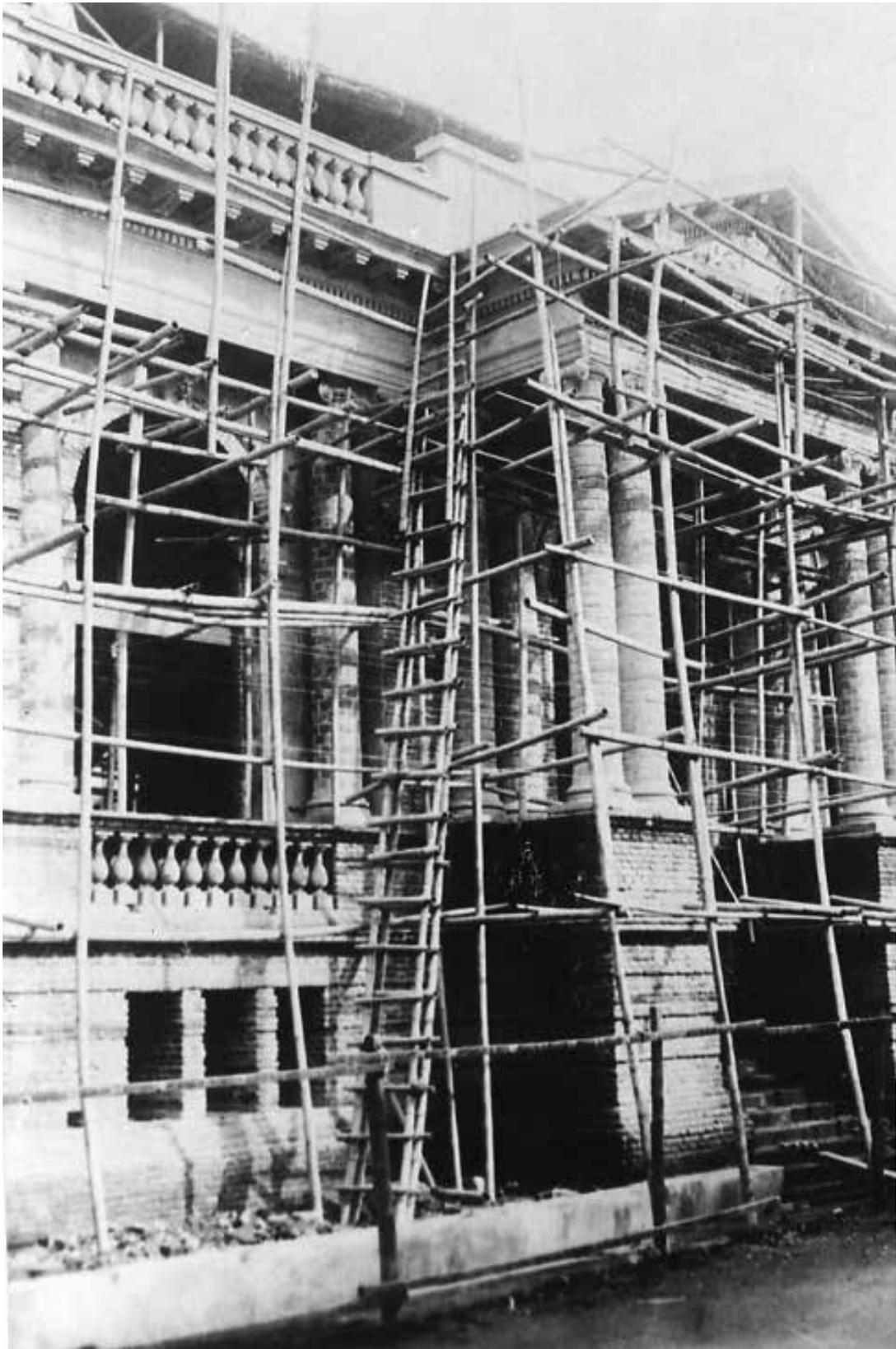
Pintu Utama Benteng Amsterdam, Makassar Sulawesi Utara, 1703.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 345/75



Jalan Lama menuju kandang kuda, Makassar, Sulawesi Selatan, 1901.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 54/53



Pembangunan dan perbaikan gedung Bank Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, 1910.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/25

HAVEN VAN MAKASSAR

No. 830/17. H.H.

Handwritten: 10895/16
Makassar, den 26 Mei 1922.-

Bijlagen: 10

DEPT. B.O.W.
Ag. 27222-3-22
Okt 3-6

HC-FDB: H. W.
Ag. 2842/H
Ontv. 9/6-22

Handwritten notes:
Keel 2
10/10/22
11/16
1/16

Ik heb de eer UEdG hiernaevens aan te bieden het proces-verbaal van opneming in tweevoud van de ondervolgende werken:

- 1 De overneming van de firma L.de Groot te Makassar, zoomede het vervoer en de opstelling van een 3 tons verplaatsbare stoomkraan, toegestaan bij G.B. ddo.15 Januari 1919 No. 58.
- 2 Het verrichten van zware herstellingen aan den aanlegsteiger te Makassar, toegestaan bij G.B. ddo. 12 September 1919 No. 12.
- 3 Het bestraten met bergsteentegels van het haventerrein, gelegen tusschen de kade en de hangars en het aanbrengen van betondekzerken op den stapelmuur van het oude haven-emplacement te Makassar, toegestaan bij G.B. ddo. 10 November 1920 No.30 en 22 Februari 1921 No. 49.
- 4 Het maken van een golfbreker over de koraalbarken Groot en Klein Lae-Lae, toegestaan bij G.B. ddo.17 Januari 1919 No. 20 en 19 Juli 1920 No. 72.
- 5 Het verrichten van zware herstellingen aan het remmingwerk bij den aanlegsteiger in de haven van Makassar, toegestaan bij G.B. van 27 September 1917 No.36.-

Handwritten: 10/10/22

M.d.d.d.g.

Handwritten: De Directeur der Haven,

Memens dezen:

De Secretaris,

Handwritten signature: B. J. A. Soeryo

Handwritten: Aan

den Directeur der Burgerlijke
Openbare Werken
te

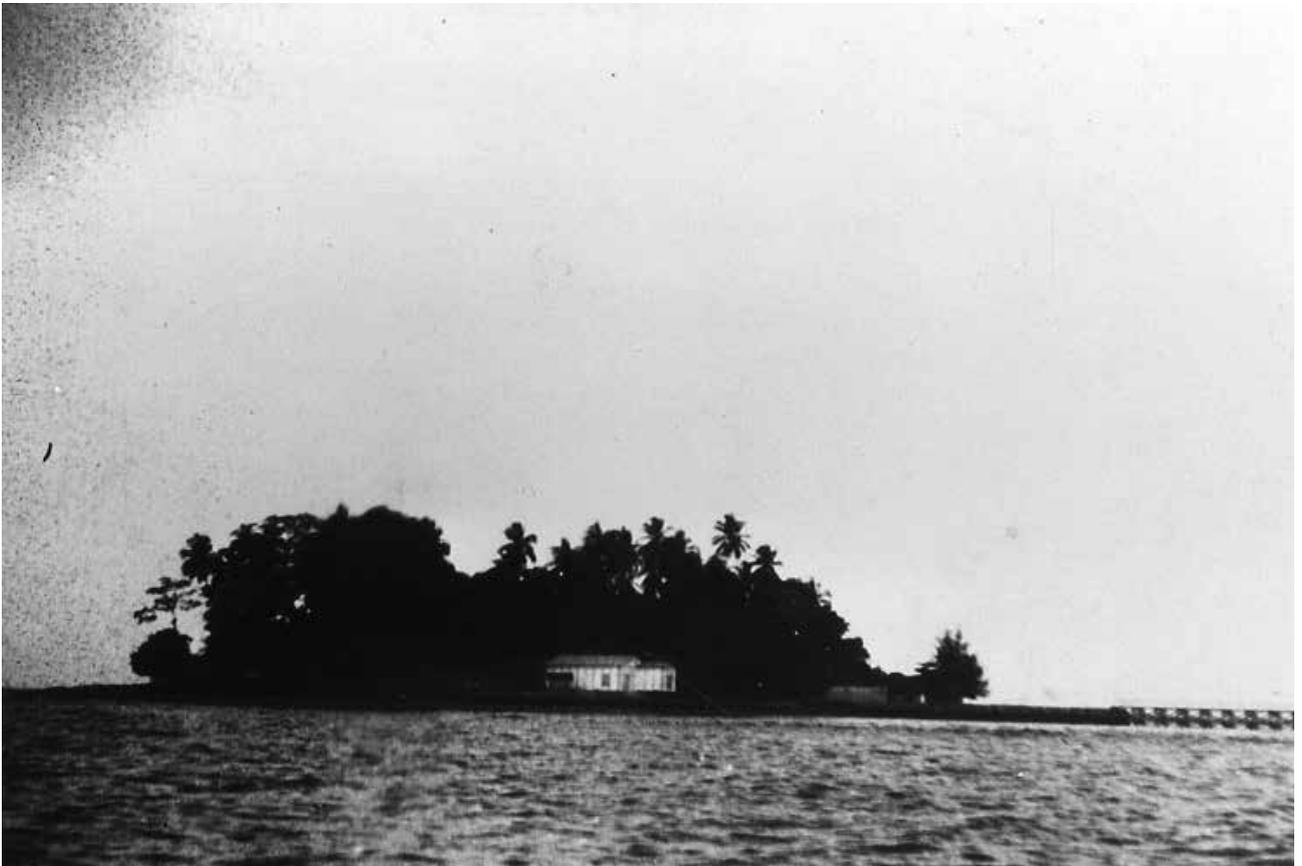
WELTEVREDEN

H

V. U. 191-1-20

Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur BOW di Weltevreden antara lain mengenai pembangunan lahan milik pelabuhan dengan tegel bebatuan antara dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar, 26 Mei 1922.

Sumber: ANRI, BOW No. 2657



Pusat Karantina tua, Samalone, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 140/9



Raadhuiz (gedung dewan) dekat kastil Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/78



Menara pengawas dekat Benteng Rotterdam, Makassar,
Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/10



Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/18



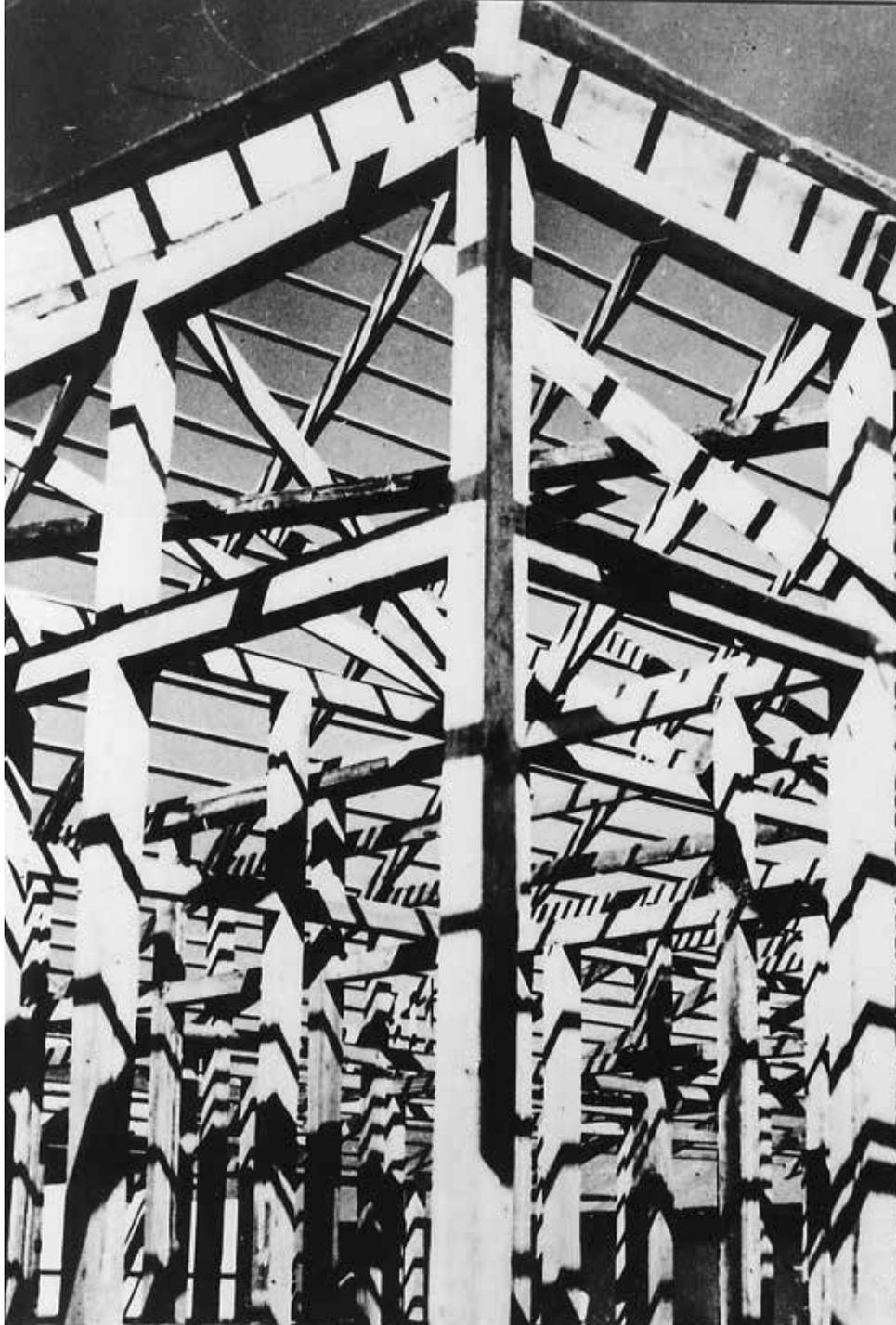
Ruang depan sebuah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/6



Pemandangan depan sebuah rumah tempat tinggal,
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/68



Tiang-Tiang Kerangka Bangun Rumah, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 743/28



Rumah Orang Bugis di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/1



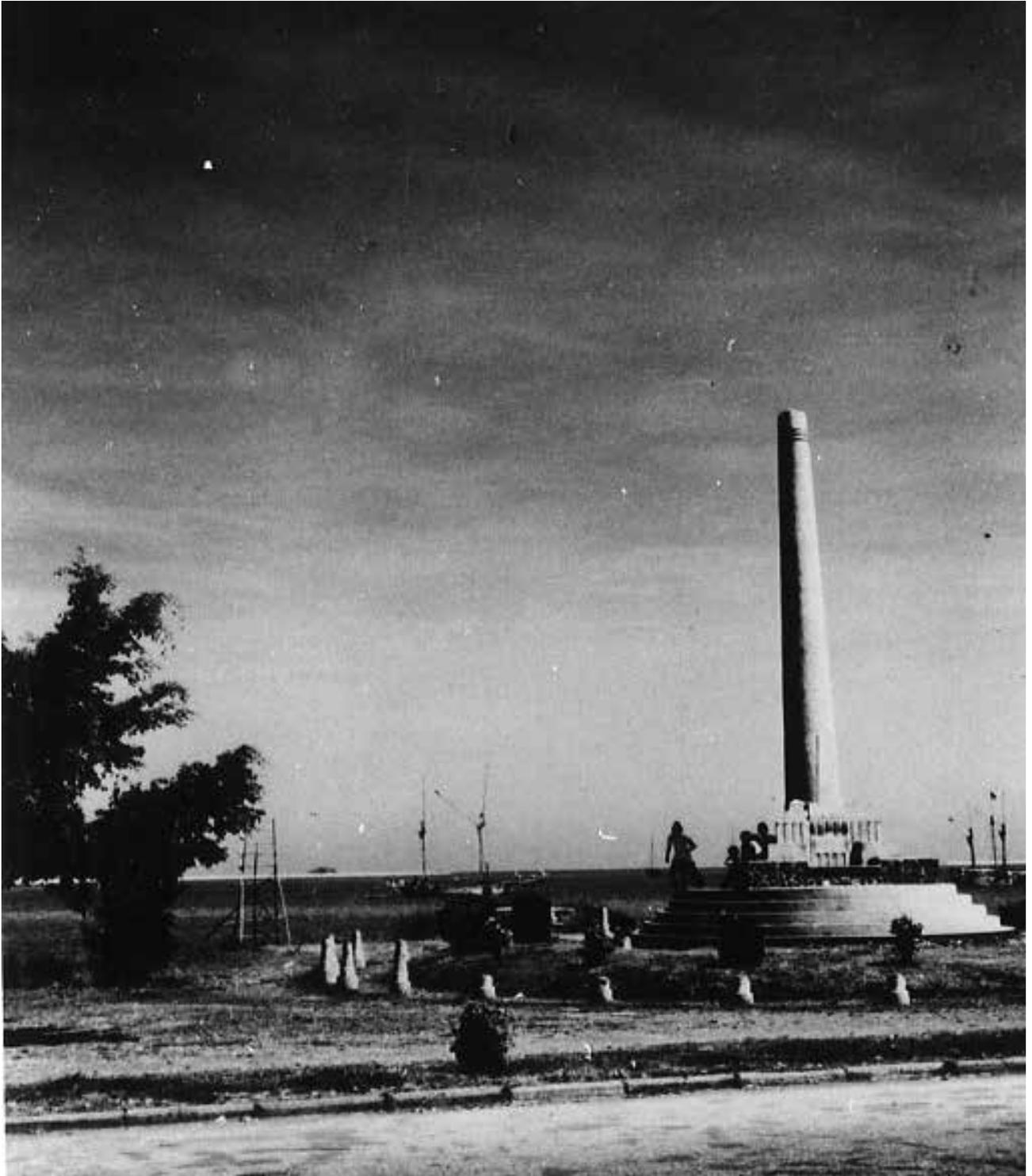
Stasiun Radio Zending di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/81



Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 775/83



Monumen kebebasan/kemerdekaan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 791/7



Rumah-Rumah Panggung dan perahu kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/89



Type dari Sebuah rumah Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/14



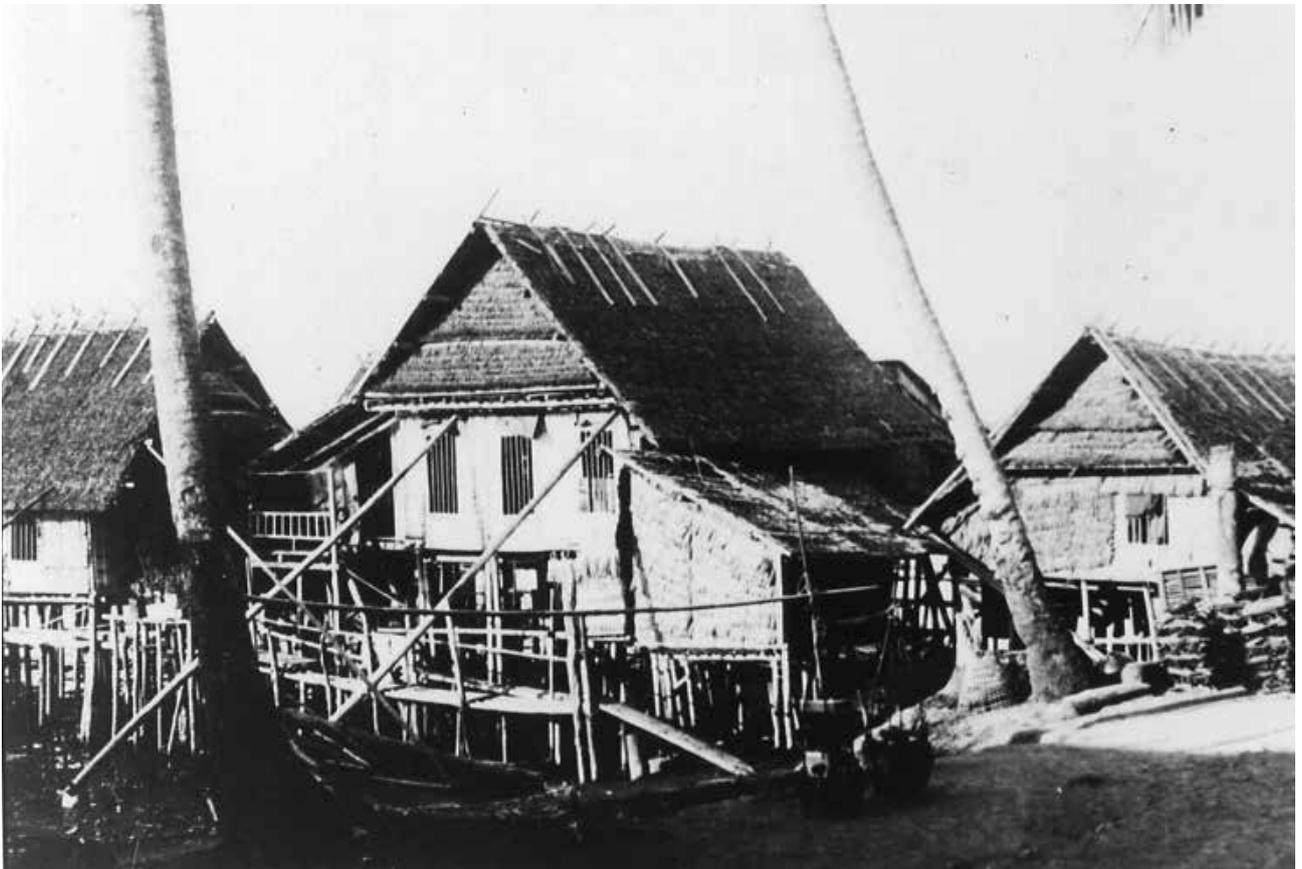
Rumah Kecil Sederhana Orang Makassar dari Bambu dan beratap rumbia, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/19



Rumah terbuat dari bambu dan beratap rumbia di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/21



Perkampungan orang Makassar di tepi pantai, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/23



Rumah Orang Makassar berbentuk panggung, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 833/11



Suasana di sebuah jalan , Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT KIT Sulawesi No. 215/16



Gedung (pertemuan), Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/19



Gedung penjara di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/25



Gedung *Raad van Justitie* di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/3



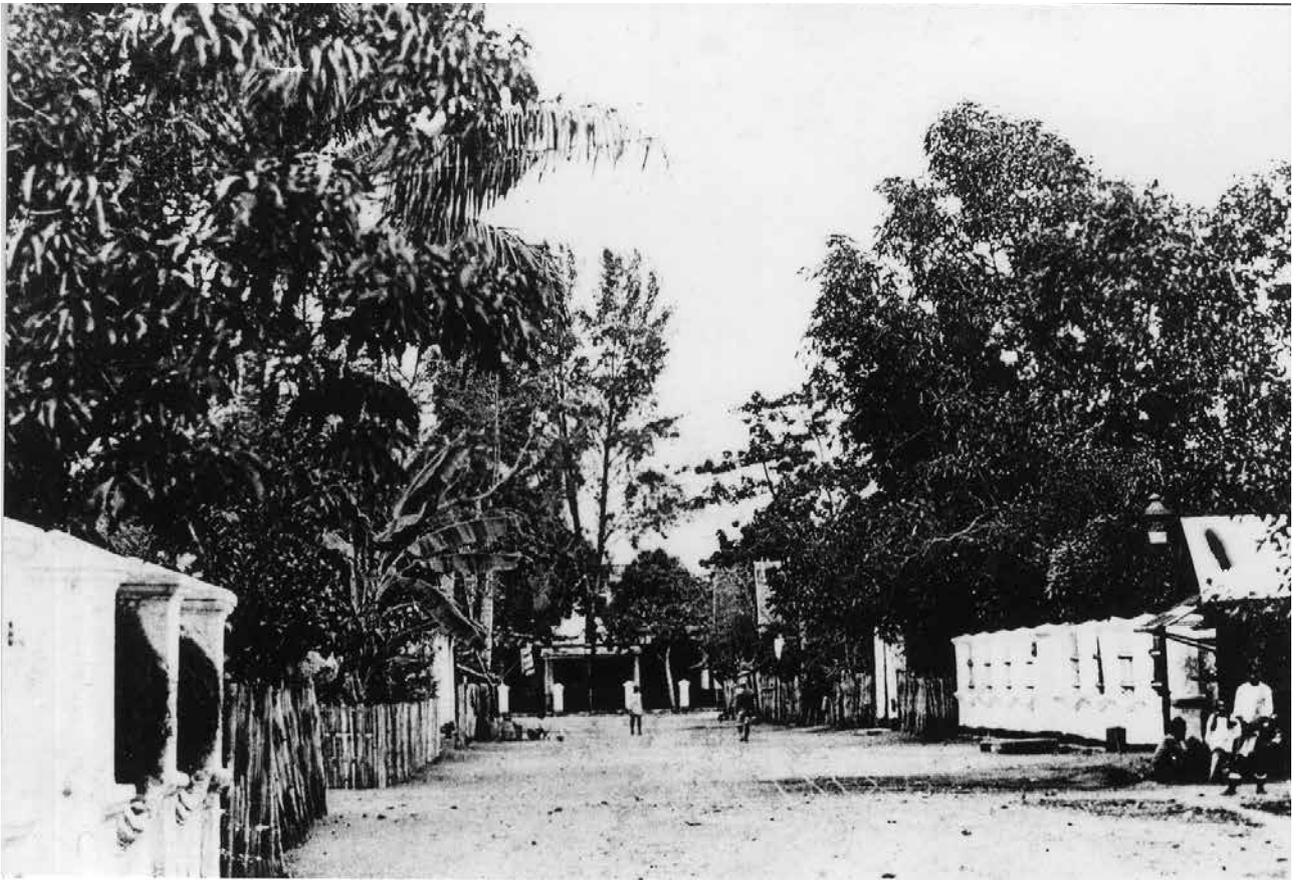
Gedung *Gemeente Huis* di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/6



Gedung Kementerian Keuangan Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 772/5



Jalan Utama Dekat Perumahan, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/20



Jalan Tamanrinde di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 653/52



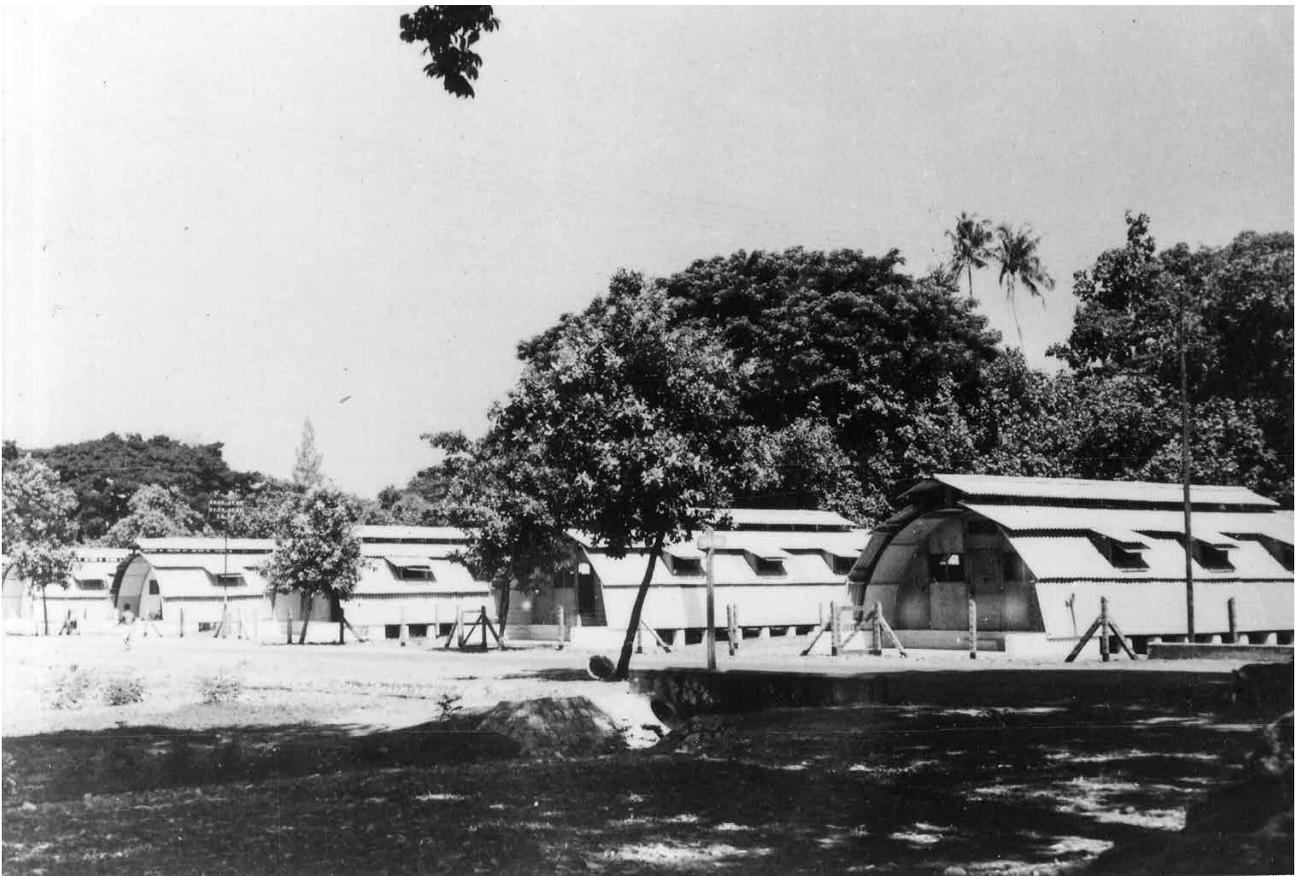
Suasana di sebuah jalan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/16



Jalan ditengah Perumahan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 248/42



Gudang di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/68



Rerutuhan Bastion Benteng tua yang dibangun tahun 1667,
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 338/80



Menara air setinggi 100 m untuk menyediakan air kota,
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/37



Kantor Pos di Makassar dilihat dari jauh, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/23



Suasana Jalan di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/33



Jalan yang Rindang di Hoge Pad, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/76



Suasana di Jalan Rumah Sakit, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/43



Suasana di Sepanjang Jalan Benteng, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/51



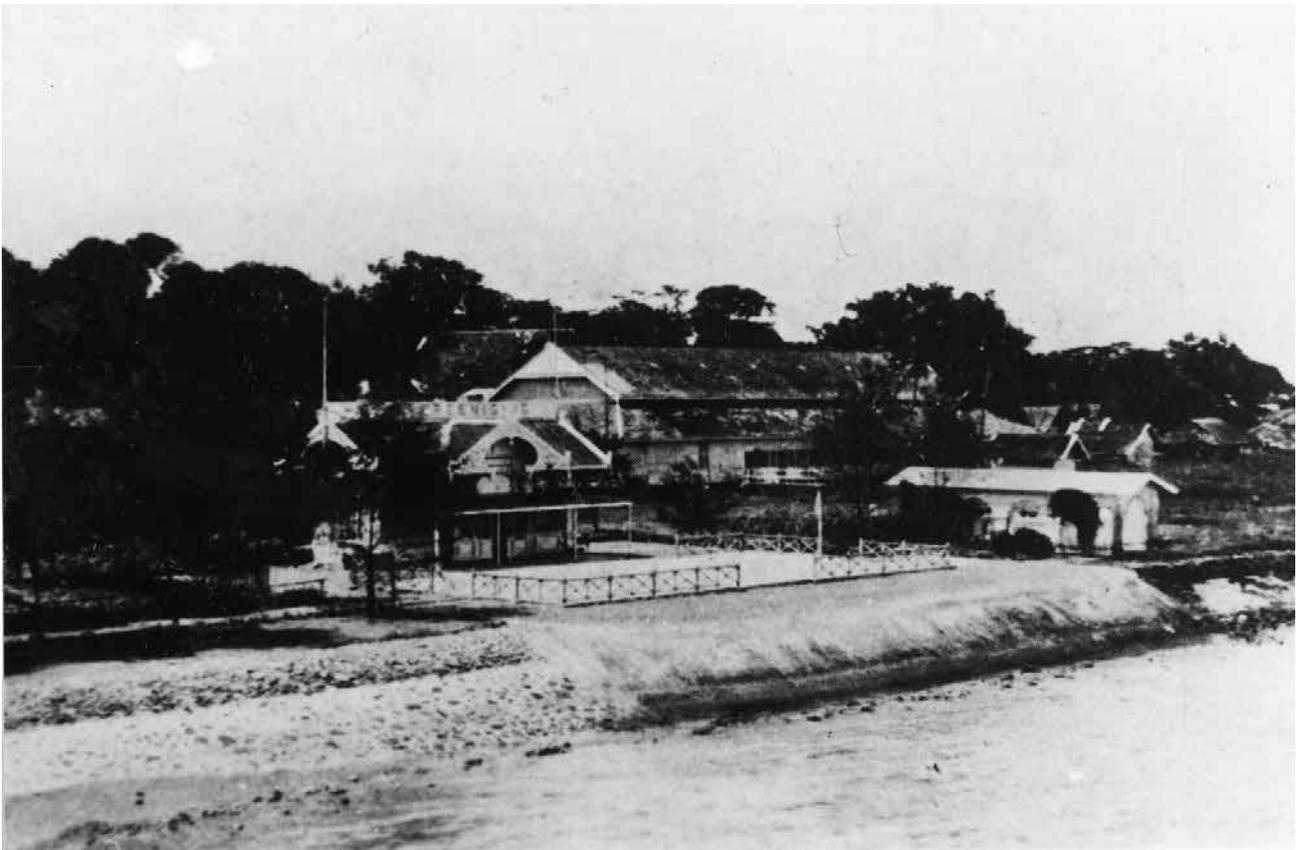
Hotel Oranye di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/56



Suasana Jalan Daalen dan Ressie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/66

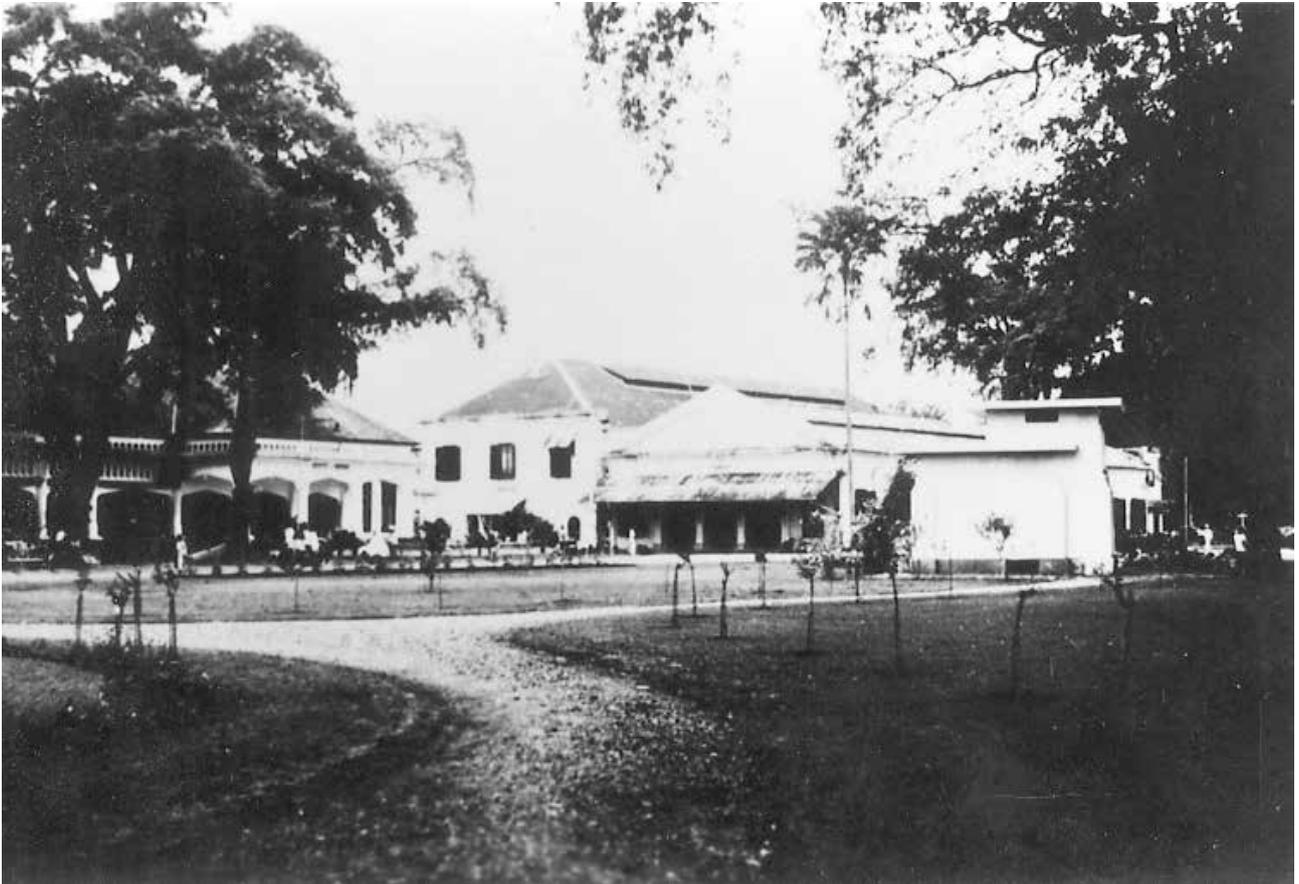


Komplek areal perkumpulan olahraga layar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 858/46



Benteng Sanana dengan Orang Belanda, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/62



Gedung Societeit Harmoni di Makassar, Sulawesi Selatan, 1938.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/67

18247-39-19
4
HOOFDKANTOOR D.V.G.
Afdeling G.
(Gezondmakingswerken
en Volkshuisvesting)
=====

ALGEMEEN SECRETARIAAT
AG. NO. 14017
16/6
15/6-39

No: V.B. 2/2/3
Bijlagen: 2

BATAVIA (CENTRUM), den 2den JUNI 1939.
Parapattan 10.

ONDERWERP:

Vervreemding van een stuk
grond van de N.V. "Volks-
huisvesting te Makassar".

Naar aanleiding van het hierbij aangeboden schrijven van de Directie der N.V. "Volkshuisvesting te Makassar" van 15 April j.l. No. 172/Q.1, heb ik de eer Uwer Excellentie eerbiedig het volgende mede te deelen.

De N.V. "Volkshuisvesting te Makassar" heeft in het jaar 1930 o.m. een stuk grond, gelegen in de Hoofdplaats Makassar aangekocht, ter bekorting verder te noemen: Terrein "Losari", bedoeld bij acte No. 61, verleden te Makassar op 16 Mei 1931, en breeder omschreven bij meetbrief ddo. 31 October 1930 No. 49. De oppervlakte van dit terrein is 1133 m², terwijl de totale verkrijgingskosten hebben bedragen f 3807,03 of f 3,36 per m².

Op een stuk van 150 m² na is dit geheele terrein door genoemde vennootschap met woningen bebouwd.

Aangezien de vennootschap in de naaste toekomst haar werkzaamheden zal beperken tot de exploitatie van de reeds gebouwde woningen en dus geen nieuwe huizen zal bouwen, kan met den verkoop van het restant van het terrein "Losari" d.z. worden ingestemd. De verkoopprijs van f 3,- per m² komt mij redelijk voor.

Ik moge Uwer Excellentie mitsdien eerbiedig in overweging geven wel Haar goedkeuring te willen verlenen tot verkoop van bovengenoemd stuk grond met een oppervlakte van 150 m² voor den prijs van f 3,- per m².

De Regeeringscommissaris
voor de Volkshuisvesting,

Aan

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië

te

BUITENZORG

(door tussenkomst van het Hoofd van den Dienst
der Volksgezondheid en de Directeuren van Onder-
wijs en Eredienst en Financiën).

[Handwritten signature]

202

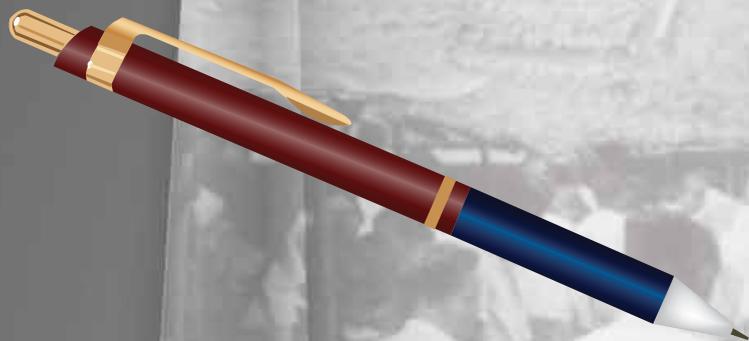
St.No.61.

Surat dari komisasi perumahan rakyat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai wilayah bersama "Losari" milik PT Perumahan Rakyat di Makassar, 2 Juni 1939.

Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 3342



Perbaikan Jalan di Tepi Pantai Tobe, Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/77



PEREKONOMIAN

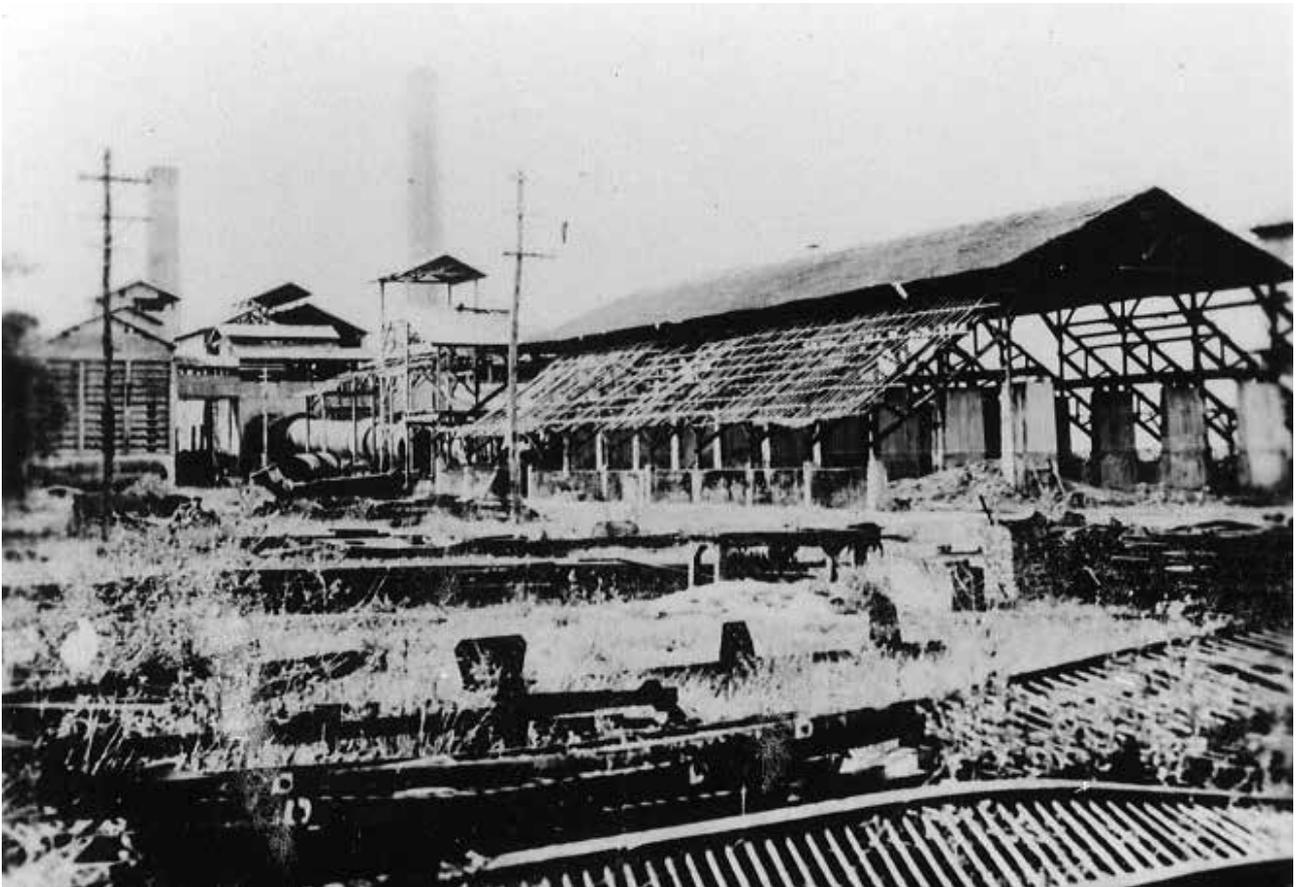


Proses pembentukan perdagangan Makassar pada abad ke-19 ditandai oleh masuknya pengaruh pemikiran ekonomi liberal dalam kehidupan berniaga di Hindia Belanda. Perkembangan perdagangan pada periode pelabuhan bebas di Makassar menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kebijakan pelabuhan bebas berhasil memikat pedagang asing memajukan perdagangan Makassar. Kebijakan ini merupakan cara pemerintah Hindia Belanda untuk memperkuat kedudukan ekonomi dan politiknya. Pada tahun 1930 telah dibangun Bank Jawa di Jalan Pasar, Makassar, Gedung Perdagangan, Gedung Bank Indonesia, pabrik semen, serta ramainya suasana pasar tradisional dan pertokoan di Jalan Utama, Makassar. Adapun komoditi pertanian dan hasil hutan di Makassar tahun 1930-an adalah kopra dan biji damar.



Pemandangan di kantor perdagangan dekat pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, 1890.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/14



Pabrik semen yang rusak setelah masa kapitulasi Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 785/17



Suasana Daerah Pertokoan di Jalan Utama, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 758/13



Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.

Sumber: ANRI, Kempen No. 1-24-1



Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/70



Bank Jawa (*Javasche Bank*) di Jalan Pasar, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/46



Daerah perkantoran dengan jalan yang rindang di *Hoge Pad* Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/47



Daerah pertokoan kuno di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/86



Gedung kantor utama KPM (*Koninklijk Paaketaart Matchapij*) di Makassar, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 782/95



Gedung *Nederlandse Handel Mij* (perdagangan) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/15



Gedung Kopra, tampak kopra yang telah dipak dalam karung, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 134/76



Wanita-Wanita Menyortir batu Damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/85

MENTERI PERDAGANGAN
Republik Indonesia

Agne 2437/62
28 Sept 62

No. : M. 0854/1962.
Lampiran: 1 (satu) berkas.
Perihal : Neratja Bulanan
Mandala Bhakti
di Makassar.-

Handwritten signature

Djakarta, 27 Agustus 1962.

Kepada

Jang Mulia Wakil Menteri
Pertama Dr.J. Leimena
di

D J A K A R T A

Bersama ini saja mengirim kepada Jang Mulia
Neratja Bulanan Mandala Bhakti Makassar mengenai
bulan Djuni dan Djuli 1962 untuk dipergunakan se-
perlunja.-



MENTERI PERDAGANGAN,

(Dr. SOEHARTO).-

- cc.: 1. Sdr. Pres. Dir. B.P.U.-P.D.N. (5 ex),
2. Sdr. Semua Direksi P2.D.N.,
3. Sdr. Semua Kuasa Menteri,
4. Sdr. Let. Kol. Suhardiman,
5. Sdr. Kepala D.P.D.N. (5 ex),
6. Sdr. Kepala Biro R & P., Biro Penerangan Komersial,
7. Biro Menteri (5 ex).-

Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama mengenai neraca bulanan Mandala Bhakti di Makassar untuk Juni dan Juli 1962, beserta lampiran, 27 Agustus 1962.

Sumber: ANRI, sekneg RI No. 1874



Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.

Sumber: ANRI, Kempen No. 65-14911



DAFTAR ARSIP





DAFTAR ARSIP

A. GEOGRAFIS DAN KEADAAN ALAM

1. Peta Kota Makassar dan sekitarnya, [1910]
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. C. 79
2. Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1922.
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148
3. Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan, 1924
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147
4. Perkampungan yang asri di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT No. 832/29
5. Bagian kota yang dibombardir sekutu ketika pendudukan Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, 1945.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 342/40
6. Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan 12 Agustus 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 2-2
7. Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan 5 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 4-2
8. Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1968.
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 23

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

9. Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda, 1667.
Sumber: ANRI, Makassar No. 273.a
10. Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar, [1669].
Sumber: ANRI, Makassar No. 294
11. Memorie van Overgave (Memori Serah Terima Jabatan) Residen Makassar antara Cornelis Beernick dan Willem de Roo, 14 Juni 1703.
Sumber: ANRI, Makassar No. 157
12. Surat Perjanjian Raja Makassar dengan Pemerintah Hindia Belanda, 23 November 1719.
Sumber: ANRI, Makassar 374/16
13. Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi (Celebes) dan Daerah Kekuasaannya, 1856.
Sumber: ANRI, Makassar 1.2
14. Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima yang merupakan bagian dari wilayah Tallo, Sulawesi Selatan.
Sumber: ANRI, Besluit 22 Juni 1896 No. 11
15. Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/12

16. Istana residen Indonesia Timur dilihat dari depan dan samping, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/54
17. Duta Besar Cina Hi Ti Chung mengunjungi Walikota Cina di Makassar dengan Membawa Bunga, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/28
18. Duta Besar Cina Hi Ti Chung dengan beberapa staff mengunjungi Walikota Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/62
19. Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai perubahan pembagian tata usaha dari afdeling Makassar dari bekas Keresidenan Selebes Selatan, 19 Januari 1950.
Sumber: ANRI, RIS No. 164
20. Presiden Soekarno berfoto bersama masyarakat India di Makassar, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 23
21. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika tiba di Bandara Hassanudin Makassar dalam rangka kunjungannya ke Makassar, 24 Februari 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. 5647
22. Bagian awal Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi, 6 September 1951.
Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88
23. Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. K 511111 RR 18
24. Kunjungan Kerja Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kunjungannya antara lain melihat harta benda negara dari Raja Goa di Makassar, 2 Juli 1952.
Sumber: ANRI, Kempen No. 520702 RR 2
25. Bagian awal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra, 12 Agustus 1952.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138
26. Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara peresmian pemindahan ibukota daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa, Januari 1953.
Sumber : ANRI, Muhammad Yamin No. 329
27. Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara Peringatan Pahlawan Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1954.
Sumber: ANRI, Muhammad Yamin No. 329a
28. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara Mandai Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Juli 1954.
Sumber: ANRI, Kempen No. 540715 RR 6

29. Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 22 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M 10534
30. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar, 29 September 1955.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 11856
31. Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Goa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar, 16 Januari 1957.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No. 137
32. Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Januari 1958.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 14451
33. Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa iPembebasan Irian Baratî di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Kempen M 16589/1

C. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

34. Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 87/K/1973.
Sumber: ANRI, R 530312 FG 1-1
35. Surat dari Sismadi kepada Wedana Tanah Merah tentang operasi penangkapan ke Makassar, 12 Juni 1929.
Sumber: ANRI, Boven Digoel No. 259
36. Pembesar Belanda diikuti Prajurit di benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/39
37. Pawai Sipil dan Militer, pada Pelaksanaan Pelantikan di depan Banteng Roterdam, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 326/84
38. Kedatangan Tentara Belanda di Makassar Batalyon ke 3 dari Infanteri Pemerintahan ke 11 dari Pasukan Angkatan Darat Berada di Atas Kapal, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/58
39. Surat Panitia penyelenggara konferensi seluruh nama perjuangan di Indonesia timur dan panitia bekas tawanan politik di Makassar tentang desakan supaya mendapat pengakuan menjadi tentara resmi guna menjaga keamanan di wilayah Indonesia timur, 2 Januari 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 84
40. Laporan Panitia Penghubung Perwakilan Republik Indonesia Serikat tentang insiden Makassar, 28 April 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 283

41. Kawat dari Front penentang proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar kepada Pati APRIS tentang permohonan untuk ikut serta dalam angkatan perang ke Maluku Selatan, disertai pengantar, 5 Mei 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 108
42. Komisi Parlemerter Makassar mengunjungi rumah dimana Robert Wolter Monginsidi ditangkap tentara Belanda, 7 November 1950.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 5435
43. Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal kepada Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar memenuhi panggilan pemerintah, 29 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762
44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953 tentang Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar, 18 November 1953.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Keppres No. 882
45. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, Makassar, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul Sulselra M 16807
46. Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H.Nasution di Lapangan Terbang Mandai, Makassar, menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD, 30 Maret 1960.
Sumber: ANRI, Kempen K 600330 RR 1
47. Dari kiri ke kanan: Kolonel M.Yusuf, Panglima Operasi Mandala: Mayor Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan Letnan Jenderal Gatot Subroto saat menghadiri Timbang Terima Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Wilayah Indonesia Timur di Makassar, 22 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M 16641
48. Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Februari 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16668.
49. Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara Pembubaran iKomando Mandala di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 1963.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 492

D. KEAGAMAAN

50. Tembok Sisa reruntuhan Masjid Bone di Makassar, Sulawesi Selatan, 1814-1816.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 807/004
51. Masjid tampak depan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 808/37
52. Gereja Protestan orang Toraja di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/14
53. Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 809/42

54. Pemakaman tentara sekutu beragama kristen di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930] .
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/90
55. Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri di Lapangan Karebosi, Makassar, 13 Juni 1953.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 8559
56. Gereja tua dekat Kastil Rotterdam yang sekarang di pakai gudang senjata Garnizun di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/20
57. Pintu masuk Klenteng Cina, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/14
58. Pemandangan di depan Masjid Raya Kota Makassar, 26 November 1954.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531126 RR 4
59. Surat surat mengenai konferensi Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), Makassar, 1955.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 1273
60. Surat dari PBNU kepada Konsul PBNU Sulawesi di Makassar mengenai penyelesaian dan penggantian ongkos perjalanan Udara Jakarta -Makassar untuk mengikuti konferensi Nahdlatul Ulama, 1 November 1955.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 61
61. Surat mengenai penyelenggaraan Kongres Bhinneka Tunggal Ika keamanan di Makassar, April 1957.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2977
62. Surat mengenai permohonan grasi dan memorie Van kasasie yang PBNU lakukan di pengadilan tinggi Makassar dan Surabaya, 2 April 1958.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2958
63. Surat dari ketua konsulat SBII (Serikat Buruh) Sulawesi kepada waperdam I RI mengenai ketidak puasannya terhadap wakil SBII Sulawesi dalam susunan p4d yang dianggap menguntungkan PKI, 22 Juni 1958.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2906

E. PARIWISATA DAN BUDAYA

64. Profil laki-laki muda di Makassar, Sulawesi Selatan, 1913.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 693/12
65. Sepasang pengantin Makassar dan Naik Kereta Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 388/72
66. Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik gantang (tromels), kecapi dua senar dan gong, Sulawesi Selatan, [1940].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 909/53
67. Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan, [1940].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/70
68. Profil gadis Makassar dengan pakaian adatnya, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 13
69. Presiden Soekarno berfoto bersama para gadis dengan menggunakan pakaian adat Makassar, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 152

70. Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Robert Wolter Monginsidi di Makassar, 28 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-29
71. Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro, di Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-43
72. Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan ketika sedang bermain di Studio RRI Makassar, 28 November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen No. 521128 RR 1
73. Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar, 8 Oktober 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531008 RR 2-3
74. Makam Sultan Hasanuddin di Makassar, 10 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571010 RR 4-7
75. Barisan Penari Cakalele menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan Terbang Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Kempen No. 620104 RR 14

F. PENDIDIKAN

76. Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur Makassar tentang dasar-dasar ketertiban di Makassar, 31 Mei 1828.
Sumber: ANRI, Makassar 458.a
77. Rumah Onderwyzer (Guru Sekolah Dasar) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 826/71
78. Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang telah lulus di Lembaga Pemasarakatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 November 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. 511123 RR 3
79. Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil No. 15/UP/3/3/34 tentang pemberian kesempatan belajar kepada V.H.R. Koroh, Kepala Daerah Swapraja Amarassi di SMA Makassar, 24 Januari 1952.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1080
80. Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 November 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531007 RR 7
81. Surat dari P.H.J.M Theuniissen kepada Presiden tentang pengangkatan PH YM Theunissen sebagai direktur sekolah menengah R.K Tomohon Makassar, 18 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 366
82. Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233
83. Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 31 Oktober 1958.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No.929
84. Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold Mononutu

sebagai Presiden Universitas Hasanuddin dan Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, 15 Juli 1960.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno No. 197

85. Bagian awal Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Sdr. Arnold Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Prof. Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, di Istana Merdeka, 15 Juli 1960.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 197

86. Pidato Presiden di hadapan Mahasiswa, Sipil dan Militer di Gedung Universitas Hasanuddin Makassar, 7 Januari 1962.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 362

87. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962.

Sumber: ANRI, Deppen RI No. 62-7336

88. Saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang memberikan ucapan selamat kepada Presiden Soekarno, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16950.

89. Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16947

90. Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden 1950-1959 No. 485

91. Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani (Menko Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 31 Desember 1964.

Sumber: ANRI, Roeslan Abdul Gani No. 1372

92. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pengesahan Statua Universitas Hasanuddin, 1 Juli 1977.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0235/U/1977

93. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0154/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hasanuddin, 5 Maret 1983.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0154/o/1983

94. Perubahan bentuk dan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Bhineka Tunggal Ika di Ujung Pandang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Bongaya Makassar, 19 Agustus 1988.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0398/o/1988

95. Fragmen sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Kongres Nasional ke II Serikat Mahasiswa Indonesia di Makassar, 8 Desember 1996.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Suharto No. 9984

G. OLAHRAGA DAN KESEHATAN

96. Bagian dalam apotik Rumah Sakit Militer di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 780/78
97. Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 128
98. Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 1952.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 7784
99. Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 Agustus 1954.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 10149
100. Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV di Stadion Makassar, Sulawesi Selatan, 28 September 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 570928 RR 2-3
101. Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 September 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 570930 RR 2-1
102. Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah ditolong oleh para juri, 1 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571001 RR 1-34
103. Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari 800 meter putera pada Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 1-3
104. Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 10 September 1959.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 15547

H. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

105. Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke Openbare Werkententang rencana pemberian kenaikan gaji untuk juru tulis dan pegawai bantu untuk tahun anggaran 1919.
Sumber: ANRI, BOW No. 1424
106. Surat dari direktur pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke Openbare WerkenAfdeelingH di Weltevreden tentang penyewaan lahan pelabuhan dan pernyataan bahwa lahan pelabuhan tidak dapat dibeli, 20 Oktober 1919.
Sumber: ANRI, BOW No. 1422
107. Surat dari Sekretaris Pelabuhan Makassar kepada Kepala Bagian Pelabuhan di weltevreden tentang sistem administrasi suplai barang masuk dan keluar di kantor pelabuhan Makassar, 26 Agustus 1924.
Sumber: ANRI, BOW No. 3699
108. Kedatangan Presiden pos Indonesia di Mandar Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/36
109. Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/

perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/17

110. Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai salah satu alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 674/78

111. Kantor pos dan telegraf di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/29

112. Kapal Motor *îBangoî* sebagai salah satu alat transportasi laut di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Desember 1952.

Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M.7876

113. Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar yang akan memuat rotan, 12 Agustus 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 5

114. Lalu lintas di Kota Makassar dan beca sebagai salah satu alat transportasi yang murah, 8 Oktober 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. K531008 RR 3-3

115. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1953.

Sumber: ANRI, Kempen No. K 531126 RR 1-9

I. INFRASTRUKTUR

116. Pintu Utama Benteng Amsterdam, Makassar Sulawesi Utara, 1703.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 345/75

117. Jalan Lama menuju kandang kuda, Makassar, Sulawesi Selatan, 1901.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 54/53

118. Pembangunan dan perbaikan gedung Bank Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, 1910.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/25

119. Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur BOW di Weltevreden antara lain mengenai pembangunan lahan milik pelabuhan dengan tegel bebatuan antara dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar, 26 Mei 1922.

Sumber: ANRI, BOW No. 2657

120. Pusat Karantina tua, Samalone, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 140/9

121. Raadhuiz(gedung dewan) dekat kastil Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/78

122. Menara pengawas dekat Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/10

123. Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/18

124. Ruang depan sebuah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/6

125. Pemandangan depan sebuah rumah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. *Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/68*

126. Tiang-Tiang Kerangka Bangun Rumah, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 743/28
127. Rumah Orang Bugis di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/1
128. Stasiun Radio Zending di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/81
129. Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 775/83
130. Monumen kebebasan/kemerdekaan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 791/7
131. Rumah-Rumah Panggung dan perahu kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/89
132. Tipe dari Sebuah rumah Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/14
133. Rumah Kecil Sederhana Orang Makassar dari Bambu dan beratap rumbia, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/19
134. Rumah terbuat dari bambu dan beratap rumbia di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/21
135. Perkampungan orang Makassar di tepi pantai, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/23
136. Rumah Orang Makassar berbentuk panggung, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 833/11
137. Suasana di sebuah jalan , Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT KIT Sulawesi No. 215/16
138. Gedung (pertemuan), Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/19
139. Gedung penjara di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/25
140. Gedung Raad van Justitie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/3
141. Gedung Gemeente Huis di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/6
142. Gedung Kementerian Keuangan Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 772/5
143. Jalan Utama Dekat Perumahan, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/20
144. Jalan Tamanrinde di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 653/52
145. Suasana di sebuah jalan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/16

146. Jalan ditengah Perumahan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 248/42
147. Gudang di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/68
148. Rerutuhan Bastion Benteng tua yang dibangun tahun 1667, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 338/80
149. Menara air setinggi 100 m untuk menyediakan air kota, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/37
150. Kantor Pos di Makassar dilihat dari jauh, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/23
151. Suasana Jalan di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/33
152. Jalan yang Rindang di Hoge Pad, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/76
153. Suasana di Jalan Rumah Sakit, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/43
154. Suasana di Sepanjang Jalan Benteng, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/51
155. Hotel Oranye di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/56
156. Suasana Jalan Daalen dan Ressie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/66
157. Komplek areal perkumpulan olahraga layar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 858/46
158. Benteng Sanana dengan Orang Belanda, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/62
159. Gedung Societeit Harmoni di Makassar, Sulawesi Selatan, 1938.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/67
160. Surat dari komisari perumahan rakyat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai wilayah bersama ìLosariî milik PT Perumahan Rakyat di Makassar, 2 Juni 1939.
Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 3342
161. Perbaikan Jalan di Tepi Pantai Tobe, Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/77

J. PEREKONOMIAN

162. Pemandangan di kantor perdagangan dekat pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, 1890.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/14
163. Pabrik semen yang rusak setelah masa kapitulasi Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 785/17

164. Suasana Daerah Pertokoan di Jalan Utama, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 758/13
165. Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.
Sumber: ANRI, Kempen No. 1-24-1
166. Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/70
167. Bank Jawa (Javasche Bank) di Jalan Pasar, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/46
168. Daerah perkantoran dengan jalan yang rindang di Hoge PadMakassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/47
169. Daerah pertokoan kuno di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/86
170. Gedung kantor utama KPM (Koninklijk Paaketvaart Matchapij) di Makassar, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 782/95
171. Gedung Nederlandse Handel Mij (perdagangan) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/15
172. Gedung Kopra, tampak kopra yang telah dipak dalam karung, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 134/76
173. Wanita-Wanita Menyortir batu Damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/85
174. Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama mengenai neraca bulanan Mandala Bhakti di Makassar untuk Juni dan Juli 1962, beserta lampiran, 27 Agustus 1962.
Sumber: ANRI, sekneg RI No. 1874
175. Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.
Sumber: ANRI, Kempen No. 65-14911

PENUTUP





PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kota Makassar Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda. Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari peran arsip/ANRI untuk ikut mencerdaskan bangsa dimana arsip merupakan sumber ilmu pengetahuan (*knowledge*).





Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id